

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak (KHA). Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan terarah.

Dari sisi kehidupan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataan, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terkait dengan anak, baik dari sisi perlindungan maupun pemenuhan hak sebagai seorang anak. Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, dan minimnya fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam situasi konflik dan bencana, anak juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan khusus untuk melindungi tumbuh kembang anak.



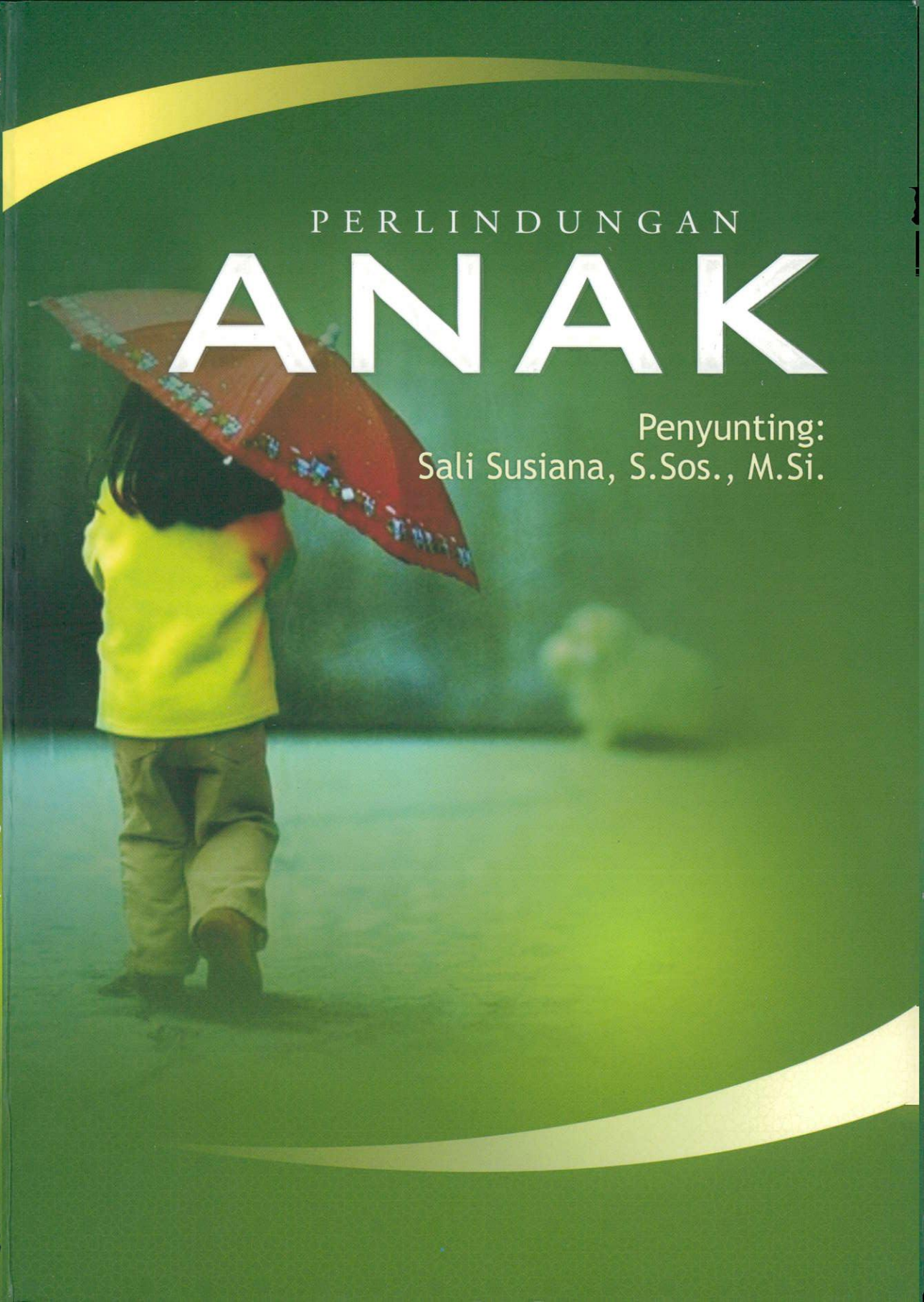
Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika



PERLINDUNGAN

ANAK

Penyunting:  
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.



PERLINDUNGAN

# ANAK

Penyunting:  
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.



# PERLINDUNGAN ANAK

**Penyunting:**  
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika



# **PERLINDUNGAN ANAK**

**Judul:**

Perlindungan Anak

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xi+125 hlm.; 17x24 cm

Cetakan Pertama, 2012

ISBN: 978-979-9052-67-4

**Penulis:**

Faridah Alawiyah

Herlina Astri

Dinar Wahyuni

Sulis Winurini

Lukman Nul Hakim

Elga Andina

**Penyunting:**

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

**Desain Sampul:**

Fery C. Syifa

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/ DIY/ 2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



## PENGANTAR PENYUNTING

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak (KHA). Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan terarah.

Dari sisi kehidupan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataan, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terkait dengan anak, baik dari sisi perlindungan maupun pemenuhan hak sebagai seorang anak. Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, dan minimnya fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam situasi konflik dan bencana, anak juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan khusus untuk melindungi tumbuh kembang anak.

Buku ini diawali dengan tulisan dari Faridah Alawiyah yang berjudul "Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus." Sistem pendidikan nasional selama ini belum mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK), bahkan cenderung memisahkan mereka melalui pendidikan khusus. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengungkapkan perlunya pendidikan inklusif sebagai salah satu solusi dalam permasalahan yang dihadapi pendidikan ABK dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak dengan keadaan normal dan ABK yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan demikian, semua anak terjamin dan memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan.

Bagaian kedua masih membahas masalah ABK, melalui tulisan berjudul "Aplikasi Kebijakan Pelayanan Publik bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia" dari Herlina Astri. Keterbatasan fisik dan/atau fungsi sosial menempatkan ABK sebagai sosok yang memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan anak normal. Kebijakan yang telah dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan ABK akan pelayanan publik sebaiknya tidak berhenti pada rumusan kebijakan saja tetapi juga pada aplikasinya secara riil. Penulis menyatakan bahwa pelayanan publik seharusnya dapat mengakomodasi kebutuhan ABK. Upaya tersebut antara lain dapat diwujudkan dengan membangun kesadaran publik tentang kepentingan ABK, membuka luas kesempatan pendidikan, dan pelatihan untuk ABK, serta mengikutsertakan ABK dalam memberikan aspirasinya untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembentukan jejaring informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas serta lingkup yang dapat memuaskan masyarakat, khususnya bagi ABK.

Berpartisipasi dalam kebijakan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan anak juga merupakan salah satu hak mereka yang perlu diakomodasi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dinar Wahyuni dalam Bagian ketiga menyoroti pentingnya hal tersebut melalui tulisan berjudul "Partisipasi Anak dalam Pengembangan Kota Layak Anak" Kota Layak Anak (KLA) pertamakali diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005 di lima kota yang menjadi *pilot project*, yaitu Surakarta, Jambi, Gorontalo, Sidoarjo, dan Kutai Kartanegara. Pengembangan KLA dimulai dengan pengarusutamaan hak-hak anak ke dalam program, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan anggaran kota. Perlindungan anak dijadikan *mainstreaming* dalam pembangunan wilayah kota. Partisipasi anak kemudian difasilitasi melalui penyediaan ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk bermain, berekspresi, dan berinteraksi serta penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak melalui pembentukan forum anak. Melalui forum ini, perwakilan anak dari 33 provinsi bertemu dalam satu forum, berdiskusi tentang pengalaman dan permasalahan anak di daerah kemudian mencari penyelesaian bersama. Dari forum ini diharapkan aspirasi anak dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Salah satu fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah *school bullying*. Kasus terakhir yang banyak diberitakan di media massa tentang *bullying* adalah yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Don Bosco Pondok Indah, Jakarta (*Kompas*, 31 Juli 2012). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, remaja masih termasuk ke dalam kategori anak, karena berusia di bawah 18 tahun. Dalam bab selanjutnya, yaitu Bagian keempat, fenomena yang menimpa sebagian siswa di sekolah tersebut dipilih untuk menjadi fokus tulisan oleh Sulis Winurini, dengan judul "*School Bullying* dalam Kehidupan Remaja." *School bullying* yang seolah sudah menjadi "tradisi" dalam lingkungan



sekolah ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang lazim, bahkan bermanfaat bagi perkembangan pribadi siswa. Tidak mengherankan bila para pelakunya membenarkan tindakan ini dengan alasan untuk menguji mental, menegakkan disiplin, atau mempererat persatuan angkatan pelajar. Remaja yang menjadi pelaku sering menggunakan *bullying* sebagai strategi untuk menunjukkan diri di antara teman sebayanya. Di lain pihak, korban merekam *bullying* sebagai sesuatu yang umum dilakukan terhadap junior, dan karenanya mereka akan melakukan hal yang sama kepada junior mereka di kemudian hari sehingga pada akhirnya nilai-nilai *bullying* terjaga dengan aman di dalam lingkungan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, menurut penulis dibutuhkan sinergi dan koordinasi dari berbagai pihak, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, sekolah, hingga pihak pemerintah.

Tidak dipungkiri bahwa secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Kesiapan untuk menghadapi bencana tidak hanya menyangkut aspek fisik, melainkan juga aspek psikologis. Pentingnya aspek psikologis dalam penanganan bencana diangkat oleh Lukman Nul Hakim melalui tulisan pada Bagian kelima yang berjudul "Pembentukan Resiliensi pada Anak Korban Bencana." Secara umum resiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam perjalanan hidupnya. Terkait dengan bencana, upaya pembentukan resiliensi terutama pada anak-anak harus dilakukan sejak prabencana, dengan menyisipkan pendidikan resiliensi sebagai bagian dari materi ajar muatan lokal (mulok). Apabila prinsip-prinsip dalam resiliensi telah tertanam pada jiwa anak-anak maka penanganan ketika terjadi bencana akan menjadi relatif lebih mudah. Keluarga maupun para pihak yang terlibat dalam penanganan bencana seperti tim relawan dapat memicu kembali pengetahuan mereka tentang apa yang mereka miliki dan apa yang dapat mereka lakukan. Upaya tersebut diharapkan membuat anak-anak menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana sehingga dampak negatif dapat dikurangi.

Buku ini ditutup dengan tulisan berjudul "Pendidikan Karakter untuk Generasi Sehat Mental" dari Elga Andina. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa perlu memiliki berbagai karakter unggul sehingga pada akhirnya mereka siap untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa ini di masa mendatang. Generasi muda harus dapat menjadi generasi yang religius, cerdas, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif dan penuh inovasi, berkepribadian kuat, serta tidak mudah menyerah, sehingga tidak akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, apalagi sampai melakukan tindakan bunuh diri. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri selama ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Hingga pertengahan tahun 2012, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak mencapai 20 kasus, dan 13 orang anak di antaranya meninggal dunia (*Media Indonesia*, 24 Juli 2012). Menurut penulis, pendidikan yang sehat mental sebagai salah satu upaya mengembangkan kesejahteraan hidup bagi generasi

## DAFTAR ISI

Pengantar Penyunting .....	v
Daftar Isi .....	ix

### Bagian I

#### Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus

<i>Faridah Alawiyah</i> .....	1
A. Pendahuluan.....	3
B. Kerangka Pemikiran.....	4
1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).....	4
2. Pendidikan Inklusif.....	6
C. Pembahasan.....	8
1. Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia.....	8
2. Kendala Pendidikan Inklusif.....	14
D. Penutup .....	15
1. Kesimpulan.....	15
2. Rekomendasi .....	16
Daftar Pustaka.....	17

### Bagian II

#### Aplikasi Kebijakan Pelayanan Publik bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia

<i>Herlina Astri</i> .....	19
A. Pendahuluan.....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	22
1. Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia .....	22
2. Kebijakan Pelayanan Publik.....	25
C. Pembahasan.....	28
1. Kebijakan Pelayanan Transportasi bagi ABK.....	31
2. Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi ABK.....	32
3. Kebijakan Pelayanan Pendidikan bagi ABK.....	33
D. Penutup .....	35
1. Simpulan.....	35
2. Rekomendasi .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	37



### Bagian III

#### Partisipasi Anak dalam Pengembangan Kota Layak Anak

<i>Dinar Wahyuni</i> .....	39
A. Pendahuluan.....	41
B. Metode Penelitian .....	43
C. Kerangka Pemikiran.....	43
1. Hak Anak .....	43
2. Partisipasi Anak.....	44
3. Konsep KLA .....	45
D. Pembahasan.....	47
1. Partisipasi Anak sebagai Hak.....	47
2. Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) .....	50
3. Tahap Partisipasi Anak Dalam Pengembangan KLA.....	52
E. Penutup .....	56
Daftar Pustaka.....	59

### Bagian IV

#### School Bullying dalam Kehidupan Remaja

<i>Sulis Winurini</i> .....	61
A. Pendahuluan.....	63
B. Metode Penelitian .....	66
1. Pengertian <i>School Bullying</i> .....	66
2. <i>School Bullying</i> dalam Kehidupan Remaja .....	67
2.1 Remaja .....	67
2.2 Mengapa <i>School Bullying</i> Bisa Terjadi Pada Remaja? .....	69
2.3 Terjadinya <i>School Bullying</i> pada Remaja.....	72
2.4 Dampak Negatif <i>School Bullying</i> .....	77
C. Penutup .....	80
Daftar Pustaka.....	83

### Bagian V

#### Pembentukan Resiliensi pada Anak Korban Bencana

<i>Lukman Nul Hakim</i> .....	85
I. Pendahuluan.....	87
A. Latar Belakang .....	87
B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	88
C. Tujuan Penelitian.....	89
D. Desain Penelitian .....	89
II. Kajian Literatur .....	89
A. Resiliensi .....	89
B. Psikologi Perkembangan Anak .....	94

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kejiwaan Anak.....	96
D. Stres dan Trauma.....	96
III. Pembahasan.....	96
Pembentukan Resiliensi pada Anak Korban Bencana.....	98
IV. Penutup .....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
Daftar Pustaka.....	103

## **Bagian VI**

### **Pendidikan Karakter untuk Generasi Sehat Mental**

<i>Elga Andina</i> .....	105
A. Pendahuluan.....	107
B. Pendidikan Indonesia dan Perilaku Menyimpang .....	108
C. Resiliensi.....	114
D. Pendidikan Karakter sebagai Sarana Membentuk Ketahanan Mental .....	116
1. Pengertian Pendidikan Karakter.....	116
2. Fungsi Pendidikan Karakter.....	116
3. Urgensi Pendidikan Karakter .....	117
E. Mengembangkan Pendidikan Karakter .....	118
1. Aspek Sumber Daya Manusia .....	118
2. Aspek Sistem Pendidikan .....	119
3. Aspek Sarana .....	119
F. Membentuk Komunitas Sehat.....	120
1. Lingkungan intrinsik.....	121
2. Lingkungan ekstrinsik .....	121
G. Penutup .....	121
Daftar Pustaka.....	123



**BAGIAN I**

**PENDIDIKAN INKLUSIF**

**BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

*Faridah Alawiyah\**

---

\* Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat *e-mail*: faridahalawiyah@gmail.com.

## A. Pendahuluan

Sektor pendidikan memiliki tugas penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan berpengaruh besar pada pembangunan. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Pendidikan di Indonesia menjadi sektor dinamis yang selalu mengalami perkembangan. Indonesia sendiri telah mengedepankan pendidikan sebagai salah satu pilar kemajuan bangsa menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan, karenanya pemberian hak untuk mengenyam pendidikan kepada seluruh warga negara secara tegas dijamin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berarti bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Salah satu bagian dari warga negara adalah anak berkebutuhan khusus (ABK). Meski tidak dapat dipastikan, jumlah ABK setiap tahun terus meningkat, diperkirakan 10% dari populasi anak di dunia ini adalah ABK.<sup>2</sup> Dinas Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional mencatat terdapat 324.000 orang ABK di Indonesia.<sup>3</sup> Prevalensinya yang tinggi serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai isu ini membuat ABK semakin mendapatkan perhatian.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu ada penanganan yang khusus terkait persoalan ini. Namun, perlakuan pada ABK saat ini kurang mendapat perhatian secara adil. ABK memang berbeda dengan anak pada umumnya. Mereka memiliki kelebihan maupun kekurangan baik dari segi fisik, mental, ataupun secara pemikiran. ABK dirasakan menjadi kelompok yang termarginalkan dari pendidikan. Ketika berbicara mengenai Sistem Pendidikan Nasional, sebagian besar masih mengarah pada pendidikan yang sifatnya umum atau reguler.

Meskipun demikian, ABK tetap harus memperoleh kesamaan perlakuan seperti anak lain, tidak terkecuali dalam masalah pendidikan. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran ABK adalah sama dengan warga negara lainnya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan khusus bagi ABK, namun memisahkan mereka dari masyarakat belajar yang sesungguhnya bertentangan dengan humanisasi pendidikan.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

<sup>2</sup> Nur Hari Ali, "Refleksi sekolah inklusif di Indonesia," 13 Oktober 2011, <http://fpcscs.uui.ac.id/refleksi-sekolah-inklusi-di-indonesia> diakses 17 April 2012.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



Pendidikan inklusif diharapkan menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang dihadapi ABK. Pendidikan inklusif merupakan solusi di mana ABK tidak mendapat perlakuan diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk tidak didiskriminasi dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, serta sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda.<sup>5</sup>

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik secara akademik dan sosial dalam *setting* yang inklusif, tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah yang terpisah atau khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa, dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif merupakan suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif.<sup>6</sup> Prinsip pendidikan inklusif sejalan dengan semangat UNESCO yang telah mencanangkan sejak lama *education for all* (1990), yang berarti adanya penekanan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dan eksekusi dalam pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, meskipun menjadi pendidikan yang ideal dalam upaya pemerataan pendidikan untuk semua kalangan termasuk ABK tanpa diskriminasi layanannya, pendidikan inklusif masih menemui berbagai kendala. Pendidikan Inklusif ini harus dipahami secara mendalam bukan hanya dalam tataran abstrak dan teoritis, namun juga harus dapat diterjemahkan secara praktis dan implementatif.

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini berusaha memaparkan mengenai bagaimana konsep dasar pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, serta kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

## **B. Kerangka Pemikiran**

### **1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

ABK merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya.<sup>7</sup> ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya.<sup>8</sup> Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional, termasuk dalam ABK. Anak berbakat dengan intelegensi yang tinggi juga dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional.

<sup>5</sup> Sumiyati, *PAUD Inklusi PAUD Masa Depan*, (Yogyakarta: Cakrawala Institute, 2011), hlm 17.

<sup>6</sup> "Ten Reasons for Inclusion," CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education) (2005) Pdf, <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>. diakses 10 April 2012.

<sup>7</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, (Yogyakarta: Katahati, 2010), hlm 33.

<sup>8</sup> Frieda Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*. (Depok: LPSP3 UI, 2009), hlm. 3.

ABK sebelumnya diistilahkan dengan penyandang cacat yang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.

ABK adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait, jika mereka menyadari akan potensi penuh kemanusiaan mereka.<sup>9</sup> Mangunsong mengatakan bahwa ABK adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan *neuromuscular*, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal tersebut, sejauh ia memerlukan modifikasi tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.<sup>10</sup>

Beberapa komunitas menyebutkan istilah lain untuk ABK yaitu difabel. Difabel adalah singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris *different ability people*. ABK seringkali dipahami sebagai kelompok yang tidak normal, tidak utuh, yang bahkan secara populer diistilahkan sebagai anak yang cacat. Bahkan seringkali diikuti dengan pelabelan, anggapan serta pemahaman yang tidak rasional seperti anggapan bahwa hal itu merupakan sebuah dosa turunan, kutukan, atau bahkan akibat dari aib keluarga. Hal tersebut kemudian berakibat pada berbagai bentuk penerimaan yang salah seperti rasa malu, penolakan atas keberadaan ABK, perlindungan yang berlebihan serta berbagai sikap yang secara sosial merugikan ABK mulai dari tingkat keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas.<sup>11</sup>

Beberapa ahli mengklasifikasikan ABK. Pengelompokan ABK dan jenis pelayanannya, sesuai dengan Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan Pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 1.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> M. Joni Yulianto, S.Pd, MA, "Membangun Masyarakat Inklusif; Makna Inklusif bagi Difabel", <http://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/> diakses 10 April 2012.



Tabel 1  
Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus

1.	Tuna Netra	9.	Tuna Wicara	16.	Bakat Istimewa ( <i>Multiple Intelligences: Language, Logico mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual</i> )
2.	Tuna Rungu	10.	Tuna Ganda		
	Tuna Grahita				
3.	( <i>Down Syndrome</i> )	11.	HIV AIDS	17.	<i>Gifted</i> : Potensi kecerdasan istimewa (IQ > 125 ). <i>Talented</i> : Potensi, Kesulitan Belajar (a.l. <i>Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/ Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik</i> )
4.	Tuna Grahita Ringan (IQ = 50-70)	12.	Lambat Belajar (IQ = 70 -90)		
5.	Tuna Grahita Sedang (IQ = 25-50)	13.	Autis		
6.	Tuna Grahita Berat (IQ < 25)	14.	korban Penyalahgunaan Narkoba		
7.	Tuna Daksa	15.	Indigo		
8.	Tuna Laras ( <i>Dysruptive</i> )				

Sumber: Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 2006.<sup>12</sup>

## 2. Pendidikan Inklusif

Salah satu layanan pendidikan yang menampung semua kalangan tanpa membedakan latar belakang adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dilandasi pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak dengan keadaan normal dan anak dengan kebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan lingkungannya. Melalui pendidikan inklusif semua anak terjamin dan memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan.

Menurut Sumiyati pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang terbuka dengan mengakomodasi semua peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan/atau peserta didik lainnya tanpa diskriminatif dengan cara belajar bersama.<sup>13</sup> Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> "Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 2006, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional," <http://www.ditplb.or.id/files/kebijakan2006.pdf> diakses 10 April 2012.

<sup>13</sup> Sumiyati, *ibid*, hlm. 13.

<sup>14</sup> "Pendidikan Inklusif," <http://www.slbk-batam.org/index.php?pilih=hal&id=78> diakses 12 April 2012.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Geniofam dalam Sumiyati mengatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama anak sebayanya di sekolah reguler.<sup>15</sup>

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dikatakan sebagai sekolah inklusif. Stainback mengatakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.<sup>16</sup>

Dengan kata lain pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang merangkul semua anak dalam kondisi apa pun untuk bersama mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan dengan tetap memberikan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi, kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik. Pendidikan inklusif tentu saja mengedepankan persamaan hak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, baik latar belakang sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan kondisi fisik dan mental anak. Pendidikan inklusif mengarah pada penyatuan layanan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus. Semangat dari pendidikan inklusif ini merupakan semangat terbuka untuk merangkul semua peserta didik dengan kondisi apapun, karena perbedaan keterbatasan merupakan ciri dari beragamnya masyarakat sosial.

Pendidikan untuk ABK telah disiapkan dengan kelas dan pendidikan khusus, namun pemisahan kelas "normal" dengan kelas "khusus" sebenarnya bertentangan dengan konsep dasar humanisasi pendidikan. Disatu sisi ABK merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus diakui keberadaannya di tengah masyarakat, namun di sisi lain masyarakat luas pun harus menerima perbedaan tersebut menjadi satu bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya. Dan itu seharusnya dimulai dari pendidikan di mana mereka disiapkan untuk terbiasa di lingkungan sekolah pada umumnya.

Terdapat tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk ABK, yaitu segregatif (segresi), integratif, dan inklusif. Pada pendidikan sistem segregatif ABK mendapat pelayanan pendidikan melalui kelas khusus. Sementara pendidikan dengan sistem integratif dilakukan dengan menyatukan ABK dengan anak lain sehingga menjadikan mereka tidak terpisah dari lingkungan normal. Model ini kemudian berkembang

<sup>15</sup> Sumiyati, *ibid*, hlm. 15.

<sup>16</sup> "Pendidikan Inklusif," <http://www.slbk-batam.org/index.php?pilih=hal&id=78> diakses 12 April 2012.



menjadi pendekatan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak secara individual dalam kelas klasikal.<sup>17</sup>

Penelitian di negara lain yang dipelopori oleh *The National Academy of Science* sejak tahun 1980-an menunjukkan hampir seluruh penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif jauh lebih baik daripada pendidikan khusus secara segregasi. Para peneliti memberikan rekomendasi bahwa pendidikan khusus hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat.<sup>18</sup> Mangunsong mengungkapkan tiga alasan utama mengapa pendidikan inklusif ini menjadi pilihan tepat, *pertama* hasil riset tidak menunjukkan jelas bahwa sekolah khusus menghasilkan prestasi lebih baik daripada yang terintegrasi, terlebih bagi mereka yang memiliki kekhususan yang ringan. *Kedua*, ada riset yang menyarankan keuntungan model pendidikan yang inklusif bagi mereka dengan kekhususan yang berat dan majemuk. Dan *ketiga*, adanya penerimaan terbuka tentang hak setiap individu untuk berpartisipasi penuh di dalam komunitas umum yang sesuai dengan pilihan mereka.<sup>19</sup>

Sejalan dengan hal tersebut berbagai konvensi nasional maupun internasional mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar tentang Persamaan Hak bagi Difabel (1993). Berbagai konvensi tersebut dalam beberapa substansinya mempunyai poin-poin yang relevan dengan semangat pendidikan inklusif sebagai sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keberbedaan, keunikan serta keberagaman masing-masing peserta didik.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Jumlah ABK di Indonesia meningkat dari 1:10.000 menjadi 1:1500.<sup>20</sup> Peningkatan jumlah ABK ini diakibatkan oleh berbagai faktor, baik faktor kelainan yang terjadi ketika masih dalam kandungan ataupun masa keemasan dalam perkembangan.<sup>21</sup> Menurut Satyadi meningkatnya populasi ABK ini salah satunya karena perubahan gaya hidup yang memang berbeda pada zaman dulu serta banyaknya orang yang peduli terhadap ABK.<sup>22</sup>

ABK merupakan bagian dari warga negara dan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Hak untuk memperoleh

<sup>17</sup> Syaiful Anam, *Indra Djati Sidi dari ITB untuk Pembaruan Pendidikan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2009), hlm. 410-411.

<sup>18</sup> Sumiyati, *ibid*, hlm. 13.

<sup>19</sup> Frieda Mangunsong, *ibid*, hlm. 7.

<sup>20</sup> "Dampingi Anak Berkebutuhan Khusus," <http://www.autis.info/index.php/artikel-makalah/artikel/165-dampingi-anak-berkebutuhan-khusus>. diakses 12 April 2012.

<sup>21</sup> "Sekolah Inklusi: Solusi Pendidikan Untuk Semua" <http://www.sekolahkreatif.com/articlesview-4-sekolah-inklusi--solusi-pendidikan-untuk-semua-----.html>. diakses 12 April 2012.

<sup>22</sup> "Dampingi Anak Berkebutuhan Khusus," <http://www.autis.info/index.php/artikel-makalah/artikel/165-dampingi-anak-berkebutuhan-khusus>. diakses 12 April 2012.

pendidikan tersebut harus merata tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa ABK memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Pendidikan tentu saja harus disiapkan untuk menyediakan layanan yang dapat mempersatukan berbagai latar belakang, fisik, mental, sosial, maupun emosional di mana pola pemikiran segregasi atau pemisahan harus bergeser ke pola pemikiran integrasi. Pendidikan inklusif dirancang untuk menerima keberagaman yang dapat berdampak positif bagi pendidikan, yaitu pembangunan rasa sosial, baik untuk anak pada umumnya maupun ABK itu sendiri.

Kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap ABK adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Materi undang-undang ini antara lain berisikan hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dalam penanganan terhadap ABK, serta hak dan kewajiban ABK untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa ABK memiliki kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan antara lain agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.

Namun dalam pendidikan, seringkali ABK masih mendapatkan diskriminasi. Keterbatasan akses ABK dalam memperoleh pendidikan menjadi salah satu kendala pemenuhan hak tersebut. Seiring dengan berkembangnya pendidikan di Indonesia, pendidikan inklusif menjadi salah satu solusi permasalahan pendidikan bagi ABK.

Pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pendidikan formal di Indonesia telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2000, Pemerintah menekankan keberadaan pendidikan inklusif yang ditegaskan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang mengharuskan setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya memiliki empat sekolah inklusif, satu untuk setiap jenjang yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang kembali menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota mengemban kewajiban untuk melaksanakan sekolah inklusif. Penguatan kebijakan akan keharusan setiap daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif menunjukkan perhatian pemerintah terhadap ABK untuk lebih mudah mengakses pendidikan melalui sekolah inklusif.

Tahun 2010 Indonesia telah memiliki 811 sekolah inklusif yang menampung 15.144 siswa yang rencananya akan terus dikembangkan dan diperluas.<sup>23</sup> Bila dibandingkan dengan total ABK secara menyeluruh yang mencapai 324.000 orang anak, jumlah ini belum sebanding untuk menampung anak dengan kebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Diperlukan perluasan sekolah reguler yang

<sup>23</sup> Merry Wahyuningsih, "Sekolah Umum Harus Siap Tampung Anak Berkebutuhan Khusus", 2 Maret 2010, <http://health.detik.com/read/2010/03/02/093329/1309070/764/sekolah-umum-harus-siap-tampung-anak-berkebutuhan-khusus>. diakses 12 April 2012.



menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk terbuka menerima dan mendidik ABK. Perluasan tersebut harus berdasarkan sebaran data ABK yang ada, agar serapannya lebih optimal.

Pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain didasarkan pada beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 31 Ayat 1 dan ayat 2);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Pasal 6 Pasal 11, dan Pasal 12);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 8);
4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15, Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa; dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif adalah dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Berbagai kebijakan yang telah disebutkan harus mampu menjadi acuan pelaksanaan pendidikan inklusif yang diperlukan untuk mendukung implementasinya. Berbagai kebijakan tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak akan pendidikan bermutu, adil, dan merata agar ABK memperoleh kedudukan yang layak sebagai warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Seperti telah banyak disinggung sebelumnya, pendidikan yang bersifat segregasi memiliki dampak negatif bagi anak. Pendidikan segregasi dapat mengakibatkan anak

menjadi takut, bodoh, dan menumbuhkan prasangka. Semua anak membutuhkan pendidikan yang akan membantu mereka mengembangkan relasi dan menyiapkan mereka untuk hidup dalam arus utama, inklusif berpotensi untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, penghargaan, dan pengertian.<sup>24</sup> Sementara Geniofam dalam Sumiyati mengungkapkan terdapat nilai positif pendidikan inklusi, antara lain:<sup>25</sup>

1. Membangun kesadaran sekaligus menghilangkan sikap dan nilai diskriminatif;
2. Meminimalkan peluang anak tidak bersekolah;
3. Meminimalkan hambatan untuk sekolah yang berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lain terhadap akses pembelajaran; dan
4. Dapat melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Sejalan dengan hal tersebut, Nuryatno dalam Sumiyati mengatakan bahwa secara akademik, pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain:<sup>26</sup>

1. Setiap orang secara inheren mempunyai hak terhadap pendidikan atas dasar kesamaan kesempatan;
2. Tidak boleh ada peserta didik yang tereksekusi dan terdiskriminasi dalam pendidikan dengan alasan apa pun, apakah ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik, difabilitas, ataupun lainnya;
3. Semua anak pada dasarnya dapat belajar dan mendapat manfaat dari pendidikan. Prinsip ini didasari oleh keyakinan bahwa betapapun naif dan bodohnya anak, dia dapat berkembang dan berubah;
4. Sekolah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan bagi peserta didik, bukan peserta didik yang harus beradaptasi terhadap kebutuhan sekolah;
5. Perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik adalah sumber kekayaan dan keragaman, bukannya sebuah masalah. Diversitas memperkaya, bukannya menghambat atau memperlambat proses pembelajaran;
6. Dasar pendidikan inklusi bukanlah asimilasi, tetapi apresiasi atas perbedaan. Prinsip apresiasi menjadi penting disini, yaitu *how to accept, respect, and value differences*.

Tentu saja tidak mudah mengimplementasikan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan akan dihadapkan pada keberagaman peserta didik dengan kompleksitas yang tinggi karena ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pendidikan

<sup>24</sup> CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education) (2005) Pdf., <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>. diakses 10 April 2012.

<sup>25</sup> Sumiyati, *ibid*, hlm. 18.

<sup>26</sup> *Ibid*.



bagi ABK. Hal prinsip tersebut terdiri dari *pertama*, prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada anak agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam pemberian motivasi seorang guru harus lebih sering memberikan motivasi secara personal karena setiap anak memiliki masalah yang berbeda. *Kedua*, prinsip latar atau konteks, dimana pengenalan antara guru dengan muridnya menjadi sangat berarti. Perlu adanya orang-orang yang bersedia mengerti kondisi. Dengan adanya kedekatan antara guru dengan muridnya akan membantu pengenalan seberapa besar kemampuan anak dan seberapa apa masalah yang menyertainya. Dengan begitu guru akan memberikan materi kepada murid sesuai dengan porsinya.

*Ketiga*, prinsip keterarahan. Prinsip ini didasarkan pada setiap anak yang akan mengikuti kegiatan mendalam, dan guru harus memberikan tujuan yang jelas dalam prosesnya. *Keempat*, prinsip hubungan sosial. Guru harus dapat mengembangkan setiap strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi guru dengan murid, sesama murid, dan lingkungannya. *Kelima*, prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip ini menekankan bahwa guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri praktik, percobaan, atau upaya menemukan sesuatu, sehingga dapat melatih anak agar dapat mengatasi masalah yang nantinya mungkin sering dijumpai. *Keenam*, prinsip individualisasi. Guru harus mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, kemampuan atau ketidakmampuan, kecepatan atau keterlambatan sehingga dalam setiap kegiatan pembelajaran setiap anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai agar tidak terjadi ketimpangan antara anak yang satu dengan yang lain.

*Ketujuh*, prinsip menemukan. Guru mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk berperan aktif baik fisik, mental, sosial, maupun emosional. Dengan demikian anak-anak tidak lagi merasa kekurangan dalam dirinya dan membandingkan dirinya dengan anak lain. Yang ada adalah pemikiran bahwa dirinya menjadi seorang yang sama dengan anak normal lainnya yaitu berhak belajar dan mendapat pengajaran. *Kedelapan*, prinsip pemecahan masalah. Prinsip ini dapat merangsang anak untuk berfikir keras dan melatih anak untuk tidak menyerah dalam keadaan apa pun. Hal ini melatih anak untuk bertahan serta mentalnya pun dapat terlatih dengan baik dalam menghadapi segala permasalahan yang ada dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>27</sup>

Prinsip tersebut tentu saja harus selalu tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif, karena bila tidak, dikhawatirkan menjadi pendidikan yang tidak berbeda dengan pendidikan reguler biasanya, bahkan dikhawatirkan akan semakin memperlihatkan ketimpangan antara anak normal dengan ABK.

Dalam implementasinya, pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terbagi

<sup>27</sup> Aqila Smart, *ibid*, hlm. 77-81.

dalam dua jenis, yaitu sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua ABK atau sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak normal<sup>28</sup>. Kedua bentuk tersebut dapat dipilih sesuai dengan kesiapan sekolah, dan harus dengan mengutamakan akses pendidikan untuk lingkungan sekitar.

Sekolah sebagai unit pelaksana teknis kebijakan pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang "hangat", ramah, menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan serta harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Sementara guru sebagai pelaku utama pendidikan inklusif harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran serta melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.<sup>29</sup>

Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan penempatan ABK di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model berikut:<sup>30</sup>

1. Kelas reguler (inklusif penuh), di mana ABK belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
2. Kelas reguler dengan *cluster*. Pada model ini ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus.
3. Kelas reguler dengan *pull out*, di mana ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, di mana ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Pada model ini ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler.
6. Kelas khusus penuh, di mana anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Dalam melaksanakan model tersebut tentu saja sekolah harus memainkan peran sentral dalam menghadapi kompleksitas peserta didik. Dan model tersebut mengasumsikan bahwa setiap anak dengan kebutuhan khusus diharuskan berada

<sup>28</sup> "Pendidikan Inklusif," <http://www.slbk-batam.org/index.php?pilih=hal&id=78> diakses 12 April 2012.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Sumiyati, *ibid*, hlm. 18.



dalam kelas reguler dengan mengikuti semua pelajaran yang ada. Sebagian dari mereka dapat berada dalam ruang khusus atau ruang terapi, tergantung pada gradasi kebutuhan khususnya.

## **2. Kendala Pendidikan Inklusif**

Melaksanakan pendidikan inklusif bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena tidak hanya sebatas menerima peserta didik yang merupakan ABK pada lembaga pendidikan secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya. Namun lebih dari itu, pendidikan inklusif dibangun atas dasar persamaan hak, keberagaman, dan keadilan, untuk secara bersama membangun masyarakat belajar dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, karena pelayanan pendidikan yang sama bagi setiap warga negara merupakan bagian dari implementasi konsep pendidikan yang berkeadilan.

Saat ini kebijakan pendidikan inklusif telah dilaksanakan. Namun dalam implementasinya pendidikan inklusif sejauh ini masih belum mampu menjawab kebutuhan akan kemudahan mengakses serta peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Secara garis besar kesulitan melaksanakan pendidikan inklusif akan muncul ketika sekolah harus memberikan pelayanan pendidikan yang tidak memaksa peserta didik untuk mengikuti satu sistem tertentu, tetapi sekolah itu sendiri yang harus membuat sistem yang dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik dengan kompleksitas yang tinggi.

Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di antaranya adalah, *pertama*, kurikulum yang masih bersifat kaku. Pada kenyataannya, pendidikan nasional saat ini masih belum fleksibel. Kondisi ini akan menyulitkan ABK yang berada dalam kelas inklusif. *Kedua*, ketidaksiapan sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan tenaga profesional serta kemampuannya dalam melaksanakan pendidikan inklusif seperti ketersediaan dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut masih menjadi kendala di sebagian besar sekolah. Secara administratif tenaga kependidikan belum sepenuhnya mampu melaksanakan sistem pendidikan inklusif yang berbeda dari sekolah reguler. Di samping itu, banyak guru yang masih belum memahami program inklusif. Guru yang mengajar di sekolah inklusif harus memiliki kemampuan dan keterampilan deteksi dini gangguan dan potensi pada ABK. Dengan kompleksitas yang tinggi dan tanpa guru pendamping khusus, pelaksanaan pembelajaran pun mungkin tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Guru harus terampil dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan peserta didik. Kompleksitas kemampuan dan keterampilan guru di sekolah inklusif menjadikan guru tidak mampu dan tidak mau menangani ABK, sementara ketersediaan guru pendamping khusus juga masih belum mencukupi kebutuhan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

*Ketiga*, kesiapan sumber dan fasilitas belajar. Sumber belajar dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti media belajar, infrastruktur, serta

berbagai fasilitas sekolah lainnya yang dapat mendukung semua proses pembelajaran dengan kompleksitas peserta didik. *Keempat*, pendidikan inklusif dinilai relatif lebih mahal, sementara ABK umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu, baik secara ekonomi maupun sosial dan pendidikannya. Akibatnya kemampuan dan kemauan anak atau orang tua untuk menyekolahkan anaknya menjadi sangat terbatas. Namun begitu, pemerintah dalam kebijakannya telah menyiapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan agar siswa dapat mengenyam pendidikan gratis. Apabila sekolah melaporkan kepada pemerintah bahwa sekolahnya menerima ABK, maka sekolah akan mendapat dukungan dana.<sup>31</sup> Hanya saja pada kenyataannya implementasi pendidikan inklusif tidak dapat dilaksanakan semudah itu. Untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik sekolah, orang tua, maupun lingkungan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Keberadaan ABK masih belum sepenuhnya dapat menjadi bagian yang inklusif dari lingkaran masyarakat. Seringkali mereka mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang pembangunan, padahal mereka merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama.

Salah satu sektor yang menjadi hak mereka adalah hak atas pendidikan bermutu. Sistem pendidikan nasional belum secara menyeluruh merangkul keberadaan ABK bahkan cenderung memisahkan mereka melalui pendidikan khusus. Pendidikan inklusif diharapkan menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang dihadapi pendidikan ABK untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendidikan inklusif dilandasi pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak dengan keadaan normal dan anak dengan kebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan lingkungannya. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan begitu, semua anak terjamin dan memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan.

Perlindungan serta upaya pemenuhan hak atas pendidikan untuk ABK banyak dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah ada, tujuan dari kebijakan tersebut adalah dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ABK untuk memperoleh persamaan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta

---

<sup>31</sup> Frieda Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kedua*, (Depok: LPSP3 UI, 2011), hlm. 218-219.



mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Kebijakan tersebut menjadi acuan pelaksanaan pendidikan inklusif yang diperlukan untuk mendukung implementasinya dalam upaya pemenuhan hak akan pendidikan bermutu, adil, dan merata, agar ABK memperoleh kedudukan yang layak sebagai warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Pendidikan inklusif diimplementasikan dalam dua bentuk yaitu sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua ABK atau sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak normal, sekolah tentu saja memiliki peran sentral dalam pengelolaannya.

Sebagai pendidikan yang berbeda dari pendidikan reguler biasanya, pendidikan inklusif mengalami berbagai kendala baik yang bersifat *hard resources* maupun *soft resources*, kendala tersebut antara lain kurikulum yang masih bersifat kaku, ketidaksiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendidikan inklusif dinilai relatif lebih mahal.

## **2. Rekomendasi**

- a. Diperlukan payung hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak ABK dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu serta memberikan jaminan atas kesetaraan dan keadilan.
- b. Diperlukan kebijakan untuk memperluas penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan sebaran data ABK di Indonesia.
- c. Dibutuhkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan pendidikan inklusif terkait dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
- d. Ketika pendidikan inklusif dilaksanakan, tentunya dibutuhkan banyak tenaga pendidik pendamping khusus yang harus segera disiapkan. Selain itu, pemberian pendidikan khusus bagi tenaga pendidik yang ada tetap harus dilakukan.
- e. Tidak hanya di bidang pendidikan, bidang lain termasuk penyediaan fasilitas publik yang ada pun juga harus disiapkan untuk mengakomodasi akses seluas-luasnya bagi ABK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syaiful. 2005. *Indra Djati Sidi dari ITB untuk Pembaruan Pendidikan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Abdurrahman, Mulyono. 2009. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangunsong, Frieda. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*. Depok: LPSP3 UI.
- , 2011. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kedua*. Depok: LPSP3 UI.
- Smart, Aqila. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat*. Yogyakarta: Katahati.
- Smith, David J. 2009. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sumiyati. 2011. *PAUD Inklusi PAUD Masa Depan*. Yogyakarta Cakrawala Institute.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

Keputusan Mendikbud No 02/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat.

Keputusan Mendikbud No 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.



**Internet:**

"Dampangi Anak Berkebutuhan Khusus," <http://www.autis.info/index.php/artikel-makalah/artikel/165-dampangi-anak-berkebutuhan-khusus>. diakses 12 April 2012.

Merry Wahyuningsih, "Sekolah Umum Harus Siap Tampung Anak Berkebutuhan Khusus", 2 Maret 2010, <http://health.detik.com/read/2010/03/02/093329/1309070/764/sekolah-umum-harus-siap-tampung-anak-berkebutuhan-khusus>. diakses 12 April 2012.

M. Joni Yulianto, S.Pd, MA, "Membangun Masyarakat Inklusif; Makna Inklusif bagi Difabel", <http://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/> diakses 10 April 2012.

Nur Hari Ali, "Refleksi sekolah inklusif di Indonesia," 13 Oktober 2011 <http://fpsscs.uui.ac.id/refleksi-sekolah-inklusi-di-indonesia> diakses 17 April 2012.

"Pendidikan Inklusif," <http://www.slbk-batam.org/index.php?pilih=hal&id=78> diakses 12 April 2012.

"Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 2006, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional," <http://www.ditplb.or.id/files/kebijakan2006.pdf> diakses 10 April 2012.

"Sekolah Inklusi : Solusi Pendidikan Untuk Semua" <http://www.sekolahkreatif.com/articlesview-4-sekolah-inklusi--solusi-pendidikan-untuk-semua-----.html>. diakses 12 April 2012.

"Ten Reasons for Inclusion," CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education) (2005) Pdf., <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>. diakses 10 April 2012.

**BAGIAN II**

**APLIKASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK  
BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA**

*Herlina Astri\**

---

\* Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.  
Alamat e-mail: [herlina.astri@gmail.com](mailto:herlina.astri@gmail.com)



## A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah menempatkan pelayanan publik sebagai lembaga dan profesi yang semakin penting. Pelayanan publik bukan kebutuhan yang harus dikesampingkan aktivitasnya, namun pelayanan publik dapat digunakan untuk melihat keberhasilan atau kinerja pemerintah. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah dalam memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Intinya pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Salah satu target yang harus dicapai dalam pelaksanaan layanan publik di Indonesia adalah aplikasi kebijakan yang berpihak pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di berbagai bidang, ABK masih mengalami begitu banyak kendala dalam menjalankan perannya, antara lain belum optimalnya kebijakan yang berpihak kepada ABK, terutama kebijakan layanan publik. Belum ada angka yang jelas tentang jumlah ABK di Indonesia, sebab penelitian tentang ABK masih sangat kurang. Nasib ABK di Indonesia juga sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di Negara Asia lainnya.<sup>1</sup> Umumnya masih terpinggirkan di hampir semua sektor, sampai dengan ketersediaan pelayanan publik.

Saat ini jumlah ABK di negara-negara maju seperti Amerika diperkirakan mencapai 11,5%, dari populasi. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia kemungkinan jumlah ABK lebih banyak daripada negara-negara maju.<sup>2</sup> Menurut WHO, diperkirakan terdapat sekitar 7-10 % ABK total populasi anak.<sup>3</sup> Di Indonesia, belum ada data akurat tentang jumlah dan kondisi ABK, namun data dari Badan

<sup>1</sup> Pelayanan Masyarakat di Indonesia, [wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pelayanan-masyarakat-di-indonesia/](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pelayanan-masyarakat-di-indonesia/), diakses tanggal 1 Mei 2012.

<sup>2</sup> Rangkuman Materi Perkuliahan ABK [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195707041981031MUHDAR\\_MAHMUD/Rangkuman\\_Perkuliahan/Rangkuman\\_materi\\_perkuliahan\\_ABK.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195707041981031MUHDAR_MAHMUD/Rangkuman_Perkuliahan/Rangkuman_materi_perkuliahan_ABK.pdf), diakses tanggal 10 April 2012.

<sup>3</sup> *Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan: Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010), hlm. 4.

Pusat Statistik Nasional tahun 2007, terdapat 82.840.600 jiwa anak dari 231.294.200 jiwa penduduk Indonesia, dimana sekitar 8,3 juta jiwa diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus.<sup>4</sup>

Tanggung jawab pemerintah dalam mengaplikasikan kebijakan yang berpihak pada ABK masih belum optimal. Selain dari segi infrastruktur belum memadai, tenaga pelaksana kebijakan juga belum sesuai harapan. Hal ini semakin memprihatinkan, ketika ABK diposisikan sebagai warga nomor sekian di Indonesia. Meskipun dalam bidang pendidikan telah dirancang begitu banyak program untuk ABK, namun di bidang lainnya seperti kesehatan, ekonomi, politik dan sosial, ABK belum mendapatkan perhatian. Oleh karena itu kebijakan yang telah ada masih membutuhkan perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya, agar tepat sasaran sehingga memberikan capaian tujuan yang diharapkan.

## **B. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia**

Tidak semua anak beruntung dilahirkan secara normal, sebagian di antaranya lahir dengan kelainan bawaan dan ada yang mengalami kekerasan/trauma, atau kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan. Tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarganya secara utuh. Akibat keadaan tertentu, anak terpaksa tinggal di luar lingkungan keluarga seperti panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, atau terpaksa bekerja dan menjadi anak jalanan. Selain itu kondisi geografis dan pengaruh sosial budaya juga mempengaruhi keberadaan anak pada kelompok minoritas/terisolasi/terasing. Kelompok anak-anak tersebut memerlukan penanganan secara spesifik melalui berbagai program dalam rangka meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidupnya. Salah satunya adalah ABK, yang saat ini jumlahnya di Indonesia meningkat dan membutuhkan dukungan di berbagai bidang.

Istilah "*persons with special needs*" pertama kali dicantumkan dalam Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, Salamanca, Spanyol, 1994, diselenggarakan oleh UNESCO bekerjasama dengan pemerintah Spanyol.<sup>5</sup> Sedangkan istilah ABK merupakan bagian dari orang berkebutuhan khusus tersebut.

Menurut Heward, ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik.<sup>6</sup> Istilah lain bagi ABK adalah anak luar biasa dan anak cacat karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki. ABK memerlukan bentuk

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tarsidi, Didi. 2009. *Penyandang Ketunaan: Istilah Pengganti "Penyandang Cacat"*. [http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah\\_penyandang\\_cacat.php](http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah_penyandang_cacat.php), diakses tanggal 21 April 2012.

<sup>6</sup> Anak Berkebutuhan Khusus, [http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_berkebutuhan\\_khusus](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus), diakses tanggal 26 Maret 2012.



pelayanan khusus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Salah satu contoh, tunanetra memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan *Braille*. Beberapa kategori ABK antara lain:<sup>7</sup>

- a. Anak dengan Gangguan Fisik
  - 1) Tunanetra; Individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas.
  - 2) Tunarungu; Anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, sehingga membutuhkan pelayanan khusus.
  - 3) Tunadaksa; Anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus.
- b. Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku
  - 1) Tunalaras; Anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain.
  - 2) Anak dengan gangguan komunikasi; Anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa.
  - 3) Hiperaktif; Secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian.
- c. Anak dengan Gangguan Intelektual
  - 1) Tuna grahita; Anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial.
  - 2) Anak lamban belajar; anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70-90). Biasanya mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dari yang normal.

<sup>7</sup> Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, <http://rizkia-gahari.blogspot.com/2012/03/klasifikasi-anak-berkebutuhan-khusus.html>, diakses tanggal 2 Mei 2012.

- 3) Anak berkesulitan belajar; Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga disebabkan karena faktor disfungsi *neurologis*, bukan disebabkan karena faktor intelegensi (intelegensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
- 4) Anak berbakat; Anak berbakat atau anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreatifitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (*task commitment*) di atas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
- 5) Autisme; Gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku.
- 6) Indigo; Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Jenis-jenis indigo yaitu: a) **Indigo Humanis**, anak yang akan bekerja dengan orang banyak; b) **Indigo artis**, indigo yang sangat sensitif, perawakan kecil, berminat pada seni; c) **Indigo interdimensional**, indigo yang paling "sakti"; dan d) **Indigo konseptual**, lebih banyak mengerjakan proyek dibanding orang lain.

Secara umum sifat layanan untuk ABK meliputi upaya yang dilakukan sesegera mungkin setelah kebutuhan khusus anak diidentifikasi, akomodatif terhadap kebutuhan khusus anak, dilakukan secara berkesinambungan sepanjang usia, dan komprehensif atau menyeluruh dalam mengatasi hambatan yang dialami. Sesuai dengan sifatnya tersebut, layanan untuk ABK dimulai dari usia dini (atau sejak diidentifikasi kebutuhan khususnya) hingga usia dewasa. Tahap-tahap usia yang menjadi fokus yang menentukan keberhasilan layanan adalah usia dini, usia sekolah, dan usia transisi. Menurut Hardman layanan bagi ABK dalam setiap tahap usianya dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Usia dini; Bentuk layanan pada usia dini adalah intervensi meminimalkan efek kebutuhan khusus dan mencegah sebisa mungkin bertambahnya gangguan pada diri anak. Pada usia dini intervensi yang dilakukan bersifat intensif, komprehensif mencakup keseluruhan komponen tumbuh-kembang anak, fokus terhadap masalah pada tumbuh kembang, dan kontinu. Sedangkan wilayah layanan yang diberikan meliputi deteksi dini

<sup>8</sup> Anak Berkebutuhan Khusus, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 26 Maret 2012.



tumbuh-kembang, prakondisi akademik, latihan *activity daily living*, latihan *adaptive behavior*, upaya pencegahan cacat sekunder dengan mencermati pemberian *treatment* atau layanan, latihan peran sosial sebaya, dan memilih metode terapi yang sesuai.

2. Usia sekolah; Pada usia sekolah layanan yang diberikan berawal dari usia prasekolah atau yang biasanya disebut usia TK. Fokusnya adalah layanan adaptasi anak terhadap kondisi pertumbuhan fisik, perkembangan sosial, emosi dan tingkah laku, serta adaptasi terhadap tugas-tugas akademik. Layanan pada tahap usia ini selain melibatkan peran lembaga akademik seperti sekolah, juga membutuhkan peran suportif orang tua bekerja sama dengan pihak lain terkait layanan kebutuhan khusus anak sebagai rujukan seperti ortopedagogik, dokter, dan psikolog.
3. Usia transisi; Usia transisi merupakan tahap yang krusial karena mengusahkan kelangsungan masa depan ABK yang diharapkan tidak berakhir begitu saja di usia sekolah. Program yang dipersiapkan untuk anak pada masa ini dimaksudkan agar ABK mampu mencapai kemandirian personal, berintegrasi di lingkungan sosial, memiliki pilihan hidup yang mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri sesuai dengan usia, potensi, dan kapasitas mereka sebagai individu berkebutuhan khusus. Program layanan usia transisi berdasarkan pada kurikulum yang berorientasi pada aktivitas dan kebutuhan publik, perencanaan kehidupan usia dewasa (memilih pekerjaan, tempat tinggal).

Pada ABK terjadi gangguan dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada perkembangannya. Pada dasarnya masing-masing sasaran ABK memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan juga berbeda baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial. ABK membutuhkan berbagai macam bentuk dukungan. Selain kebijakan yang mendukung keberadaan mereka di tengah masyarakat, ABK juga membutuhkan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan publik.

## 2. Kebijakan Pelayanan Publik

Dalam masyarakat otoriter, pelayanan publik sering hanya berdasarkan keinginan penguasa saja. Namun saat ini pada masyarakat demokratis persoalan yang timbul adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik.<sup>9</sup> Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.35.

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan perusahaan pengangkutan milik swasta.
- b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik, yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - 1) Yang bersifat primer, adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/ klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
  - 2) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/ jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Adaptabilitas layanan; Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
- b. Posisi tawar pengguna/ klien; Semakin tinggi posisi tawar pengguna/ klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
- c. Tipe pasar; Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna/klien.
- d. *Locus control*; Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna atau penyelenggara pelayanan.
- e. Sifat pelayanan; Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Pelaksanaan pelayanan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Namun dalam pandangan masyarakat utamanya adalah pengukuran standar pelayanan publik yang dapat menjabarkan pelayanan yang menjadi haknya, siapa saja yang

<sup>10</sup> Pelayanan Publik, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik), diakses tanggal 2 Maret 2012.

<sup>11</sup> *Pelayanan Publik*, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 2 Maret 2012.

<sup>12</sup> *Ibid.*



mendapatkannya, apa persyaratannya, dan bagaimana bentuk layanan tersebut. Untuk menjawab keinginan masyarakat tersebut dan menjadikan kebijakan pelayanan publik yang dihasilkan lebih efektif, maka ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;
- b. Kebijakan yang dirumuskan harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; dan
- c. Adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Selanjutnya Nurcholis secara rinci membagi fungsi pelayanan publik ke dalam bidang-bidang berikut:<sup>14</sup> a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Keagamaan, d) Lingkungan (tata kota, kebersihan, sampah, penerangan), e) Rekreasi (taman, teater, museum, turisme), f) Sosial, g) Perumahan, h) Pemakaman/*crematorium*, i) Registrasi penduduk (kelahiran dan kematian), dan j) Penyediaan air minum. Meskipun secara umum ketersediaan layanan publik di Indonesia sudah cukup banyak pada bidang-bidang tersebut namun pemenuhan layanan publik bagi ABK masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Terutama dalam menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk ABK dan memudahkan aksesibilitasnya dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Sementara itu Barata menerangkan karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya: perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi.
- b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau bahkan nasional. Contoh: dalam hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan bergabung dengan pelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi, dan kereta api

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, hlm.35.

<sup>14</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm.180.

<sup>15</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.11-13.

- untuk membentuk sistem pelayanan angkutan umum di Jakarta.
- c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip "utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal." Namun situasi nyata dalam hubungan antarlembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.
  - d. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka makin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan.
  - e. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan hanya dilakukan oleh pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.
  - f. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.

Jika merujuk pada pendapat Barata, sebenarnya pelayanan publik memang tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum saja tetapi juga bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara akan adanya peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan dalam layanan publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini memerlukan norma hukum yang dapat memberikan pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **C. Pembahasan**

Saat ini keberhasilan pembangunan tidak hanya diwujudkan dengan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga memikirkan kemudahan-kemudahan yang diperlukan ABK dalam



melakukan aktivitas hariannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ABK saat ini masih terabaikan dan mengalami isolasi, penolakan, diskriminasi dan berbagai hambatan psikologis serta kultural.<sup>16</sup> Hambatan sosial merupakan salah satu penghalang bagi ABK untuk berinteraksi dengan lingkungan termasuk dalam memperoleh fasilitas publik.<sup>17</sup> ABK memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk dipenuhi dan dilindungi tanpa diskriminasi. Kebutuhan akan layanan publik mengalami perubahan paradigma penting sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Dari *problems-based services* ke *rights-based services*. Baik pelayanan sosial maupun pelayanan publik yang dahulunya diberikan sekadar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan konvensi internasional.
- b. Dari *rules-based approaches* ke *outcome-oriented approaches*. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.
- c. Dari *public management* ke *public governance*. Menurut Bovaird dan Löffler, dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market contract*.<sup>19</sup> Sedangkan dalam konsep pemerintahan publik, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari *social contract*. Namun ini tidak berarti bahwa paradigma baru berusaha untuk “menyingkirkan” paradigma lama. Meski paradigma baru cenderung semakin menguat, di antara keduanya senantiasa ada persinggungan dan kadang saling mendukung.

Ketiga pergeseran tersebut akhirnya membuka cara berpikir pemerintah untuk mulai mengedepankan peningkatan fasilitas publik, termasuk pengaturan pelaksanaan kebijakan layanan publik, sehingga tidak hanya sebagai pelengkap negaratetapi lebih diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan ABK. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) yang mengamanatkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, UUD 1945 Pasal 28 huruf h ayat (2) menyatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kata “setiap orang”

<sup>16</sup> *Profil Anak Indonesia 2011*. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. (Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2011 ISSN: 2089-3523), hlm.99.

<sup>17</sup> *Profil Anak Indonesia 2011*. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, hlm.103.

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, hlm.37.

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, hlm.37.

disini juga diartikan termasuk ABK. Perwujudannya merujuk pada pemberian kesempatan dan kemudahan anak dalam mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang tumbuh kembangnya.

Selain UUD 1945, isi UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh: 1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya; 3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; 4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 5) rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Merujuk UU tersebut di atas, maka sebenarnya secara langsung negara wajib menjamin keberadaan ABK dan kelangsungan hidupnya. Selain berkewajiban untuk menyediakan pelayanan yang ramah terhadap ABK, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan ABK sesuai derajat kecacatannya. Tujuannya agar pemberian layanan sesuai dengan harapan ABK, dapat meningkatkan atau menguatkan kemandiriannya meneruskan hidup.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, dan membuat kebijakan berupa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Terkait dengan ABK, pada Pasal 51 UUPA disebutkan anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa. Dalam Pasal 52 UUPA disebutkan anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak lagi diperlukan payung hukum maupun kebijakan khusus lain bagi ABK. Baik konstitusi maupun UUPA telah mengatur mengenai hal ini, bahkan beberapa fasilitas publik seperti ruang tunggu bandara, taman, *mall*, sudah didesain agar sesuai dengan kebutuhan ABK. Namun tidak dipungkiri bahwa belum semua orang dan infrastruktur mendukung pemberian fasilitas bagi ABK.

Pemberian kesempatan yang sama pada ABK tidak terlepas dari peran serta orang tua dan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM, salah satunya adalah hak-hak para ABK. Dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diuraikan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai



dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun sangat disayangkan secara riil ABK masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas publik, peran politik, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, pendidikan, informasi dan komunikasi, serta layanan kesehatan.

### **1. Kebijakan Pelayanan Transportasi bagi ABK**

Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Indonesia juga tidak mudah diakses oleh ABK. Seorang ABK mengalami kendala manakala harus menyeberang jalan. Kendala ini ditandai dengan undakan tangga yang terlalu sempit dan jalan yang tidak ramah untuk keamanan serta kenyamanan ABK. Sebagai contoh: anak yang tunanetra akan merasa kesulitan untuk menyimak marka jalan dan papan informasi umum. Selama ini mungkin pemerintah telah memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan pembangunan bidang transportasi yang berorientasi pada ABK. Salah satu contoh: adanya pengembangan dan peningkatan angkutan umum perkotaan yang diarahkan melalui pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota. Pengembangan transportasi perkotaan juga diarahkan untuk memperhatikan pejalan kaki dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.

Sebagai pengayom masyarakat, negara melalui semua pemangku peran terkait bertugas untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut, sehingga rakyatnya menjalani kehidupan yang berkualitas dan berperan dalam kehidupan khususnya bagi ABK. Tidak hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan ABK, tetapi juga memandang mereka sebagai salah satu aset pembangunan, sesuai fungsi dan kemampuannya masing-masing. Dalam memudahkan mobilitas ABK, maka yang harus disediakan oleh penyedia layanan publik adalah penyediaan fasilitas di bidang transportasi yang ramah terhadap ABK. Saat bepergian, selamanya seorang ABK dapat ditemani oleh seorang pendamping. Jika mereka harus bepergian sendiri, maka petugas penyedia layanan harus membantu mereka agar dapat bepergian dengan aman dan nyaman.

Peraturan perundang-undangan di sektor transportasi sudah secara tegas mengatur kewajiban badan usaha penyelenggara angkutan untuk menyediakan pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas memadai bagi orang dengan kebutuhan khusus. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada Bab XI Pasal 134 mengamanatkan bahwa penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara. Selain itu, harus tersedia informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

Oleh karena itu semestinya semua pihak termasuk regulator dan operator layanan jasa transportasi dapat segera menindaklanjuti ketentuan yang

diamanahkan UU tersebut. Utamanya dalam penerapan di lapangan secara baik dan benar, serta menyediakan SDM yang telah terlatih sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

## **2. Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi ABK**

Kebijakan layanan publik untuk ABK, tidak terbatas pada kemudahan mengakses transportasi tetapi juga kemudahan dalam pemeliharaan kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dalam pemberian fasilitas dasar kesehatan seperti:<sup>20</sup>

### **a. Puskesmas dan jaringannya**

Pada umumnya puskesmas dan jaringannya telah dilengkapi dengan alat kesehatan dan obat-obatan untuk menyelenggarakan 6 (enam) upaya kesehatan wajib puskesmas, yaitu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Pemberantasan Penyakit (P2), kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengobatan. Sedangkan program perlindungan kesehatan ABK merupakan upaya pengembangan program yang dilaksanakan di puskesmas tertentu dan memerlukan fasilitas secara spesifik, antara lain:

- 1) Tenaga terlatih/terorientasi terhadap program perlindungan kesehatan ABK;
- 2) Sarana pendukung seperti ruang konseling/wawancara, instrumen diagnostik, dan alat bantu untuk koreksi kelainan yang ditemukan;
- 3) Buku-buku pedoman tentang program perlindungan kesehatan ABK; dan
- 4) Format pencatatan dan pelaporan.

### **b. Pelayanan rujukan di rumah sakit, klinik tumbuh kembang**

Pelayanan kesehatan ABK memerlukan penanganan spesialisik/subspesialisik di rumah sakit/ klinik tumbuh kembang, namun belum semua rumah sakit mengembangkan diri menjadi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) yang mensyaratkan adanya klinik tumbuh kembang. Adapun pelayanan rehabilitasi medik telah menjadi salah satu dari 4 pelayanan penunjang dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Selama ini pelayanan di tingkat rumah sakit/ klinik tumbuh kembang belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik terhadap pelayanan kesehatan ABK. Dalam hal ini untuk rujukan kasus tindak kekerasan, belum semua rumah sakit rujukan menangani kasus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, yaitu tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT).

---

<sup>20</sup> *Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan*, hlm.12.



### 3. Kebijakan Pelayanan Pendidikan bagi ABK

ABK membutuhkan pelayanan khusus dengan biaya yang tidak sedikit, dan membutuhkan perhatian khusus untuk pemenuhan hak pendidikannya. Disimulasikan jika anak normal membeli alat tulis cukup mengeluarkan Rp500,- s/d Rp1000,- maka bagi ABK (tuna netra) pengeluaran untuk alat tulis *braille* dapat mencapai Rp15.000,-.<sup>21</sup> Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa akses anak-anak berkelainan terhadap pendidikan dapat dikatakan masih minim, terbukti dari sekitar 300 ribu anak penyandang kelainan berusia SD dan SMP, baru 30% yang mendapat akses terhadap pendidikan.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, khusus di bidang pendidikan ABK juga mengeluhkan materi pelajaran yang sulit untuk dipahami karena bentuknya belum mendukung bagi ABK.

Kondisi tersebut akhirnya mendorong upaya Kemendikbud untuk memperluas akses ABK terhadap pendidikan khusus. Hal ini dilakukan dengan menetapkan adanya kebijakan pendidikan inklusif, yakni memberikan kesempatan kepada ABK untuk menempuh pendidikan bersama-sama anak normal dalam satu sekolah umum. Dalam kebijakan tersebut diharapkan tiap kecamatan di Indonesia memiliki satu sekolah inklusi. Akan tetapi jumlah sekolah tersebut masih minim dan pemerintah harus terus berupaya menambah jumlahnya.<sup>23</sup> Tahun ini pemerintah juga telah membagikan Rp83,4 miliar bagi ABK di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan SMA Luar Biasa.<sup>24</sup> Selain itu, pemerintah juga berencana mendirikan 30 pusat pengembangan layanan ABK di beberapa kota besar.<sup>25</sup>

Idol berpendapat bahwa banyak keuntungan yang diperoleh dengan memasukkan ABK pada sekolah-sekolah umum.<sup>26</sup> *Pertama*, ABK akan memiliki kesempatan untuk mendapat pelajaran di sekolah umum yang tentunya didukung dengan peralatan memadai bagi mereka.<sup>27</sup> *Kedua*, ABK akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang tidak memerlukan kebutuhan khusus. *Ketiga*, ABK dapat belajar mengenal lingkungan sekolah "nyata" secara utuh.<sup>28</sup> *Keempat*, menyiapkan ABK dalam menghadapi kehidupan sosial di masyarakat yang majemuk.<sup>29</sup> Beberapa

<sup>21</sup> *Pelayanan Publik*, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 2 Maret 2012.

<sup>22</sup> Baru 30% Anak Berkelainan Dapat Akses Pendidikan <http://bctrustfund.wordpress.com/2012/05/02/baru-30-anak-berkelainan-dapat-akses-pendidikan/>, diakses tanggal 7 Mei 2012.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Rp84,3 Miliar untuk Anak Berkebutuhan Khusus, *Kompas* (Jumat, 4 Mei 2012)

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Kebijakan Publik dan Anak Berkebutuhan Khusus*, [http://mimpi.multiply.com/journal/item/229/Kebijakan\\_Publik\\_dan\\_Anak\\_dengan\\_Kebutuhan\\_Khusus?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2item](http://mimpi.multiply.com/journal/item/229/Kebijakan_Publik_dan_Anak_dengan_Kebutuhan_Khusus?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2item), diakses tanggal 3 Mei 2012.

<sup>27</sup> *Kebijakan Publik dan Anak Berkebutuhan Khusus*, <http://mimpi.multiply.com>, diakses tanggal 3 Mei 2012.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

keuntungan tersebut diharapkan mampu menjawab pemenuhan hak ABK dalam layanan pendidikan sehingga mereka dapat merasakan haknya secara utuh sebagai peserta didik. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan KHA bahwa memang tidak ada diskriminasi bagi ABK untuk mengenyam pendidikan, meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi pemerintah.

Terkadang kebijakan di tingkat pusat sudah baik, namun di tingkat daerah implementasinya masih sangat kurang. Hal ini terjadi sebagai dampak adanya otonomi daerah yang pada akhirnya memberikan kebebasan pada daerah untuk membuat peraturan daerah (perda) yang kurang ramah terhadap ABK. Selain itu faktor lain yang mendukung masih lemahnya aplikasi kebijakan layanan publik bagi ABK adalah belum tersedianya data yang *reliable*, lengkap, menyeluruh dan terbaru dari hasil sensus penduduk mengenai jumlah ABK. Kemudahan ABK dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan untuk mendukungnya, sebab tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan dan penguatan *life skill* ABK, yang menjadi modal untuk melanjutkan hidupnya di tengah masyarakat.

Kebijakan pelayanan publik untuk ABK berusaha menjembatani hambatan yang dialami anak dan memanfaatkan potensi anak untuk dapat mengakses kesempatan hidup sebesar-besarnya. Hallahan dan Kauffman berpendapat bahwa layanan yang diberikan dengan berorientasi pada prinsip mempertimbangkan kesamaan masing-masing tipe ABK dan juga perbedaan individual dari masing-masing tipe tersebut, menjaga sikap optimis untuk dapat memberi layanan baik pendidikan, medis, psikologis, maupun upaya pencegahan, mengedepankan potensi anak daripada fokus pada hambatan mereka, dan memandang bahwa kebutuhan khusus bukanlah hambatan melainkan kurangnya kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang orang lain pada umumnya mampu lakukan, baik dalam hal tingkat kematangan (emosi, mental, dan atau fisik), kesempatan yang diberikan masyarakat kepada mereka untuk hidup 'normal', dan pengajaran atau pendidikan sesuai hak yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>30</sup>

Kewajiban pemerintah dalam hal ini, sebaiknya tidak berhenti pada kebijakan formatif (pembuatan peraturan perundang-undangan), tetapi juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Namun, perumusannya lebih banyak yang bersifat negatif di antaranya hanya berupa jaminan hak ABK di bidang kesejahteraan sosial, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Semestinya kebijakan pelayanan publik bagi ABK dirumuskan secara positif, yaitu kewajiban untuk memberikan aksesibilitas bagi ABK antara lain: ketentuan tentang perlindungan anak, bangunan gedung, dan ketenagakerjaan. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

<sup>30</sup> Anak Berkebutuhan Khusus, <http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/04/anak-berkebutuhan-khusus>, diakses tanggal 19 April 2012.



## **D. Penutup**

### **1. Simpulan**

Anak perlu bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya, demikian halnya dengan ABK. Keterbatasan fisik dan atau fungsi sosial tentunya menempatkan ABK sebagai sosok yang memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan anak normal.<sup>31</sup> Kebijakan yang telah dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan ABK akan pelayanan publik sebaiknya tidak berhenti pada rumusan kebijakan saja tetapi juga pada aplikasinya secara riil. Pelayanan publik semestinya sudah berperspektif akan kebutuhan dari ABK. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun kesadaran publik tentang kepentingan ABK, membuka luas kesempatan pendidikan, dan pelatihan untuk ABK, serta mengikutsertakan ABK dalam memberikan aspirasinya untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Pencapaian tujuan tersebut tentunya memerlukan pembentukan jejaring informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas serta lingkup yang dapat memuaskan masyarakat, khususnya bagi ABK.

Pada dasarnya pembuatan kebijakan bagi ABK dalam memudahkan aksesibilitas pelayanan publik harus didasarkan pada hak asasi dan model sosial yang ada. Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa sistem harus disesuaikan dengan ABK, bukan ABK yang menyesuaikan diri dengan sistem yang dibuat.

### **2. Rekomendasi**

Tidak hanya sekedar campur tangan pemerintah saja, tetapi masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan publik bagi ABK. Berdasarkan uraian tersebut maka upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik bagi ABK dapat dilakukan dengan:

- a. Mengubah persepsi masyarakat tentang keberadaan dan kebutuhan ABK akan pelayanan publik.
- b. Memfasilitasi ABK dalam pelayanan publik dengan memudahkan aksesibilitasnya.
- c. Implementasi kebijakan bagi ABK sebaiknya memberikan kontribusi konkret bagi aksesibilitas mereka dalam pelayanan dan fasilitas publik.

---

<sup>31</sup> *Profil Anak Indonesia 2011*, hlm.103.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan: Anak Berkebutuhan Khusus*. 2010. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Profil Anak Indonesia 2011*. 2011. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. Jakarta: CV. Miftahur Rizky. ISSN: 2089-3523.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- UUD NRI 1945
- UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Anak Berkebutuhan Khusus, <http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/04/anak-berkebutuhan-khusus>, diakses tanggal 19 April 2012
- Anak Berkebutuhan Khusus, [http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_berkebutuhan\\_khusus](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus), diakses tanggal 26 maret
- Pelayanan Masyarakat di Indonesia, [wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pelayanan-masyarakat-di-indonesia/](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pelayanan-masyarakat-di-indonesia/), diakses tanggal 1 Mei 2012.
- Rangkuman Materi Perkuliahan ABK [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR\\_PEND\\_LUAR\\_BIASA/195707041981031MUHDAR\\_MAHMUD/Rangkuman\\_Perkuliahan/Rangkuman\\_materi\\_perkuliahan\\_ABK.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR_PEND_LUAR_BIASA/195707041981031MUHDAR_MAHMUD/Rangkuman_Perkuliahan/Rangkuman_materi_perkuliahan_ABK.pdf), diakses tanggal 10 April 2012.
- Suharto, Edi. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/LANPelayananPublik.pdf> (diakses tanggal 23 April 2012)



Tarsidi, Didi. 2009. *Penyandang Ketunaan: Istilah Pengganti "Penyandang Cacat"*. [http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah\\_penyandang\\_cacat.php](http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah_penyandang_cacat.php), diakses tanggal 21 April 2012.

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, <http://rizkia-gahari.blogspot.com/2012/03/klasifikasi-anak-berkebutuhan-khusus.html>, diakses tanggal 2 Mei 2012

Pelayanan Publik, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik), diakses tanggal 2 Maret 2012

Baru 30% Anak Berkelainan Dapat Akses Pendidikan <http://bectrustfund.wordpress.com/2012/05/02/baru-30-anak-berkelainan-dapat-akses-pendidikan/>, diakses tanggal 7 Mei 2012.

Rp 84,3 Miliar untuk Anak Berkebutuhan Khusus, *Kompas* (Jumat, 4 Mei 2012)

Kebijakan Publik dan Anak Berkebutuhan Khusus, [http://mimpi.multiply.com/journal/item/229/Kebijakan\\_Publik\\_dan\\_Anak\\_dengan\\_Kebutuhan\\_Khusus?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://mimpi.multiply.com/journal/item/229/Kebijakan_Publik_dan_Anak_dengan_Kebutuhan_Khusus?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses tanggal 3 Mei 2012.

**BAGIAN III**  
**PARTISIPASI ANAK**  
**DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**

*Dinar Wahyuni\**

---

\* Peneliti Muda Bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: hi\_dins@yahoo.com.



## A. Pendahuluan

Anak merupakan cermin masa depan keluarga, bangsa, dan negara yang dalam dirinya melekat hak-hak asasi sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) telah disepakati dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Dengan demikian semua kaidah yang ada dalam HAM juga berlaku untuk KHA dan bersifat universal. Hak-hak anak sesuai ketentuan KHA mencakup hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan hak atas perlindungan yang wajib dijamin, dihormati, dan dipenuhi tanpa adanya diskriminasi.

Hampir semua negara anggota PBB turut menandatangani kesepakatan dalam KHA, termasuk Indonesia. Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia meratifikasi ketentuan KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-hak Anak yang berisi prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, KHA berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia terikat pada ketentuan yang tercantum dalam KHA.

Selanjutnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya tercantum beberapa ketentuan mengenai hak anak. Kemudian pada 2002 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA mengatur secara lebih jelas konsep perlindungan anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menghargai partisipasi anak. Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan yang layak bagi anak.

Komitmen Pemerintah dalam rangka menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah mengadopsi butir-butir kesepakatan internasional, yaitu Tujuan Pembangunan Milennium (*Millennium Development Goals*/MDGs) dan Dunia yang Layak Bagi Anak (*The World Fit for Children*/WFFC) ke dalam rencana pembangunan nasional. Target kondisi ideal yang ingin dicapai dalam MDGs dan WFFC adalah menurunkan sepertiga angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBa) sebelum 2010 (atau dua pertiga dari jumlah AKB dan AKBa tahun 1990) di tahun 2015. Target lain MDGs adalah sebelum 2015, semua anak di mana saja, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Sementara WFFC ingin menurunkan jumlah angka putus sekolah Sekolah Dasar sebesar 50 persen sebelum 2010 dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.<sup>1</sup> Butir-butir kesepakatan MDGs dan WFFC kemudian diterjemahkan ke dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia

<sup>1</sup> Konsep PUHA, [www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman&task=](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman&task=), diakses 2 Februari 2012.

(PNBAI) 2015. Empat bidang yang menjadi perhatian PNBAI adalah promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan serta penganggulan HIV/AIDS.<sup>2</sup>

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah kemudian membangun sebuah komitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan menempatkan anak sebagai *mainstream* atau lebih dikenal dengan kota layak anak (KLA). Kebijakan KLA pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005.<sup>3</sup> Lima kota yang dijadikan uji coba pengembangan KLA adalah Surakarta, Jambi, Gorontalo, Sidoarjo, dan Kutai Kartanegara. Kemudian pada tahun 2007, 10 kabupaten/kota yang mendapat kesempatan mengembangkan KLA adalah Pontianak, Padang, Kupang, Aceh Besar, Malang, Manado, Lampung Selatan, Karawang, Ogan Komering Ilir, dan Sragen.<sup>4</sup>

Kebijakan KLA secara formal ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Pada Tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tiga kota terbaik di Indonesia yang layak anak, yaitu: Surakarta, Pontianak, dan Badung. Surakarta mendapat penghargaan kategori madya, Pontianak kategori pratama dan Badung kategori nindya.<sup>5</sup>

Salah satu indikator penting dalam mengembangkan KLA adalah adanya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan diri, keluarga, dan lingkungannya. Anak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan kematangannya. Namun dalam kenyataannya, pendapat anak sering kurang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal itu dapat dilihat dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya orang tua sering memaksa anaknya menjadi artis. Dengan jadwal kegiatan yang padat, anak akan kehilangan dunia anak-anaknya. Begitu juga dalam memilih sekolah untuk anak. Orang tua sering memaksa anak masuk ke sekolah unggulan tanpa melihat kemampuan anak. Dampaknya anak kesulitan dalam mengikuti pelajaran sekolah, anak sering bolos sekolah bahkan tidak jarang anak menyalurkan kekesalannya ke narkoba. Kasus lain adalah di lingkungan masyarakat, aturan jam belajar dibuat tanpa bertanya terlebih dahulu pada anak. Anak hanya dijadikan objek pelaku.

Dalam KLA, anak belum dipandang sebagai anggota masyarakat. Pandangan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Desa Hargobinangun Sleman Ingin Menjadi Desa Ramah Anak, <http://regional.kompasiana.com/2011/11/24/desa-hargobinangun-sleman-ingin-menjadi-desa-layak-anak/>, diakses 7 Juni 2012.

<sup>4</sup> Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak, [http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67:pertahankan-prestasi-kota-layak-anak-&catid=51:pontianak&Itemid=65](http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:pertahankan-prestasi-kota-layak-anak-&catid=51:pontianak&Itemid=65), diakses 6 Juni 2012.

<sup>5</sup> 3 Kota Di Indonesia yang Layak Untuk Anak, <http://health.detik.com/read/2011/07/23/111440/1687709/763/3-kota-di-indonesia-yang-layak-untuk-anak>, diakses 6 Juni 2012.



tersebut menyebabkan anak kurang dilibatkan dalam perumusan instrumen KLA. Pengembangan KLA hanya dilakukan dengan cara pandang orang dewasa sehingga menempatkan anak pada posisi marjinal. Anak hanya dijadikan penerima manfaat program KLA. Semua aturan dibuat oleh orang dewasa sehingga tidak jarang program untuk anak tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan permasalahan bagaimana meningkatkan partisipasi anak dalam pengembangan KLA? Sesuai dengan ketentuan KHA, salah satu hak anak adalah hak untuk berpartisipasi dan ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan internasional.

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini berbentuk deskriptif yang akan memberi gambaran tentang partisipasi anak dalam upaya pengembangan KLA. Sumber data dalam tulisan merupakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, internet maupun rujukan lain yang relevan dengan tema tulisan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menelaah data dari pustaka. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Hak Anak**

Setiap anak mempunyai hak-hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. KHA mengelompokkan hak anak menjadi empat, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Hak atas kelangsungan hidup  
Berupa hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi. Negara wajib menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 KHA) dan menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24 KHA).
- b. Hak untuk tumbuh kembang  
Mencakup hak atas pendidikan, informasi, kebebasan beragama, didengar pendapatnya, berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, mengembangkan kepribadian, mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
- c. Hak perlindungan  
Perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, keterlantaran dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan hukum.

---

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2006 : 21-22.

d. Hak partisipasi

Berupa kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan anak dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya. Anak juga berhak untuk berserikat, berkumpul, dan bermain di ruang terbuka yang aman dan nyaman, mendapat informasi yang layak, dan mengekspresikannya.

Di samping KHA, dalam UUPA terdapat pasal-pasal yang mengatur hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak. Konsep perlindungan anak yang utuh dilakukan dengan mengacu pada asas-asas berikut: pertama, **nondiskriminasi**, di mana perlindungan anak diberikan tanpa membedakan anak berdasarkan suku, ras, agama, status sosial maupun jenis kelamin. Asas kedua, **kepentingan terbaik bagi anak** yang menekankan bahwa semua tindakan yang berhubungan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, asas **hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan**. Anak mempunyai hak untuk hidup layak, terpenuhi segala kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang dan dapat mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial. Keempat, asas **penghargaan terhadap pendapat anak**. Hal ini penting dilakukan mengingat anak lebih mengetahui kebutuhannya. Namun demikian, kapasitas anak dalam memberikan pendapat disesuaikan dengan tingkat perkembangannya.

## 2. Partisipasi Anak

Davis mendefinisikan partisipasi sebagai *"participations can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and to share responsibility for them."* Dari definisi tersebut, partisipasi mencakup tiga hal, yakni: keterlibatan seseorang secara mental dan emosional dalam kelompok, kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok dan tanggung jawab dalam kelompok. Berbeda dengan pendapat Davis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerjemahkan partisipasi anak sebagai keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dalam hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan tingkat kematangan berpikir.<sup>8</sup>

Dari dua definisi tersebut, partisipasi anak dapat dirumuskan sebagai keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan

<sup>7</sup> Davis dalam Talidizuhu Ndruha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Bina Aksara, 1987: 128.

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, 2008: 15.



yang berhubungan dengan hidup mereka, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan bertujuan untuk memberi ruang pada anak dalam masyarakat. Yang perlu diingat bahwa pelibatan anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangannya sehingga akan membantu kita untuk lebih memahami permasalahan anak dengan perspektif yang berbeda.

Partisipasi anak harus dilandasi empat prinsip yakni<sup>9</sup> *pertama*, etika. Etika berhubungan dengan sikap orang dewasa ketika bekerja dengan anak dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini anak harus diperlakukan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan. *Kedua*, lingkungan yang ramah anak. Lingkungan di mana anak merasa nyaman dan aman dalam bermain, berekspresi dan berbagi pengalamannya sesuai cara pandangnya. Lingkungan seperti itu diperlukan dalam meningkatkan partisipasi anak karena kualitas partisipasi dan kemampuan anak untuk mengambil manfaat dari partisipasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ramah anak. *Ketiga*, kesetaraan kesempatan. Implementasi hak anak dalam berpartisipasi harus mampu memberi kesempatan kepada anak yang mengalami diskriminasi dan anak yang dimarginalkan untuk terlibat dalam proses partisipasi. Selama ini masih terdapat diskriminasi partisipasi anak, baik menurut jenis kelamin, status sosial, maupun umur anak sehingga pelaksanaan partisipasi belum merata. *Keempat*, promosi dan perlindungan anak. Partisipasi anak dalam pengambilan kebijakan seringkali disertai resiko negatif. Di sinilah peran orang dewasa untuk melindungi anak dari konsekuensi negatif tersebut. Anak harus merasa aman dalam pelaksanaan hak partisipasinya.

### 3. Konsep KLA

Konsep KLA akhir-akhir ini marak dibicarakan dalam forum-forum lokal sampai internasional. Gagasan KLA pertama kali muncul dalam penelitian Kevin Lynch tentang *"Children's Perception of the Environment"*. Penelitian tersebut dilakukan di empat kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, aturan yang jelas dan tegas, fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.<sup>10</sup>

Gagasan tentang KLA diikuti dengan penyelenggaraan Konvensi UN-Habitat II di Istanbul tahun 1996 yang memutuskan program aksi untuk membuat pemukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan dan menegaskan anak dan remaja terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun komunitas. Disusul kemudian diperkenalkannya *Child Friendly City Initiative* oleh UNICEF

<sup>9</sup> 4 Prinsip Dasar Partisipasi Anak, <http://alpa-aceh.blogspot.com/2008/11/4-prinsip-dasar-partisipasi-anak.html>, diakses 5 Juni 2012.

<sup>10</sup> Kota di Indonesia Belum Layak Anak, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/02/09/103530-kota-di-indonesia-belum-layak-anak>, diakses 8 Juni 2012.

bersama UN-Habitat. Puncaknya adalah *United Nations General Assembly Special Session on Children* tahun 2002 yang mendeklarasikan pentingnya menciptakan Dunia yang Layak bagi Anak.<sup>11</sup> Saat itu, walikota di dunia menegaskan komitmennya untuk menyuarkan hak-hak anak dan mempromosikan peran anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota.

KLA menurut UNICEF adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dan keputusannya bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil di kotanya.<sup>12</sup> Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Keputusannya mempengaruhi kotanya;
- b. Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan;
- c. Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial;
- d. Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
- e. Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik;
- f. Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah;
- g. Aman berjalan di jalan;
- h. Bertemu dan bermain dengan temannya;
- i. Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan;
- j. Hidup di lingkungan yang bebas polusi;
- k. Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial;
- l. Setiap warga negara secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.<sup>13</sup>

Dari dua belas hak anak tersebut, terdapat lima indikator untuk menentukan sebuah kota layak disebut KLA, yaitu pertama adanya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan diri, keluarga dan lingkungan; kedua, kemudahan dalam mengakses pelayanan dasar mencakup pelayanan kesehatan, lingkungan, pendidikan dan pelayanan lain sebagai sarana tumbuh kembangnya; ketiga, adanya ruang terbuka yang aman untuk tempat anak berkumpul dan bermain; keempat, peraturan yang secara tegas melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak; dan kelima nondiskriminasi.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Desa Hargobinangun Sleman Ingin Menjadi Desa Ramah Anak, <http://regional.kompasiana.com/2011/11/24/desa-hargobinangun-sleman-ingin-menjadi-desa-layak-anak/>, diakses 7 Juni 2012.

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009: 161.

<sup>13</sup> Choiri Askolani dan Zainul Yusuf, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, Ponorogo: Litbang Pusat Studi dan Advokasi Rakyat dan STAIN Ponorogo Press, 2008 : 6.

<sup>14</sup> *Ibid*: 55.



## D. Pembahasan

### 1. Partisipasi Anak sebagai Hak

Anak mempunyai hak-hak asasi yang melekat dalam dirinya. Dalam perspektif hak asasi, negara wajib menjamin hak asasi anak dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip:<sup>15</sup>

- a. Kewajiban menghormati. Negara wajib menghormati hak anak. Di bidang kesehatan misalnya, negara wajib menjamin hak anak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar yang layak dan menindak pelanggaran terhadap hal itu. Dalam kasus anak yang terbukti melanggar hukum, negara dapat memproses anak sesuai prosedur tanpa menghilangkan hak anak atas pelayanan kesehatan dasar.
- b. Kewajiban melindungi. Negara wajib melindungi anak dari tindakan-tindakan pelanggaran.
- c. Kewajiban memenuhi, di mana negara berkewajiban melakukan upaya untuk memenuhi hak anak. Misalnya, anak berhak atas pendidikan yang layak. Dalam hal ini negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga hak anak atas pendidikan terpenuhi.
- d. Kewajiban memajukan. Negara wajib melakukan langkah-langkah yang akan mempermudah anak menikmati hak-haknya. Misalnya, agar anak dapat menikmati hak untuk bermain dan berekreasi, negara membangun ruang terbuka yang aman dan nyaman sebagai tempat anak bermain dan berekreasi dengan teman-temannya.

Partisipasi merupakan salah satu hak asasi anak. Anak mempunyai hak yang sama dalam partisipasi, seperti halnya orang dewasa, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Hak-hak anak untuk berpartisipasi dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak yang mempunyai kemampuan khusus (*disable children*), pendidikan, serta hak untuk bermain dan partisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.<sup>16</sup> Namun perlu diingat bahwa pemenuhan hak anak atas partisipasi harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Pelibatan anak dalam masyarakat diselaraskan dengan tingkat kematangan anak, baik secara fisik maupun mental. Rentang usia anak yang lebar membuat pola penyertaan anak dalam berpartisipasi menjadi beragam pula. Anak yang belum matang secara fisik ataupun mental membutuhkan peran orang dewasa untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Skema partisipasi anak dapat dilihat dalam tabel berikut.

<sup>15</sup> Konsep dan Pengertian PUHA, [http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&Itemid=68&gid=26](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=68&gid=26), diakses 27 April 2012.

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, 2008: 21.

Tabel 1  
Skema Partisipasi dan Penyertaan Anak

Usia	Jenis/Tingkat Partisipasi
Anak (0 - 5 tahun)	Pada usia ini, anak mengeksplorasi dunia yang ada di sekelilingnya dan mengekspresikan melalui bahasa tubuh dan fisik. Dengan dorongan dari orang dewasa, dasar dari partisipasi dapat dilihat di usia yang dini.
Anak (6 - 12 tahun)	Anak di usia ini belajar tentang kehidupan melalui eksplorasi, pertanyaan dan akses atas informasi. Anak mampu untuk memainkan peran aktif dalam melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang mempengaruhi kehidupan anak; serta dapat memainkan peran kunci sebagai warga negara yang aktif dalam menyelesaikan segala bentuk dari diskriminasi dan perlakuan salah.
Remaja (13 - 18 tahun)	Di usia ini, remaja dapat menjadi aktor sosial dan warga negara yang aktif dalam peningkatan kualitas komunitas lokal dan nasional, menanggulangi segala bentuk diskriminasi, perlakuan yang salah dan eksploitasi serta berperan untuk mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung kemitraan dengan orang dewasa.

sumber: Claire O'Kane, 2004, dalam *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008: 22.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa anak mempunyai tingkat kematangan yang beragam dan di setiap tingkatan partisipasi anak juga beragam, mulai dari mengeksplorasi dunia di sekelilingnya, belajar memainkan peran aktif dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menyelesaikan masalah yang terkait hidupnya hingga menjadi aktor sosial dalam peningkatan kualitas lingkungannya. Dengan keberagamankondisikematangananak, maka diperlukan peran orang dewasa dalam memfasilitasi partisipasi anak sehingga anak mampu mengenali dan menyuarakan permasalahannya, serta membangun organisasi yang di dalamnya anak mampu berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Orang dewasa harus mampu menjadi media bagi anak untuk membagi pandangan dan gagasannya tentang dunia dan permasalahannya. Dari sini anak dipersiapkan menjadi aktor demokrasi di masa mendatang. Namun keterlibatan orang dewasa dalam memfasilitasi partisipasi anak harus berjalan sinergis. Masing-masing harus mampu memainkan perannya sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan eksploitasi atas hak anak. Selain keterlibatan orang dewasa, diperlukan media penyadaran seperti bermain peran, lagu, tarian,



wayang, dan media lain untuk menumbuhkan tingkat partisipasi anak sejak dini. Tujuannya untuk mempercepat munculnya ruang bagi anak mengekspresikan pandangan mereka dalam sebuah lingkungan yang mempunyai keterbukaan dan saling percaya.<sup>17</sup>

Model kebijakan KLA yang mengutamakan perlindungan anak dalam proses pembangunan akan menciptakan lingkungan terbaik bagi anak. UNICEF memperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 60 persen penghuni kota di Indonesia adalah anak-anak.<sup>18</sup> Angka tersebut akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pertahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.<sup>19</sup> Namun, sebagian besar lingkungan kota di Indonesia belum ramah bagi tumbuh kembang anak. Polusi, kekerasan, diskriminasi, buruknya pelayanan fasilitas umum, dan pelayanan kesehatan dasar yang sulit diakses masih menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak di kota. Penataan kota masih belum memprioritaskan pada lingkungan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, partisipasi anak dalam proses pembangunan kota sangat penting. Partisipasi anak bisa diwujudkan melalui keterlibatan anak dalam proses pengambilan kebijakan kota. Tujuannya untuk memberi ruang pada anak dalam masyarakat sehingga anak belajar mengidentifikasi persoalan mengenai lingkungannya dan menemukan metode-metode penyelesaian sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Di Indonesia, pelibatan anak dalam proses penyusunan kebijakan suatu daerah dapat dilakukan secara langsung apabila anak telah berusia minimal 17 tahun. Sedangkan untuk anak yang masih berusia di bawah 17 tahun, hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan dilakukan melalui institusi yang memperjuangkan hak anak. Dalam kenyataannya, masih sering ditemukan pandangan pemerintah bahwa kebutuhan anak dalam pembangunan sudah terwakili kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Hamid Patilima tentang Persepsi Anak mengenai Lingkungan Kota yang menunjukkan bahwa dengan membangun sarana kebutuhan masyarakat, pemerintah menganggap kebutuhan anak telah terwakili dan terpenuhi dengan sendirinya.<sup>20</sup> Pandangan tersebut tidak selamanya benar, karena anak mempunyai kebutuhan tertentu yang berbeda dengan masyarakat umumnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*: 24.

<sup>18</sup> Herlina Astri, Implementasi Konvensi Hak Anak Melalui Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo, dalam *Pencapaian Millenium Development Goals Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011: 132.

<sup>19</sup> Penduduk Indonesia Tambah 3,5 Juta Jiwa Per tahun, <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/13/2024416/Penduduk.Indonesia.Tambah.3.5.Juta.Jiwa.Per.Tahun>, diakses 11 Juni 2012.

<sup>20</sup> Hamid Patilima, 2007, *Apakah Kota Ramah Anak?* dalam Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009: 159.

## **2. Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)**

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini berarti sebagai bagian dari warga negara, anak mempunyai hak-hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. Namun, dalam kenyataannya, sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran hak anak mulai dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi hingga kejahatan terhadap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat jumlah pelanggaran hak anak tahun 2010 mencapai 2.534.774 kasus.<sup>21</sup> Sementara di bidang kesehatan, kasus gizi buruk juga masih ditemukan setiap tahun. Lembaga Perlindungan Anak yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia memperkirakan 10 juta anak usia balita menderita kekurangan gizi dan 2 juta di antaranya menderita gizi buruk.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan masyarakat dan negara belum memahami hak anak secara menyeluruh. Peraturan hukum yang ada masih belum secara efektif melindungi anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak.

Pengarusutamaan hak anak (PUHA) merupakan strategi yang dipandang mampu mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam program, kebijakan, peraturan perundang-undangan serta anggaran pembangunan. Dalam PUHA, pemenuhan hak anak akan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian PUHA merupakan salah satu strategi untuk mempercepat perwujudan KLA. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak.<sup>23</sup>

Strategi yang digunakan untuk melihat penerapan PUHA dalam kebijakan maupun program pembangunan adalah:<sup>24</sup>

- a. Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan.
- b. Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya.
- c. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
- d. Mengaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan KHA.

<sup>21</sup> Database Pelanggaran Hak Anak di Indonesia Tahun 2010, [http://www.komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/Tentang\\_Kami.html](http://www.komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/Tentang_Kami.html), diakses 1 Februari 2011.

<sup>22</sup> Catatan Akhir Tahun 2011: Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua Dalam Menjaga dan Melindungi Anak, <http://komnaspaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perindungan-anak/>, diakses 4 Februari 2012.

<sup>23</sup> Konsep dan Pengertian PUHA, [http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&Itemid=68&gid=26](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=68&gid=26), diakses 27 April 2012.

<sup>24</sup> *Ibid.*



Dalam PUHA, anak sebagai pemegang hak didorong untuk berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Partisipasi anak diarahkan pada upaya untuk memasukkan pandangan anak ke dalam penyusunan kebijakan, khususnya terkait dengan kepentingan dan kebutuhan anak. Anak diberi kesempatan untuk memberikan masukan sesuai dengan usia dan kematangannya. Informasi yang layak bagi anak harus mudah diakses anak sehingga anak mengetahui perkembangan proses penyusunan kebijakan. Mengingat anak mempunyai tingkat kematangan yang beragam, maka keterlibatan dan inisiatif orang dewasa sangat penting sebagai pendamping dan fasilitator anak. Orang dewasa berperan melatih anak untuk mengenali permasalahan yang ada di sekitarnya, menyampaikan pandangan dan gagasannya serta bersama-sama mencari penyelesaian atas permasalahan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Keberanian dan keterampilan anak dalam menyampaikan aspirasi harus dilatih sejak dini, sehingga ke depan anak lebih terampil untuk menyalurkan aspirasi terutama berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Media yang dapat dikembangkan untuk memfasilitasi partisipasi anak misalnya forum anak. Forum anak diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, proses penyusunan kebijakan, dan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak. Melalui forum ini, anak dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan tanpa ada intervensi dari orang dewasa. Orang dewasa hanya berperan sebagai pendamping dan fasilitator anak. Oleh karena itu, seorang pendamping harus memahami karakter psikologis anak. Permasalahan yang sering muncul adalah tidak semua pendamping anak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup mengenai hak partisipasi anak, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas pendamping secara rutin dan berkelanjutan. Pelatihan tentang hak anak dan cara-cara pendampingan yang benar harus diberikan sehingga mereka bisa mengoptimalkan peran lembaga anak dalam proses pengambilan kebijakan khususnya terkait anak.

Pelaksanaan PUHA harus didukung oleh seluruh *stake holder* terkait. Masing-masing pihak harus memiliki pemahaman dan kesadaran terlebih dahulu tentang hak-hak anak. Salah satunya melalui sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga ke lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi mencakup pengetahuan, pemahaman mendalam mengenai hak anak, serta permasalahan anak dan pendampingan anak dalam partisipasi. Media sosialisasi bisa melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Kegiatan posyandu misalnya, dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi hak anak sehingga ibu rumah tangga lebih memahami pentingnya pemenuhan hak anak dan resiko apabila hak anak tidak terpenuhi. Media massa juga dapat memberikan dukungan melalui penyampaian informasi seputar hak dan permasalahan anak dalam rubrik anak. Dengan upaya ini, diharapkan setiap anggota masyarakat mempunyai pemahaman dan kesadaran

tentang hak anak khususnya partisipasi sehingga pada saat pengambilan keputusan, kepentingan terbaik anak selalu dijadikan pertimbangan.

### **3. Tahap Partisipasi Anak Dalam Pengembangan KLA**

Partisipasi anak merupakan upaya untuk mempersiapkan anak sebagai aktor demokrasi di masa mendatang. Menurut Robert A. Hart masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat dalam menyemai nilai-nilai demokrasi.<sup>25</sup> Karena masih dalam tahap tumbuh kembang, partisipasi anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak dan pihak lain yang dapat memfasilitasi anak dalam memperjuangkan haknya. Keduanya harus berjalan sinergis sehingga tersedia ruang yang nyaman dan aman bagi anak untuk berpendapat dan berekspresi terutama terkait kebijakan suatu wilayah yang ramah anak, seperti digambarkan oleh Robert A. Hart sebagai berikut.<sup>26</sup>

#### **Skema 1**

#### **Tangga Partisipasi**

##### **TANGGA PARTISIPASI:**

1. MANIPULASI, anak-anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa.
2. DEKORASI, anak-anak hanya diajak mengikuti suatu kegiatan tertentu oleh orang dewasa tetapi hanya menjadi pajangan saja.
3. TOKENISME, anak-anak diajak untuk mengikuti suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dewasa. Anak-anak hanya dipakai oleh orang dewasa sebagai simbol saja bahwa kegiatan tersebut telah melibatkan anak-anak.

..... *batas partisipasi yang sebenarnya* .....

4. DITETAPKAN, TETAPI DIBERI INFORMASI, Orang dewasa memutuskan kegiatan dan terlibat secara sukarela. Anak-anak mengetahui kegiatan tersebut dan mereka mengetahui siapa yang memutuskan untuk melibatkan mereka dan mengapa dilibatkan. Orang dewasa menghargai pandangan dari anak-anak.
5. DIBERI INFORMASI DAN NASEHAT, kegiatan didesain dan dilaksanakan oleh orang dewasa tetapi anak dimintakan masukannya. Anak-anak ini memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai proses dan pandangan mereka diperhatikan secara serius.

<sup>25</sup> Memaknai Partisipasi Anak, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2012/01/Memaknai-Partisipasi-Anak.pdf>, diakses 13 Mei 2012.

<sup>26</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, 2008: 20.



6. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ORANG DEWASA, DILAKUKAN BERSAMA ANAK, Orang dewasa memiliki gagasan awal, tetapi anak-anak dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Anak-anak tidak hanya dipertimbangkan pandangan/masukannya tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7. ANAK MEMILIKI INISIATIF DAN DIARAHKAN (OLEH ORANG DEWASA), Anak-anak memiliki gagasan/inisiatif, merencanakan kegiatan tetapi masih mengajak diskusi serta meminta nasehat dan dukungan dari orang dewasa.
8. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ANAK, DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA, Anak-anak memiliki gagasan/ide tentang kegiatan dan memutuskan sendiri bagaimana caranya kegiatan tersebut dilaksanakan. Orang dewasa siap mendampingi tetapi tidak ikut mengurus (pasif).

sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, 2008: 20.

Skema 2 memperlihatkan bahwa di tangga 1 sampai 3 anak-anak belum diberi ruang untuk berpartisipasi. Ditunjukkan beberapa sikap orang dewasa terhadap anak, yakni manipulasi, dekorasi, dan tokenisme. Apabila sikap-sikap tersebut dilanjutkan, maka akan menghilangkan hak anak dalam berpartisipasi dalam masyarakat. Memasuki tangga 4 sampai 8, mulai terdapat keterlibatan anak dalam suatu pengambilan keputusan. Orang dewasa mulai mendengarkan pandangan anak, meskipun keputusan masih di tangan orang dewasa, seperti diperlihatkan tangga 6 dan 7. Di tangga 8, anak berpartisipasi aktif, di mana keputusan atas inisiatif anak dan dilakukan bersama orang dewasa. Orang dewasa dalam tahap ini hanya berperan mendampingi anak dalam berpartisipasi. Dengan demikian partisipasi anak yang efektif akan terwujud apabila memenuhi tiga syarat, yaitu anak mempunyai pemahaman yang jelas akan hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak; orang dewasa memahami karakter psikologi anak dan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak anak; serta tersedianya media partisipasi yang mengakomodasi kedua pihak.<sup>27</sup>

Partisipasi anak dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat anak tumbuh dan berkembang sehingga memegang peran penting dalam menumbuhkan partisipasi anak. Keluarga, dalam hal ini orang tua harus terlebih dahulu memiliki pemahaman dan kesadaran tentang hak anak dan resiko apabila hak anak tidak terpenuhi. Selanjutnya orang tua menciptakan suasana keluarga yang aman, nyaman, dan demokratis yang memungkinkan anak berpartisipasi di dalamnya. Kebutuhan dasar yang layak anak, ruang terbuka bagi anak bermain, belajar, dan berpartisipasi sesuai tingkat kematangannya serta adanya perlindungan dan rasa aman bagi anak harus ada dalam keluarga.

<sup>27</sup> Choiri Askolani dan Zainul Yusuf, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, Ponorogo: Litbang Pusat Studi dan Advokasi Rakyat dan STAIN Ponorogo Press, 2008: 46-47.

Anak diberi kesempatan untuk mengenali, mengembangkan, dan membagi pandangan dan gagasan tentang kepentingan dan kebutuhannya kepada orang tua, kemudian orang tua yang akan menyalurkan gagasan tersebut ke dalam forum yang lebih luas. Sejak dini anak didorong untuk aktif berorganisasi di sekolah dan masyarakat agar anak belajar berpartisipasi. Anak sebagai individu yang rentan eksploitasi perlu diberdayakan agar memahami hak-hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh dirinya sendiri maupun dengan bantuan orang dewasa. Upaya pemberdayaan anak akan lebih efektif apabila dilakukan dalam kelompok anak yang terorganisasi. Anak-anak biasanya lebih nyaman berpendapat dan berkreasi di dalam kelompok seusianya. Kelompok inilah yang nantinya akan memfasilitasi aspirasi anak dalam proses penyusunan kebijakan sehingga didengarkan dan dijadikan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

Lingkungan kedua adalah masyarakat sekitar. Dalam masyarakat perlu ditumbuhkan terlebih dulu pemahaman tentang hak anak dan peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Upaya ini dapat dicapai melalui kearifan lokal yang ada di masyarakat, misalnya membuat iklan partisipasi anak dalam bahasa daerah atau membagi *leaflet* tentang partisipasi anak dalam acara "rembug desa." Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi anak sehingga akan memperjuangkan hak anak dalam proses penyusunan kebijakan terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan anak.

Program KLA perlu mendapat dukungan dari anak agar tujuan awal dari pengembangan KLA tercapai. Anak berhak menyampaikan pandangannya tentang KLA dan masyarakat berperan sebagai media partisipasi anak. Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan objektif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam menjalankan peran monitoring, masyarakat dapat membentuk suatu lembaga yang akan mengakomodasi partisipasi anak. Pendekatan hak yang menyentuh perubahan sistem dan perilaku anak harus diterapkan dalam setiap programnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak, organisasi tersebut akan menjadi wadah pengaduan bagi anak untuk memperjuangkan haknya.

Saat ini sudah banyak organisasi yang ada di masyarakat yang dibentuk dalam rangka memperjuangkan hak anak. Organisasi-organisasi nonpemerintah seperti LSM, organisasi masyarakat, kelompok profesi, kelompok adat bersama-sama mendukung implementasi PUHA dengan cara memantau, menstimulasi, dan memfasilitasi pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi anak. Salah satu wujudnya berupa kampanye hak anak. Penyelenggaraan kampanye disesuaikan dengan karakter masyarakat sehingga akan menyentuh masyarakat. Selama ini KHA masih dipandang sebagai produk barat sehingga masyarakat sulit menerima. Oleh karena itu, organisasi yang peduli hak-hak anak harus berupaya keras membumikan hak anak agar lebih dikenal dan diterima masyarakat.



Lingkungan selanjutnya adalah lingkungan kota. Partisipasi anak di kota jauh lebih luas karena anak mulai dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Menurut Bartlett<sup>28</sup> anak-anak memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungannya. Kota yang diinginkan anak adalah kota yang menghormati hak anak, di mana tersedia akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari anak untuk menciptakan KLA. Indikator yang harus dipenuhi dalam aspek partisipasi anak meliputi:<sup>29</sup>

- a. Adanya organisasi anak di tingkat kota yang melembaga.
- b. Orang dewasa atau masyarakat dan kota mau berbagi dan mendengarkan suara anak.
- c. Setiap program pengembangan melibatkan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Anak terlibat dalam kegiatan seni dan budaya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Masyarakat harus berinisiatif untuk membentuk organisasi anak di tingkat kota. Tujuannya sebagai wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasi berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Organisasi ini beranggotakan anak yang tinggal di kota tersebut dan dikelola oleh pendamping anak. Seorang pendamping harus benar-benar memahami arti penting pemenuhan hak dan permasalahan yang dihadapi anak. Selain itu pendamping harus memahami sepenuhnya karakter psikologis anak sehingga dapat memotivasi anak untuk berani menyatakan pendapatnya. Melalui organisasi tersebut, anak dilatih cara mengenali permasalahannya, memahami hak-haknya, dan mengomunikasikannya dalam proses penyusunan kebijakan. Biasanya organisasi anak dibentuk mulai dari daerah hingga nasional. Secara berkala diadakan pertemuan antarorganisasi anak dari berbagai provinsi. Pertemuan ini merupakan salah satu program dalam kebijakan partisipasi anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan UNICEF telah beberapa kali menyelenggarakan Forum Anak Nasional (FAN). Tahun 2011 kota Solo terpilih sebagai tempat pelaksanaan FAN. Tema yang diangkat adalah kebhinnekaan.<sup>30</sup> FAN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak di bidang partisipasi anak, memberikan pengalaman kepada anak untuk mengikuti pertemuan internasional, memfasilitasi perwakilan anak dari 33 provinsi bertemu, berdiskusi, berbagi pengalaman dan permasalahan anak di daerahnya. Selain itu,

<sup>28</sup> Sheridan Bartlett, 2002, dalam Hamid Patilima, Kota Layak Anak, [http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com\\_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121), diakses 24 April 2012.

<sup>29</sup> Choiri Askolani dan Zainul Yusuf, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, Ponorogo: Litbang Pusat Studi dan Advokasi Rakyat dan STAIN Ponorogo Press, 2008: 57.

<sup>30</sup> Forum Anak Nasional di Solo Inspirasi Pembentukan Wadah Partisipasi Anak Daerah, [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1780:forum-anak-nasional-di-solo-inspirasi-pembentukan-wadah-partisipasi-anak-daerah&catid=190:info&Itemid=246](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:forum-anak-nasional-di-solo-inspirasi-pembentukan-wadah-partisipasi-anak-daerah&catid=190:info&Itemid=246), diakses 13 Juni 2012.

FAN menjadi momentum pemberian penghargaan bagi anak-anak daerah yang telah berprestasi dan aktif berpartisipasi di daerahnya. Oleh karena itu, FAN perlu diadakan secara rutin dan berkelanjutan dengan tema isu-isu anak yang sedang berkembang sehingga akan memotivasi anak dari berbagai daerah di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah kota (Pemkot) sebagai representasi dari negara, memegang tanggung jawab dalam menjamin hak anak tanpa diskriminasi. Perwujudannya bisa melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti sekolah, rumah sakit, taman bermain, ruang tahanan khusus anak, dan tempat ibadah. Penyediaan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi anak untuk bermain, berekspresi, dan berinteraksi tanpa adanya diskriminasi berguna dalam tumbuh kembang anak. Selama ini pembangunan kota masih mengutamakan kepentingan ekonomi sehingga belum memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak. Anak membutuhkan ruang terbuka yang aman dan nyaman sebagai tempat berinteraksi, bermain, belajar, dan berekspresi dengan anak-anak sebaya. Oleh karena itu, pembangunan ruang tersebut harus mempertimbangkan pandangan anak karena anak yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya. Selain itu, Pemkot juga harus mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan anak, sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UUPA.

Mewujudkan KLA memang memerlukan proses panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi. Pemkot bertanggung jawab dalam membuat kebijakan yang layak anak dan memobilisasi potensi sumber daya. Masyarakat berperan memberikan informasi yang objektif tentang suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan anak. Sementara anak merupakan agen perubahan dalam pembangunan kota.<sup>31</sup> LSM juga memegang peran untuk mengakomodasi partisipasi anak dan menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan KLA. Dengan demikian keterlibatan semua pihak tanpa adanya diskriminasi sangat penting dalam upaya pengembangan KLA. Kepentingan terbaik anak dan perlindungan terhadap hak anak harus menjadi prioritas dalam mewujudkan KLA.

## **E. Penutup**

Selama ini masih banyak orang tua yang memandang anak bukan sebagai manusia yang utuh, sehingga anak-anak menjadi kelompok yang termarginalkan. Hak partisipasi anak kurang dipertimbangkan, baik dalam keluarga, masyarakat sampai pada proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, padahal

<sup>31</sup> Sheridan Bartlett, 2002, dalam Hamid Patilima, Kota Layak Anak, [http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com\\_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121), diakses 24 April 2012.



anak yang paling mengetahui kebutuhan dan kepentingannya. Pemerintah telah menyusun instrumen hukum untuk memastikan perlindungan hak anak terlaksana. Namun, sampai saat ini aturan tersebut belum efektif. Setiap bulan masih ditemukan kasus pelanggaran hak anak. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat pemenuhan hak anak. Salah satunya melalui kebijakan KLA, yang akan tercapai apabila anak aktif berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan anak.

Pengembangan KLA bisa dimulai dengan pengarusutamaan hak-hak anak ke dalam program, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan anggaran kota. Perlindungan anak dijadikan *mainstreaming* dalam pembangunan wilayah kota. Di sini, partisipasi anak dapat difasilitasi melalui penyediaan ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk bermain, berekspresi, dan berinteraksi. Selain itu, penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak juga diperlukan. Wujudnya berupa pembentukan forum anak. Melalui forum ini, perwakilan anak dari 33 provinsi bertemu di satu forum, berdiskusi tentang pengalaman dan permasalahan anak di daerah kemudian mencari penyelesaian bersama. Dari forum ini diharapkan aspirasi anak dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Di beberapa daerah pelaksanaan KLA masih terkendala rendahnya partisipasi anak dalam proses penyusunan kebijakan, kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah akan hak-hak anak, dan anggaran pembangunan yang belum responsif pada kepentingan anak. Oleh karena itu, paradigma pembangunan anak perlu diubah ke arah paradigma yang komprehensif dan berkesinambungan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, anak, dan pihak-pihak terkait harus berjalan sinergis untuk mewujudkan KLA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Askolani, Choiri dan Zainul Yusuf, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, Ponorogo : Litbang Pusat Studi dan Advokasi Rakyat dan STAIN Ponorogo Press, 2008.

Astri, Herlina, *Implementasi Konvensi Hak Anak Melalui Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo*, dalam *Pencapaian Millenium Development Goals Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2006.

Irene Astuti D., Siti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008.

Ndraha, Talidizuhu, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak-Hak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Internet

Database Pelanggaran Hak Anak di Indonesia Tahun 2010, [http://www.komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/Tentang\\_Kami.html](http://www.komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/Tentang_Kami.html), diakses 1 Februari 2011.



Catatan Akhir Tahun 2011 : Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua Dalam Menjaga dan Melindungi Anak, <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>, diakses 4 Februari 2012.

Desa Hargobinangun Sleman Ingin Menjadi Desa Ramah Anak, <http://regional.kompasiana.com/2011/11/24/desa-hargobinangun-sleman-ingin-menjadi-desa-layak-anak/>, diakses 7 Juni 2012.

Forum Anak Nasional di Solo Inspirasi Pembentukan Wadah Partisipasi Anak Daerah, [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1780:forum-anak-nasional-di-solo-inspirasi-pembentukan-wadah-partisipasi-anak-daerah&catid=190:info&Itemid=246](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:forum-anak-nasional-di-solo-inspirasi-pembentukan-wadah-partisipasi-anak-daerah&catid=190:info&Itemid=246), diakses 13 Juni 2012.

Hamid Patilima, Kota Layak Anak, [http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com\\_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121), diakses 24 April 2012.

Konsep PUHA, [www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman&task=](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman&task=), diakses 2 Februari 2012.

Kota Di Indonesia Belum Layak Anak, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/02/09/103530-kota-di-indonesia-belum-layak-anak>, diakses 8 Juni 2012.

3 Kota Di Indonesia yang Layak Untuk Anak, <http://health.detik.com/read/2011/07/23/111440/1687709/763/3-kota-di-indonesia-yang-layak-untuk-anak>, diakses 6 Juni 2012.

Memahami Partisipasi Anak, <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2012/01/Memaknai-Partisipasi-Anak.pdf>, diakses 13 Mei 2012.

Penduduk Indonesia Tambah 3,5 Juta Jiwa Per tahun, <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/13/2024416/Penduduk.Indonesia.Tambah.3.5.Juta.Jiwa.Per.Tahun>, diakses 11 Juni 2012.

Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak, [http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67:pertahankan-prestasi-kota-layak-anak-&catid=51:pontianak&Itemid=65](http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:pertahankan-prestasi-kota-layak-anak-&catid=51:pontianak&Itemid=65), diakses 6 Juni 2012.

4 Prinsip Dasar Partisipasi Anak, <http://alpa-aceh.blogspot.com/2008/11/4-prinsip-dasar-partisipasi-anak.html>, diakses 5 Juni 2012.

**BAGIAN IV**  
***SCHOOL BULLYING* DALAM KEHIDUPAN REMAJA**

***Sulis Winurini\****

---

\* Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI, *email*: winurini@yahoo.com.



## A. Pendahuluan

*School bullying* merupakan tindak kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan pelajar di sekolah. *School bullying* merupakan bentuk penindasan yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang superior, seperti guru dan pelajar senior terhadap seseorang yang inferior di sekolah, seperti pelajar junior. Dulu, permasalahan *school bullying* nyaris tidak tersentuh karena dianggap sebagai kejadian yang umum dan biasa terjadi. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, *school bullying* mendapat perhatian khusus dari beberapa negara di dunia.

Di Indonesia, perhatian terhadap *school bullying* mulai tampak dalam satu dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh rentetan peristiwa kekerasan di sekolah yang berujung pada kematian. Kekerasan di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) yang kini berubah nama menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi salah satu pemicu mencuatnya kasus *bullying* di sekolah-sekolah. Indosiar Online menyebutkan bahwa pada tahun 2003, Wahyu Hidayat terbukti tewas dianiaya oleh seniorinya. Beberapa tahun setelah itu, yaitu pada tahun 2007, muncul peristiwa yang serupa. Cliff Muntu, praja IPDN dari kontingen Sulawesi Utara, tewas akibat tindakan kekerasan yang dilakukan para seniorinya. Parahnya, ditemukan indikasi berbagai tindak kekerasan yang selama ini terjadi, diketahui dan dibiarkan oleh dosen yang ada di dalamnya.<sup>1</sup> Kasus terakhir yang banyak diberitakan di media massa tentang *bullying* adalah yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Don Bosco Pondok Indah, Jakarta.<sup>2</sup>

Selain kasus-kasus tersebut, ada beberapa kasus lain yang mencuat di media massa. Berikut ini data dari berbagai sumber mengenai berita kasus *bullying* di Indonesia.<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Berita Kasus *Bullying* Di Indonesia**

Judul Artikel dan Sumber	Kutipan Bagian Dari Berita
<a href="http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/11/09/brk,20091109-207304,id.html">http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/11/09/brk,20091109-207304,id.html</a>	Ade Fauzan Mahfuzah, siswa kelas satu SMAN 82, dianiaya oleh sekitar 30 siswa kelas tiga. Penyebabnya adalah karena ia berjalan di "Jalur Gaza", yaitu jalan di depan kelas senior yang terlarang dilewati oleh anak kelassatu dan dua.

<sup>1</sup> Di Balik Kematian Cliff Muntu. [http://www.indosiar.com/ragam/di-balik-kematian-cliff-muntu\\_60772.html](http://www.indosiar.com/ragam/di-balik-kematian-cliff-muntu_60772.html), diakses pada tanggal 20 April 2012.

<sup>2</sup> "Kasus Don Bosco Berlanjut, terduga Pelaku Perundungan Bisa Bertambah," *Kompas*, 31 Juli 2012.

<sup>3</sup> Tisna Rudi, *Informasi Perihal Bullying Edisi Maret 2010* [http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi\\_perihal\\_bullying.pdf](http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf), diakses pada tanggal 26 Juni 2012.

<a href="http://www.transanak.co.id/id/reportase.php?cat=21&amp;id=225&amp;p=0">http://www.transanak.co.id/id/reportase.php?cat=21&amp;id=225&amp;p=0</a>	Muhammad Fadhil Harkasaputra terluka dan patah tulang karena dipaksa berkelahi dengan senior di geng Gazper. Kasus ini berakhir dengan dibubarkannya geng Gazper dan dikeluarkannya 5 orang siswa yang melakukan aksi kekerasan dari SMA 34.
<a href="http://www.transanak.co.id/id/reportase.php?cat=21&amp;id=225&amp;p=0">http://www.transanak.co.id/id/reportase.php?cat=21&amp;id=225&amp;p=0</a>	Geng Nero melakukan kekerasan terhadap adik kelasnya. Geng yang beranggota anak-anak perempuan ini sering menggencet orang-orang yang tidak mereka sukai.
Pikiran Rakyat, 26 Agustus 2004	Fitang Budi Aditya, siswa SMPN 3 Babelan Kabupaten Bekasi, dianiaya teman sekelasnya atas perintah gurunya. Penyebabnya adalah karena korban terlambat datang ke sekolah dan tidak mengenakan <i>badge</i> (lambang sekolah) pada seragam sekolah yang dikenakannya.
Tabloid Cek & Ricek, 3 Oktober 2004	Suci pratiwi melakukan bunuh diri diduga karena adanya tuduhan mencuri uang gurunya.
Media Indonesia, 6 April 2005	Penindasan dilakukan oleh beberapa siswi SMAN 1 Budi Utomo Jakarta kepada adik kelas mereka.
Media Indonesia, 8 April 2005	Pungutan liar dilakukan oleh sebuah sekolah di Surabaya.
Kompas, 12 mei 2005	Kepala sekolah SMPN 1 Rajapolah, Tasikmalaya, menghardik dan menampar siswa dalam upaya untuk menertibkan mereka.
Kompas, 17 Juli 2005	Fifi Kusri, siswi SMPN 10 Bekasi nekat bunuh diri karena sering diejek sebagai anak tukang bubur.
Media Indonesia, 16 Desember 2005	Aditya, gantung diri diduga karena takut dimarahi guru bila tidak mengenakan seragam Pramuka

sumber: [http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi\\_perihal\\_bullying.pdf](http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf)

Perlu ditekankan bahwa kasus-kasus *school bullying* yang mencuat di media massa ibarat hanya puncak gunung es. Masih banyak lagi kasus *bullying* lain yang tersimpan dan tidak diketahui oleh masyarakat karena sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu, tidak diulas oleh media massa, atau bahkan tidak disadari oleh masyarakat karena sebagian besar menganggap *bullying* bukan masalah berarti. *Indonesian Anti Bullying* melaporkan beberapa penelitian mengenai *schoolbullying* di Indonesia:<sup>4</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*



1. Dr. Amy Huneck mengungkapkan bahwa 10-60% siswa Indonesia melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun dorongan, sedikitnya sekali dalam seminggu.
2. Plan Indonesia dan Yayasan Sejiwa melakukan survei yang melibatkan 1.500 pelajar SMP dan SMA di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 2008. Hasilnya, 67% pelajar SMP dan SMA menyatakan tindak *bullying* pernah terjadi di sekolah mereka. Kategori tertinggi tindakan *bullying* berupa mengucilkan, peringkat kedua ditempati kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir kekerasan fisik (memukul).
3. Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa per November 2009 setidaknya terdapat 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dampak *school bullying* tidak pernah disadari secara serius sebelumnya. Dalam *workshop* mengenai *school bullying* yang diadakan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2006, banyak peserta yang sebagian besar adalah guru dan orang tua, masih asing dengan istilah dan pengertian *bullying*. Ketika mereka diberitahu tentang definisi dan contoh-contohnya, sebagian besar memandang wacana tentang *bullying* adalah sesuatu yang berlebihan. Beberapa dari mereka menganggap tindak *bullying* adalah ujian mental bagi anak didik mereka supaya menjadi tegar. Beberapa peserta lainnya menganggap bahwa tindak *bullying* adalah tindakan yang sudah sewajarnya diterima karena tidak berdampak apa-apa.<sup>5</sup>

Tampak bahwa *bullying* dianggap sebagai kenyataan sehari-hari yang alamiah. Hal ini menjelaskan mengapa *bullying* bisa berlangsung begitu lama, lintas generasi dan berakar. Sebagian besar pihak mendiamkan *bullying* dan memandangnya sebagai bagian dari proses natural tumbuh kembang anak. Kesimpulan ini sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Riauskina, Djuwita dan Soesetio dengan beberapa siswa SMA. Hasil survei menjelaskan bahwa fenomena kekerasan antarsiswa sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama di sekolah mereka sehingga sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan berulang-ulang.<sup>6</sup>

Sullivan menyebutkan bahwa *bullying* terjadi paling intens dan memiliki pengaruh yang relatif signifikan ketika individu berada di rentang usia 15-17 tahun atau berada pada tahap perkembangan remaja.<sup>7</sup> Sama halnya dengan yang lain, tahap perkembangan remaja memiliki risiko perkembangan yang bisa berasal dari fisik, psikologis, lingkungan, maupun masalah penyesuaian yang tak dapat dihindari. Permasalahan dalam perkembangan remaja bisa menimbulkan hambatan dalam

<sup>5</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta : PT Grasindo, 2008), hlm 7.

<sup>6</sup> Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani, "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan" (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), hlm 1.

<sup>7</sup> Hoshael Waluyo Erlan, *Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying Pada Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2008), hlm 5.

penyesuaian diri yang kemudian bisa menjadi pemicu munculnya perilaku *bullying*. Bagaimana *bullying* terjadi dalam kehidupan remaja dan apa saja dampaknya akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian School Bullying**

*Bullying* termasuk salah satu bentuk perilaku agresi. Sullivan, Clearly dan Sullivan memberikan penjelasan yang dapat membedakan perilaku *bullying* dengan perilaku agresif yang lain, yaitu dari segi jumlah orang dan intensitas waktu.<sup>8</sup> Menurut mereka, *bullying* adalah serangkaian tingkah laku agresif yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dalam kurun waktu tertentu. Sullivan menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan ke dalam tindakan *bullying*, jika:<sup>9</sup>

1. Ada niat untuk melukai orang lain.
2. Ada ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku lebih kuat atau lebih berkuasa daripada korban.
3. Seringkali terorganisasi, sistematis, dan tersembunyi.
4. Dilakukan berulang-ulang dalam suatu periode waktu.
5. Korban *bullying* tersakiti secara fisik dan/atau psikologis.

Dalam konteks *bullying* di sekolah, korban *bullying* adalah seorang siswa, sedangkan pelaku biasanya adalah sekelompok siswa yang terdiri dua atau tiga orang, namun tidak menutup kemungkinan apabila *bullying* dilakukan oleh seorang siswa. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *school bullying* adalah bentuk agresi fisik maupun psikologis, dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dalam periode waktu tertentu oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah. Kekuatan yang dimiliki pelaku bisa berupa kekuatan fisik yang kuat dan juga status sosial yang tinggi dibandingkan teman sebaya, kekuatan yang sistemik (ras, kondisi sosial ekonomi) serta kemampuan pelaku untuk melihat kelemahan khusus korbannya (seperti obesitas, kesulitan belajar, latar belakang keluarga, dan lain-lain), yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menimbulkan *distress* pada korban.<sup>10</sup>

Perilaku agresif yang termasuk dalam *school bullying* bermacam-macam bentuknya. Menurut beberapa penelitian, perilaku yang bisa dikategorikan sebagai *bullying* adalah:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> M. Fajar Fitrianto, *Hubungan Antara Trait Kepribadian Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa SMA* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009), hlm 10.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>11</sup> Ma Simmons, Mah Stewin, Sullivan, Olweus dalam Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani, *"Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan"* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), hlm 2.



1. Perilaku yang berupa kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak serta berbagai serangan fisik lainnya, termasuk merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain;
2. Perilaku yang berupa kontak verbal langsung seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, memberi panggilan nama, sarkasme, mengintimidasi, dan juga menyebarkan gosip;
3. Perilaku yang berupa perilaku nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menampilkan ekspresi muka merendahkan, mengejek dan mengancam;
4. Perilaku yang berupa perilaku nonverbal tidak langsung seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga hubungan tersebut menjadi retak, dengan sengaja mengucilkan seseorang atau tidak mengabaikan orang tersebut, atau mengirimkan surat kaleng; dan
5. Perilaku yang berbentuk pelecehan seksual.

## 2. *School Bullying* dalam Kehidupan Remaja

### 2.1 Remaja

Menurut Papalia, Olds dan Feldman, remaja merupakan suatu periode transisi dari anak-anak menjadi seorang dewasa, yang diikuti perkembangan fisik, kognitif dan psikososial.<sup>12</sup> Umumnya, seseorang dikatakan remaja ketika ia telah matang secara seksual dan memiliki kemampuan bereproduksi. Hurlock menjelaskan bahwa rentang masa remaja bermula ketika seseorang berusia kira-kira tiga belas tahun dan berakhir ketika mereka berusia enam belas hingga delapan belas tahun.<sup>13</sup> Jika dikaitkan dengan usia sekolah, siswa yang duduk pada jenjang pendidikan SMP hingga jenjang SMA berada pada masa remaja.

Sesuai perkembangan kognitif yang dijabarkan oleh Piaget, remaja memasuki tahap formal. Mereka telah mampu berpikir abstrak dan spesifik, mampu mempersepsikan apa yang terjadi di lingkungannya, mampu membayangkan kemungkinan, serta mampu memikirkan akibat dari perbuatannya.<sup>14</sup> Dengan taraf berpikirnya tersebut, mereka dapat mempersepsikan pengalaman yang mereka rasakan dari lingkungannya, termasuk lingkungan sekolahnya. Dengan kalimat lain, mereka dapat memberi penilaian atas kualitas kehidupannya di sekolah. Adapun penilaian tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan psikososialnya.

Dilihat dari perkembangan psikososialnya, remaja memasuki tahap *identity vs identity confusion*. Erikson menjelaskan bahwa pada tahapan ini, remaja berusaha menjelaskan siapa dirinya, termasuk apa peranannya terhadap masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Dianne E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Fieldman, *Human Development* (8<sup>th</sup> ed) (Boston: McGraw Hill, 2001), hlm 410.

<sup>13</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terjemahan) (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm 206.

<sup>14</sup> Dianne E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Fieldman, *Human Development* (8<sup>th</sup> ed), hlm 425.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 447.

Mereka akan melakukan identifikasi dengan menempatkan idola mereka sebagai pembimbing dalam mencapai identitas. Menurut Hurlock, pada tahapan ini, mereka berusaha menarik perhatian supaya dipandang sebagai individu, dan karenanya seringkali mereka menampilkan diri dengan menggunakan simbol status atau berusaha menjadi populer.<sup>16</sup>

Menurut Papalia dkk, pembentukan identitas pada remaja berkaitan dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan seringkali hal ini membuat mereka sering terlibat dalam perilaku agresi.<sup>17</sup> Penjelasan ini turut didukung penemuan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu pemicu terjadinya *bullying* pada masa remaja adalah lekatnya peran kelompok rekan sebayadalam kehidupan remaja, terutama ketika mereka berada di sekolah.<sup>18</sup> Menurut Hardcastle, adanya sebuah kelompok sebaya yang melakukan *bullying* berkaitan dengan keinginan yang kuat pada diri remaja agar mereka dapat diterima di dalam kelompoknya.<sup>19</sup>

Remaja membutuhkan kelompok sebaya untuk membantunya mendapatkan dukungan emosional guna melewati masa transisinya. Harrocks dan Benimoff menjelaskan pengaruh kelompok sebaya pada masa remaja sebagai berikut:<sup>20</sup>

Kelompok sebaya merupakan dunia nyata kawula muda, yang menyiapkan panggung di mana ia dapat menguji diri sendiri dan orang lain. Di dalam kelompok sebaya ia merumuskan dan memperbaiki konsep dirinya; di sinilah ia dinilai oleh orang lain sejajar dengan dirinya dan yang tidak dapat memaksakan sanksi-sanksi dunia dewasa yang justru ingin dihindari. Kelompok sebaya memberikan sebuah dunia tempat kawula muda dapat melakukan sosialisasi dalam suasana di mana nilai-nilai yang berlaku bukanlah nilai-nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa melainkan oleh teman-teman seusianya...

Tampak bahwa hubungan yang baik dengan kelompok sebaya sangat vital bagi perkembangan sosial remaja. Beberapa remaja akan melakukan tindakan apapun agar diterima sebagai anggota kelompok. Bagi mereka, dikucilkan dari kelompok merupakan hal yang bisa membuat mereka stres dan frustrasi sehingga mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok sebayanya. Sayangnya,

<sup>16</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)*, hlm 208.

<sup>17</sup> Dianne E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Fieldman, *Human Development (8<sup>th</sup> ed)*, hlm 447.

<sup>18</sup> D. L Espelage, *Bullying in early adolescence: The role of the peer group*. [http://www.counseling.org/Resources/Library/Selected%20Topics/Bullying/Bullying\\_%20Early\\_Adolescence.html](http://www.counseling.org/Resources/Library/Selected%20Topics/Bullying/Bullying_%20Early_Adolescence.html), diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

<sup>19</sup> Disa Chairani, *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA Z* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), hlm 4.

<sup>20</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)*, hlm 214.



pengaruh kelompok sebaya terkadang berhubungan dengan hal-hal negatif. Suatu penelitian menunjukkan bahwa tekanan kelompok berhubungan dengan masalah-masalah dalam kehidupan remaja, seperti *bullying*, pencurian, penggunaan obat-obat terlarang, membolos dan rasisme.<sup>21</sup> Permasalahan ini bisa saja muncul karena sesuai dengan pernyataan Hurlock, bergabung dengan kelompok, diterima menjadi anggota kelompok karena memiliki penampilan dan perbuatan yang sama dengan penampilan dan perbuatan anggota kelompok lain merupakan salah satu fungsi simbol status pada masa remaja.<sup>22</sup> Simbol status adalah penting bagi remaja untuk bisa dilihat oleh lingkungan sosialnya. Sebagian remaja sering memanfaatkan simbol status untuk mempermudah proses penerimaan mereka di dalam lingkungan sosial.

## 2.2 Mengapa *School Bullying* Bisa Terjadi Pada Remaja?

*School bullying* adalah *bullying* yang terjadi dalam konteks di sekolah. Usia remaja adalah usia sekolah, dan terjadinya *bullying* tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi remaja di dalam tahap perkembangannya. Demi melewati krisis identitasnya, remaja sering menjadikan *bullying* sebagai strategi untuk menunjukkan diri di antara teman sebayanya. Herlambang, melalui penelitian terhadap 1398 sampel yang terdiri dari pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan PT (Perguruan Tinggi), menemukan bahwa motivasi paling umum yang dimiliki pelaku *bullying* adalah untuk mendapatkan popularitas atau terlihat hebat di mata teman-temannya, di samping adanya rasa iri, serta adanya pelampiasan emosi dari pelaku terhadap korban.<sup>23</sup> Temuan tersebut sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku *bullying* merupakan anak-anak populer di sekolah. Mereka dikelilingi oleh sekelompok kecil teman sebaya yang terdiri dari dua atau tiga orang yang mendukung mereka melakukan *bullying*.<sup>24</sup> Dalam penelitian Chairani terhadap beberapa kelompok sebaya di SMA, disebutkan bahwa dukungan bagi pelaku *bullying* merupakan bentuk penguatan positif terhadap terciptanya tindak *bullying*; membuat pelaku merasa disegani, terkenal, ditakuti, terutama oleh teman-teman seangkatan dan adik kelas.<sup>25</sup> Temuan-temuan ini sesuai dengan tulisan Baumeister dan Bushmanyang menyatakan bahwa agresi adalah sebuah strategi sosial yang dikeluarkan individu untuk mencapai sesuatu, dalam hal ini pengakuan secara sosial dari teman-teman di sekolah.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Miles Coverdale Primary School (2002) dalam Disa Chairani, *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA Z* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), hlm 12.

<sup>22</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terjemahan), hlm 223.

<sup>23</sup> Andy Herlambang, *Gambaran Motivasi Pelaku Bullying Pada Pelajar SMP, SMA dan PT di Tiga Kota Besar di Indonesia* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2008), hlm 29.

<sup>24</sup> Bjorkquist et al dalam Disa Chairani, *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA*, hlm 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Andy Herlambang, *Gambaran Motivasi Pelaku Bullying Pada Pelajar SMP, SMA dan PT di Tiga Kota Besar di Indonesia*, hlm 29.

Herlambang kemudian menelaah secara spesifik mengenai temuannya terkait motivasi pelaku *bullying* berdasarkan jenjang pendidikan. Dijelaskan olehnya bahwa pada tingkat SMP, motivasi dendam masih menjadi salah satu motif yang populer, sementara pada tingkat SMA dan PT tempatnya sudah digantikan oleh motif kesenangan. Menurutnya, perbedaan motivasi ini mungkin dapat disebabkan oleh tingkat kematangan individu dan kemampuannya untuk mengatasi perasaan negatif yang muncul. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sarwono bahwa remaja tahap akhir sudah matang secara psikologis sehingga mampu mengatasi perasaan negatif yang muncul dengan lebih baik.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, Herlambang menemukan bahwa motivasi paling umum dari tindak *bullying* pada kelompok SMA dan PT adalah tradisi. Temuan ini sesuai dengan temuan Riauskina, Djuwita dan Soesetio terhadap 80 siswa SMA homogen yang menyatakan bahwa tradisi merupakan motivasi paling umum dimiliki pelaku *bullying*, selain balas dendam, iri hati dan keinginan menunjukkan kekuasaan.<sup>28</sup> Keberadaan tradisi *bullying* tidak lepas dari budaya di dalam sekolah. Menurut O'Connell, sekolah yang tidak peduli terhadap interaksi siswa dan tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas siswanya dapat meningkatkan perilaku *bullying*. Tindak *bullying* terjadi di sekolah pada saat jam istirahat atau pulang sekolah, dan untuk meminimalisasi, diperlukan pengawasan yang maksimal serta kepedulian dari pihak sekolah.<sup>29</sup>

*Bullying* sebagai tradisi dapat pula tergambar dari kegiatan atau seremoni yang biasa diadakan di sekolah. Kegiatan sekolah yang paling umum berpeluang memunculkan tindak *bullying* di SMA dan PT adalah Masa Orientasi Siswa (MOS). Yayasan Semai Jiwa Amini menjelaskan bahwa ketika MOS, pada umumnya kakak-kakak kelas selalu memberi pembenaran atas tindakan *bullying* untuk menindas adik kelasnya yang lebih muda. Kendati bukan ditujukan untuk hal negatif, namun pada praktiknya, kegiatan MOS sering disalahgunakan sebagai sarana pelampiasan kekerasan kakak kelas terhadap adik kelasnya. Siswa senior merasa berhak melakukan kekerasan terhadap adik kelasnya hanya karena pernah menjadi korban *bullying* saat menjadi siswa junior. Sementara siswa junior yang menjadi korban mereka diajarkan untuk menyimpan dendam yang akan mereka lampiaskan saat mereka menjadi siswa senior pada angkatan yang akan datang.<sup>30</sup>

Herlambang menekankan bahwa motivasi tradisi terjadi pada *bullying* antarkelompok. Tradisi *bullying* merupakan hasil pemikiran kelompok dan sudah merupakan hasil pembelajaran.<sup>31</sup> Kasus *bullying* dalam kegiatan MOS merupakan

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>29</sup> M. Fajar Fitrianto, *Hubungan Antara Trait Kepribadian Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa SMA* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009), hlm 13.

<sup>30</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, hlm 15.

<sup>31</sup> Andy Herlambang, *Gambaran Motivasi Pelaku Bullying Pada Pelajar SMP, SMA dan PT di Tiga Kota Besar di Indonesia*, hlm 30.



salah satu contoh *bullying* yang dilakukan oleh kelompok angkatan senior terhadap kelompok angkatan junior; di mana kegiatannya dilakukan secara sistematis, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah mereka susun. Pada kelompok-kelompok tertentu, tindak *bullying* dilakukan pada individu atau kelompok lain di luar kelompoknya untuk mempertahankan kelangsungan kelompok tersebut.

Chairani menemukan bahwa munculnya perilaku *bullying* di dalam kelompok lebih disebabkan adanya pengaruh sosial, yaitu konformitas. Feldman menyatakan bahwa konformitas adalah perubahan dari perilaku atau sikap karena adanya keinginan untuk mengikuti keyakinan atau standar tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, Campbell dan Fairy mengatakan bahwa pada dasarnya konformitas terjadi karena dua alasan, yaitu agar benar dan agar disukai. Dalam kasus *school bullying*, konformitas terjadi lebih dikarenakan adanya pengaruh normatif, yaitu keinginan agar disukai dan agar mendapatkan pengakuan oleh orang lain.<sup>32</sup> Hal ini bisa dipahami mengingat remaja memiliki kebutuhan yang besar untuk diakui dan diterima oleh kelompoknya. Biasanya, kelompok sebaya memiliki kesepakatan atau perjanjian bersama yang apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi. Oleh sebab itu, anggota kelompok akan berusaha mengikuti keputusan mayoritas supaya terhindar dari konsekuensi.

Pada sebagian kasus, *bullying* sudah menjadi nilai bersama, tidak hanya di dalam kelompok sebaya siswa, namun juga di dalam lingkungan sekolah. Oleh karenanya, sebagian besar siswa di sekolah, dan bahkan bisa saja pihak sekolah, menciptakan pembenaran untuk mempertahankan *bullying* atau bahkan dengan sengaja menutupi keberadaan praktik *bullying* di sekolah mereka. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai bagian dari kelompok atau organisasi, yaitu sekolah. Penjelasan ini turut didukung oleh pernyataan Herlambang yang mengatakan bahwa tradisi *bullying* dimunculkan dan dipertahankan oleh mereka yang sudah teridentifikasi dengan kelompok tertentu, yang dalam hal ini bisa saja terjadi pada organisasi secara keseluruhan.<sup>33</sup> Mereka sebagai bagian dari organisasi tidak ingin menerima konsekuensi atas kesepakatan yang secara implisit sudah tertanam sebagai budaya di lingkungan sekolah mereka. Kondisi semacam ini akan mempersulit korban dalam mendapatkan pertolongan. Mereka menjadi cemas apabila ada orang lain seperti guru dan orang tua ikut turun tangan membantu mereka. Yayasan Semai Jiwa Amini mengatakan bahwa bisa jadi para korban *bullying* telah memiliki sistem nilai yang membuat mereka kurang tertarik meminta pertolongan. Misalnya, mereka berpikir bahwa mengadu kepada orang lain bukanlah sifat yang kesatria, wujud sifat kekanak-kanakkan, manja, lemah dan sama sekali tidak dewasa.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Disa Chairani, *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA Z*, hlm 20.

<sup>33</sup> Andy Herlambang, *Gambaran Motivasi Pelaku Bullying Pada Pelajar SMP, SMA dan PT di Tiga Kota Besar di Indonesia*, hlm 30.

<sup>34</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, hlm 18.

Lebih lanjut, suburnya praktik *bullying* tidak terlepas dari nilai-nilai yang sudah lama tumbuh di Indonesia. Konsep *bullying* berkaitan dengan kesenjangan kekuasaan atau kekuatan. Wilman mengatakan bahwa senioritas merupakan istilah yang sering disangkutkan dengan kekuasaan serta kekuatan.<sup>35</sup> Menurut Hofstede, Indonesia merupakan salah satu negara dengan nilai *power distance* (jarak kekuasaan) tertinggi di Asia, dan ini menjadi indikator bahwa ketidaksetaraan kekuasaan dan kemakmuran Indonesia juga tinggi. Selanjutnya, Yuki dan Yamaguchi mengatakan bahwa nilai senioritas hadir untuk mengacaukan prinsip kesetaraan, dimana junior harus mempersepsikan bahwa hubungan yang mereka jalankan dengan senior memang tidak setara.<sup>36</sup> Di sekolah, senior sering merasa berkuasa karena lebih lama bersekolah di sekolah tersebut. Untuk menunjukkan kekuasaannya, senior sering membuat peraturan yang kurang adil bagi junior, misalnya larangan bagi junior untuk makan di kantin atau melewati tempat tertentu di dalam sekolah. Sebagai bentuk penghormatan junior terhadap senior, junior sering diminta melayani seniornya seperti halnya melayani raja. Ketidaksetaraan kekuasaan ini jelas menguntungkan senior, sebaliknya merugikan junior. Sayangnya, nilai-nilai ini ditanamkan secara turun-menurun sehingga menjadi suatu budaya yang umum berlaku di sekolah.

### **2.3 Terjadinya *School Bullying* pada Remaja**

Olweus mengemukakan bahwa sebagian besar perilaku *bullying* muncul pada murid-murid Sekolah Dasar (SD) dan frekuensi dari perilaku tersebut akan menurun pada saat mereka memasuki tingkat IX dan X. Akan tetapi, Rigby berpendapat bahwa intensitas *bullying* akan meningkat pada tingkatan SMP dan SMA.<sup>37</sup> Hal ini ditunjang oleh pernyataan Sullivan yang mengatakan bahwa *bullying* terjadi paling intens dan memiliki pengaruh yang relatif signifikan ketika individu berada di rentang usia 15-17 tahun atau ekuivalen dengan SMA.<sup>38</sup> Selanjutnya Sullivan menyebutkan lima tahapan terjadinya *bullying* yang terlihat pada tabel berikut ini.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Disa Chairani, *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA Z*, hlm 27.

<sup>36</sup> *Ibid*: 86-87.

<sup>37</sup> Irwan Indra Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007), hlm 32.

<sup>38</sup> Hoshael Waluyo Erlan, *Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying Pada Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban*, hlm 10.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 10.



**Tabel 2**  
**Tahapan Terjadinya *Bullying***

<b>Tahap</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Korban</b>	<b>Penonton</b>
Tahap 1 Melihat dan Mengganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memperoleh gambaran dinamika kelas dan mengidentifikasi korban yang potensial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mencoba menjadi bagian dari kelas dan tidak menyadari bahwa dirinya menjadi target <i>bullying</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mencoba membaaur dengan lingkungan sekolah</li> <li>– Memberi indikasi (bahasa tubuh atau tanda-tanda lain) bahwa dirinya tidak rawan terhadap <i>bullying</i></li> </ul>
Tahap 2 Melakukan percobaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menampilkan perilaku yang menyimbolkan <i>bullying</i></li> <li>– Mencari dukungan dari orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tidak dapat merespon perilaku simbolik pelaku dengan baik</li> <li>– -Malu dan merasa tidak nyaman namun berharap tidak akan semakin parah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Merasa tidak nyaman namun dapat menarik diri atau memberi dukungan terhadap pelaku</li> </ul>
Tahap 3 Sesuatu yang lebih substansial mulai muncul	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bullying</i> yang dilakukan berupa serangan fisik dan lebih serius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Merasa tidak berguna, merasa bertanggung jawab atas kenyataan dirinya mengalami <i>bullying</i> dan merasa bersalah karena tidak melawan pelakunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Merasa tidak berdaya dan merasa bersalah</li> <li>– Merasa bertanggung jawab karena tidak melakukan intervensi</li> </ul>

Tahap 4 Perilaku <i>bullying</i> mengalami peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bullying</i> menjadi semakin parah, korban diserang di luar situasi sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bullying</i> jelas kejam dan disengaja</li> <li>– Timbul rasa tidak berdaya dan penurunan harga diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bullying</i> adalah bagian dari hidup jadi lebih baik melindungi diri sendiri lebih dahulu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelaku memperoleh perasaan berkuasa yang tidak realistis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Paling baik adalah mengabaikan <i>bullying</i> atau mendukung perilakunya</li> <li>– Korban tidak layak untuk didukung</li> </ul>
Tahap 5 Perilaku <i>bullying</i> sepenuhnya ditampilkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bullying</i> diperluas ke areal yang lebih luas</li> <li>– <i>Bullying</i> tidak dapat ditolerir, dan diklaim sebagai tindakan kriminal dengan sanksi hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dunia adalah tempat yang mengerikan dan menakutkan</li> <li>– Respon ekstrim yang dapat muncul adalah bunuh diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dalam masyarakat individu tidak memiliki kekuatan. Harus waspada.</li> </ul>

Sumber: Sullivan dalam Erlan (2008): *Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying pada Individu Dewasa yang Pernah Menjadi Korban.*

Dalam Tabel 2 terlihat bahwa terjadinya *bullying* melibatkan tiga tokoh kunci, yaitu pelaku, korban dan penonton. Masing-masing tokoh tampaknya memiliki karakteristik tertentu. Harris & Petrie mengasumsikan bahwa secara umum pelaku memiliki fisik lebih besar, lebih agresif, mempunyai empati rendah, impulsif, dan cenderung tidak bersedia bekerjasama. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nansel dkk., menunjukkan bahwa pelaku cenderung mempunyai kebiasaan merokok dan menggunakan obat-obatan terlarang serta alkohol dibandingkan dengan korban. Selain itu pelaku juga memiliki prestasi kurang baik namun lebih mudah berteman dibandingkan dengan korban.<sup>40</sup> Sisi superioritas pelaku tampaknya cukup terwakili dengan karakteristik yang mereka miliki.

Pada tahapan awal, pelaku berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan mencari korban yang bisa mereka intimidasi. Dalam praktiknya, pelaku tidak sembarangan memilih korban. Pada umumnya pelaku akan memilih seseorang dengan karakteristik lemah, misalnya fisik lemah, harga diri rendah, pemalu dan berkepribadian tertutup.<sup>41</sup> Pelaku sadar bahwa dengan mem-bully seseorang yang

<sup>40</sup> Irwan Indra Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA*, hlm 28.

<sup>41</sup> *Ibid*: 29.



lemah, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk menunjukkan kekuasaannya. Sementara itu, ada orang-orang di sekitar yang berperan sebagai penonton. Mereka ini adalah orang-orang yang cenderung menghindari konflik dikarenakan adanya rasa tidak percaya diri, takut dan tidak punya kekuatan untuk berperilaku.<sup>42</sup> Dalam setiap tahapan terlihat bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan sikapnya meskipun sadar bahwa tindak *bullying* yang mereka ketahui adalah salah. Mereka memprioritaskan keselamatan diri sendiri, yaitu dengan memberikan dukungan kepada pelaku atau menarik diri/ mengabaikan peristiwa *bullying* yang terjadi di sekitarnya.

Pada tahapan-tahapan selanjutnya terlihat bahwa kesempatan pelaku untuk melakukan *bullying* semakin terbuka. Pelaku mudah mendapat dukungan karena orang-orang di sekitarnya juga tidak memiliki keberanian untuk menghambat perilakunya. Dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar diterima pelaku sebagai penghargaan, dan karenanya pelaku semakin terpicu melakukan *bullying*. Sementara korban pun semakin merasa tidak berdaya dan bahkan merasa bertanggung jawab atas kenyataan dirinya mengalami *bullying*. Pada akhirnya, perilaku *bullying* ditampilkan sepenuhnya hingga menjadi tindak kriminal dan berdampak secara mendalam pada korban, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Riauskina, Djuwita dan Soesetio terhadap 80 pelajar SMA homogen (40 siswi SMA P dan 40 siswa M) tergambar skenario *bullying* sebagai berikut:<sup>43</sup>

**Tabel 3**  
**Skenario Bullying**

Bagian Dari Skenario	Siswa-siswi SMA P (siswi perempuan)	Siswa-siswa SMA M (siswa laki-laki)
Pelaku	Siswa/siswi yang lebih senior (kelas 2/kelas 3) secara beramai-ramai	Siswa/siswi yang lebih senior (terutama kelas 3) secara beramai-ramai
Korban	Siswa/siswi yang lebih junior (terutama kelas 1)	Siswa-siswa yang lebih junior (terutama kelas 1)
Pembantu Pelaku	Siswa/siswi yang lebih senior (kelas 2/kelas 3) biasanya satu kelompok pertemanan dengan pelaku	Siswa/siswi yang lebih senior (kelas 2/kelas 3) biasanya satu kelompok pertemanan dengan pelaku
Penonton	Siswa/siswi yang lebih senior (kelas 2/3)	Siswa/siswi yang lebih senior (kelas 2/3)

<sup>42</sup> Hazler dalam Irwan Indra Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA*, hlm 43.

<sup>43</sup> Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani, "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan", hlm 8.

Alasan Menggencet	Marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan; Mendapatkan kepuasan; Ingin menunjukkan kekuasaan; Iri hati; Tradisi	Tradisi, balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama; ingin menunjukkan kekuasaan; marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan
Sebab seseorang digencet	Penampilan menyolok, tidak berperilaku dengan sesuai, perilaku dianggap tidak sopan, tradisi	Penampilan menyolok, tidak berperilaku dengan sesuai, perilaku dianggap tidak sopan, tradisi
Kejadian Sebelum Persitiwa Gencet-gencetan	Korban dipanggil di tempat pelaku dan teman-temannya berkumpul/ yang luput dari pengawasan guru, pelaku mendatangi kelas korban	Korban dipanggil ke tempat pelaku dan teman-temannya berkumpul/ yang luput dari pengawasan guru
Kejadian Selama Peristiwa Gencet-gencetan	Pelaku berperilaku agresif verbal dan nonverbal kepada korban. Misalnya, memarahi dengan intonasi suara keras, mengejek dengan tekanan suara keras, merendahkan dengan kata-kata, memaksa melakukan tindakan-tindakan yang dianggap memalukan bagi korban, dan menunjukkan ekspresi muka merendahkan. Korban tidak melawan, mereka hanya diam saja dan menundukkan kepala.	Pelaku berperilaku agresif verbal, nonverbal dan kontak fisik terhadap korban. Misalnya seperti memarahi dengan intonasi suara keras, mengejek dengan tekanan suara keras, merendahkan korban dengan kata-kata, memerintahkan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap memalukan bagi korban, menampar, meninju, mendorong, memukul dengan bantuan sebuah alat, mendorong-dorong kepala, menendang dan memukul badan korban. Korban tidak melawan, hanya diam saja dan menundukkan kepala.
Kejadian Sesudah Peristiwa Gencet-gencetan	Pelaku memerintahkan korban untuk meninggalkan mereka, biasanya kembali ke kelas korban. Korban biasanya menceritakan pengalaman mereka ke teman-temannya. Korban jarang melaporkan kejadian yang mereka alami kepada guru maupun orang tua.	Pelaku memerintahkan korban untuk meninggalkan mereka. Biasanya kembali ke kelas korban. Korban jarang melaporkan kejadian yang mereka alami pada guru maupun orang tua.



Tempat Terjadi	Di tempat pelaku dan teman-temannya berkumpul. Di dalam kelas korban.	Tempat pelaku dan teman-temannya berkumpul, WC, kantin.
Waktu	Istirahat dan pulang sekolah.	Istirahat dan pulang sekolah

Sumber: Riauskina, Intan Indira., Djuwita, Ratna., Soesetio, Sri Rochani. (2005). "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan". Jurnal Psikologi Sosial, Vo. 12. No. 01, September 2005. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Berdasarkan skenario *bullying* yang telah dipaparkan pada Tabel 3, tampak bahwa skenario pada pelajar perempuan dan pelajar laki-laki tidak memiliki banyak perbedaan. *Bullying* dilakukan oleh kakak kelas secara beramai-ramai, sementara korban adalah adik kelas. Pemicu terjadinya *bullying* juga hampir sama, begitu pula dengan tempat kejadian *bullying* serta waktu terjadinya *bullying*. Kendati demikian, ada beberapa perbedaan yang terlihat, yaitu motivasi melakukan *bullying*, serta kejadian selama peristiwa *bullying*. Perilaku agresif verbal dan nonverbal sama-sama dilakukan, baik pada pelajar perempuan maupun laki-laki. Namun pada pelajar perempuan tidak ada kontak fisik, sementara pada pelajar laki-laki ada kontak fisik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Harris & Petrie yang mengatakan bahwa *bullying* secara langsung dan fisik terjadi pada pelajar laki-laki, sementara tidak pada pelajar perempuan.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari tempat dan waktu terjadinya *bullying*, tampak bahwa *bullying* terjadi ketika pengawasan minim dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini sangat mudah dipahami karena minimnya pengawasan mempermudah pelaku melakukan *bullying* terhadap korban.

## 2.4 Dampak Negatif School Bullying

Perilaku *bullying* merupakan tindak kekerasan yang bisa menimbulkan kerugian pada korban, baik dalam hal fisik maupun psikis. Carlisle menguraikan 26 simptom yang muncul sebagai efek dari pengalaman menjadi korban *bullying*, yaitu:<sup>44</sup>

- Perasaan kesepian
- Malu
- Timbul pemikiran untuk balas dendam
- Kecemasan
- Mudah merasa tertekan
- Iritabilitas
- Penurunan Rasa Percaya Diri
- Energi yang rendah
- Depresi
- Kesulitan untuk membaur dengan kelompok

<sup>44</sup> Hoshael Waluyo Erlan, *Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying Pada Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban*, hlm 14.

- Merasa tidak berdaya dalam situasi konflik
- Mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan intim dengan lawan jenis
- Bermimpi kembali ke sekolah
- Sulit tidur
- Rasa sakit di leher atau di punggung
- Problem seksual
- Ketegangan otot yang lain
- Keluhan terkait dengan kondisi organ dalam
- Fantasi seksual yang tidak biasa
- Merasa terpisah dari tubuh
- Ketergantungan terhadap obat-obatan atau alcohol
- Perasaan bahwa situasi di sekeliling saya tidak nyata
- Intoleransi terhadap sinar, cahaya atau kedua-duanya
- Gangguan makan
- Kecanduan terhadap kerja

Secara spesifik, Rigby membagi dampak psikologis korban *bullying* menjadi empat kategori, yaitu:<sup>45</sup>

1. Memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Pada kategori ini kesadaran mental korban lemah, namun kondisi ini tidak terlalu berbahaya. Perasaan tidak bahagia muncul pada diri korban, selain juga perasaan mudah marah, sensitif, serta harga diri yang rendah.
2. Memiliki pandangan dan kemampuan sosial yang rendah. Korban yang berada pada kategori ini seringkali menarik diri dari pergaulan, sebaliknya lebih suka mengisolasi diri dan cenderung untuk membolos sekolah.
3. *Psychological distress*, dimana pada kategori ini korban memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Korban merasa depresi dan memiliki dorongan untuk melakukan bunuh diri.
4. Dampak negatif secara fisik, misalnya luka-luka akibat serangan fisik, serta penyakit lainnya seperti sakit kepala, demam, flu, dan batuk.

Dampak negatif *bullying* sangat dirasakan korban karena pada peristiwa *bullying* ada ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga korban merasa tidak berdaya untuk melawan mereka. Craig menyatakan bahwa siswa yang pernah menjadi korban *bullying* di kemudian hari akan menjadi pelaku pada saat mereka sudah menjajaki tingkat yang lebih tinggi di sekolahnya.<sup>46</sup> Sejalan dengan pernyataan Craig, Riauskina, Djuwita dan Soesetio menemukan dalam pra-survei penelitiannya bahwa seorang siswa/ siswi yang berada di dalam satu lingkungan dimana terjadi peristiwa *bullying* cenderung

<sup>45</sup> Irwan Indra Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA*, hlm 31.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 30.



akan membentuk naskah kognitif mengenai hal tersebut dan naskah ini akan mengarahkan perilakunya di masa depan.<sup>47</sup> Oleh karenanya, dampak negatif *bullying* juga dirasakan pelaku serta pelaku yang sekaligus pernah menjadi korban. Nansel dkk., mengemukakan bahwa baik korban maupun pelaku memiliki asosiasi yang kuat dengan penyesuaian psikososial yang rendah.<sup>48</sup>

Menurut Eisenberg & Aalsma, risiko pelaku *bullying* untuk mengalami gangguan psikologis sama dengan korban, bahkan pelaku yang juga pernah menjadi korban *bullying* (pelaku-korban), memiliki risiko lebih besar.<sup>49</sup> Menurut Craig, jika dibandingkan dengan pelaku, maka pelaku-korban memiliki tingkat agresi fisik dan verbal yang lebih tinggi. Kemudian Haynie dkk., menyebutkan bahwa pelaku-korban memiliki tingkat hiperaktif yang sangat tinggi dan sekaligus memiliki gejala-gejala depresi.<sup>50</sup>

Perilaku *bullying* memiliki implikasi negatif pada remaja. Hal ini bisa dipahami karena peristiwa *bullying* memberi pengalaman negatif kepada setiap individu yang terlibat, khususnya korban serta pelaku-korban. Pengalaman ini menjadi stimulus bagi individu untuk memersepsikan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, khususnya lingkungan sekolah. Bagaimana siswa memersepsikan sekolah sangat menentukan tingkat kesejahteraannya di sekolah. Sebagian besar pengalaman siswa sebagai individu pun diperoleh dari sekolah sehingga sangatlah wajar apabila perilaku *bullying* bisa mempengaruhi beberapa area kehidupan siswa, tidak hanya terkait sekolah namun juga kehidupannya secara keseluruhan, termasuk masa depannya.

Menurut Banks, implikasi dari perilaku *bullying* tidak hanya bersifat jangka pendek, namun juga bisa bersifat jangka panjang, artinya berefek lanjutan bahkan setelah korban tidak lagi mengalami *bullying*.<sup>51</sup> Pengalaman *bullying* bisa dipersepsikan secara berbeda oleh setiap individu sehingga dampak yang diterima pun bisa berbeda. Setiap individu memiliki karakteristik pribadi yang berbeda satu sama lain sehingga sangat memungkinkan adanya penilaian yang subjektif dan berbeda terhadap dampak yang mereka terima. Tidak hanya itu, perbedaan persepsi terhadap dampak *bullying* juga bisa disebabkan adanya perbedaan kualitas rangsangan yang mereka terima, misalnya seberapa sering intensitas *bullying* diterima dan seberapa berat bentuk *bullying* dirasakan. Semakin sering dan semakin berat bentuk *bullying* dirasakan oleh individu maka efeknya bisa mendalam dan bersifat jangka panjang.

<sup>47</sup> Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani, "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan", hlm 4.

<sup>48</sup> Irwan Indra Putra, Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA, Putra, Irwan Indra, hlm 32.

<sup>49</sup> Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani, "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan", hlm 11.

<sup>50</sup> Irwan Indra Putra, Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA, Putra, Irwan Indra, hlm 30.

<sup>51</sup> Hoshael Waluyo Erlan, Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying Pada Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban, hlm 14.

Dalam perkembangannya, remaja telah mampu mempersepsikan setiap kejadian yang ada di dalam lingkungannya. Setiap pengalaman yang mereka terima, baik bersifat positif maupun negatif, akan dipersepsikan oleh mereka dan hal ini akan menjadi acuan untuk beradaptasi di dalam lingkungan sosialnya. Keberhasilan remaja beradaptasi di dalam lingkungan sosialnya merupakan kesuksesan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Sebaliknya, sesuai dengan pernyataan Havighurst, remaja yang gagal memenuhi tugas-tugasnya sebagai seorang remaja akan mengalami kecemasan, penolakan sosial dan tidak dapat berfungsi sebagai individu yang matang. Sejalan dengan pernyataan Havighurst, Haber & Runyon mengatakan bahwa remaja yang tidak dapat beradaptasi dengan baik dalam mengatasi krisis identitas dalam diri mereka akan terisolasi dari lingkungan sosialnya dan tidak mendapatkan kesejahteraan dalam berhubungan dengan orang lain.<sup>52</sup> Kegagalan remaja memenuhi tugas-tugas perkembangannya ini tentunya akan menghambat mereka dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan selanjutnya.

### **C. Penutup**

*School bullying* merupakan fenomena yang sudah meluas, berlangsung selama bertahun-tahun, dan telah menjadi tradisi dalam lingkungan sekolah. Sebagian kalangan menganggap bahwa *bullying* bukan masalah karena sudah menjadi sesuatu yang lazim, bahkan seringkali dianggap bermanfaat bagi perkembangan pribadi siswa. Para pelaku membenarkan tindak kekerasan semacam *bullying* dengan alasan untuk menguji mental, menegakkan disiplin, mempererat persatuan angkatan pelajar, dan lain-lain. Pemikiran semacam ini berkembang secara turun-temurun hingga tertanam menjadi nilai dalam kehidupan disekolah.

Kasus *bullying* banyak terjadi pada usia remaja. Permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan psikososial yang sedang dialami mereka, yaitu krisis identitas. Remaja yang menjadi pelaku sering menggunakan *bullying* sebagai strategi untuk menunjukkan diri di antara teman sebayanya. Di lain pihak, korban mereka *bullying* sebagai sesuatu yang umum dilakukan terhadap junior, dan karenanya mereka akan melakukan hal yang sama kepada junior mereka di kemudian hari. Pada akhirnya, nilai-nilai *bullying* terjaga dengan aman di dalam lingkungan sekolah. Karena sudah menjadi nilai kelompok, setiap individu berusaha menjaga eksistensi dirinya dengan mendukung sekaligus mempertahankan *bullying*. Secara tidak disadari, korban bisa dianggap ikut serta melestarikan perilaku *bullying* dengan menutup mulut kejadian *bullying* yang menimpa dirinya atau dengan menolak pertolongan yang diberikan pihak lain karena merasa takut dan cemas. Tampak bahwa *bullying* sudah mengakar dalam kehidupan remaja di sekolah. Dengan demikian, dalam penanganannya dibutuhkan sinergi dan koordinasi dari berbagai pihak, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, kemudian sekolah, hingga lingkup lebih luas lagi yaitu pemerintah.

---

<sup>52</sup> Irwan Indra Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada Siswa Siswi SMA*, Putra, Irwan Indra, hlm 34.



Keluarga merupakan lingkungan sosial terdasar dalam kehidupan individu. Individu belajar memahami nilai-nilai benar dan salah melalui didikan yang diberikan keluarganya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Penanaman nilai yang diberikan oleh keluarga menjadi bekal bagi individu untuk merespons persoalan moral hingga mengantarkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Untuk mengoptimalkan perkembangan pribadi individu, diperlukan dukungan keluarga, yaitu dengan menciptakan lingkungan bebas *bullying* di dalam keluarga. Yayasan Semai Jiwa Amini mengatakan bahwa keluarga harus dapat memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari perilaku *bullying* baik di sekolah maupun di rumah.<sup>53</sup> Dalam hal ini, keluarga harus mampu mengembangkan pola interaksi yang tepat supaya anak bisa terbuka dan berani mengomunikasikan permasalahannya sehingga dukungan bisa cepat diberikan.

Selain keluarga, sebagian besar waktu remaja dihabiskan di sekolah, dan karenanya sekolah harus mampu memberikan pengalaman yang positif kepada mereka. Salah satu tujuan sekolah adalah mengajarkan siswa mengenai norma, nilai, dan keterampilan khusus. Sekolah diharapkan bisa memberi kesempatan pada siswa untuk belajar berperilaku baik supaya mereka bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah harus mampu mereduksi nilai-nilai kekerasan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan bebas *bullying* melalui kebijakan *anti-bullying*. Supaya lebih optimal dalam pelaksanaannya, komitmen perlu diperkuat yaitu dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh pihak di sekolah. Keterlibatan beberapa pihak bisa bermula dari penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.

Menurut Yayasan Semai Jiwa Amini, adanya seperangkat peraturan akan membantu semua pihak memahami apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan terkait *bullying*, sekaligus membantu mereka menyadari konsekuensi yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying*. Dengan pemahaman tersebut maka diharapkan semua pihak mengerti batasan-batasan dalam bertindak sehingga bisa mengantisipasi munculnya perilaku *bullying*. Lebih lanjut, mengingat *bullying* terjadi di lingkungan sekolah pada jam-jam tertentu, maka untuk mempertajam efektivitas dari penerapan kebijakan, perlu dibuat sistem pengawasan yang baku. Sistem pengawasan yang baik mencakup keterlibatan semua pihak. Kepala sekolah, guru, petugas administrasi, dan siswa perlu melakukan koordinasi dengan membagi dan melaksanakan tanggung jawab terkait pelaksanaan kebijakan *anti-bullying*. Orang tua pun perlu dilibatkan supaya mereka tahu bagaimana mencegah dan mengatasi *bullying*. Selain keterlibatan banyak pihak, sistem pengawasan yang baik seyogyanya juga dapat mendeteksi secara dini kasus-kasus *bullying* yang muncul, dan dapat menganalisis kasus-kasus tersebut dengan dasar pemahaman yang baik. Sistem ini kemudian menjadi acuan untuk menentukan solusi, dalam artian bisa menjadi tuntunan yang jelas mengenai

<sup>53</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, hlm 63.

bagaimana mengatasi kasus *bullying* secara tuntas melalui penjelasan yang lengkap mengenai tindak lanjutnya.<sup>54</sup>

Keberhasilan pencegahan sekaligus pemberantasan perilaku *bullying* sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat serta menetapkan regulasi guna mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Regulasi yang saat ini ada dan memiliki kaitan dengan kebijakan *anti-bullying* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Secara umum perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seperti *bullying* diatur dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>55</sup> Apabila undang-undang ini diperkaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan *bullying*, maka undang-undang ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya dalam mencegah dan mengatasi masalah *bullying*.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Halaman 58.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hurlock, Elizabeth B. (1991). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)*. Jakarta : Erlangga.
- Papalia, Dianne E., Olds, Sally Wendkos, & Fieldman, Ruth Duskin. (2001). *Human Development (8<sup>th</sup> ed)*. Boston: McGraw Hill.
- Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru, Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo.

### Jurnal

- Riauskina, Intan Indira., Djuwita, Ratna., Soesetio, Sri Rochani. (2005). "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak "Gencet-Gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, Vo. 12. No.01, September 2005. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

### Skripsi

- Chairani, Disa. (2005). *Gambaran Proses Kelompok Pada Sebuah Peer Group Pelaku Bullying di SMA Z*. Skripsi. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Erlan, Hoshael Waluyo. (2008). *Gambaran Perceived Long Term Effect dari Bullying Pada Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban*. Tugas Akhir Program Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Fitrianto, M. Fajar. (2009). *Hubungan Antara Trait Kepribadian Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa SMA*. Skripsi. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Herlambang, Andy. (2008). *Gambaran Motivasi Pelaku Bullying Pada Pelajar SMP, SMA dan PT di Tiga Kota Besar di Indonesia*. Skripsi. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Putra, Irwan Indra. (2007). *Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial Pada Siswa Siswi SMA*. Skripsi. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

**Internet**

*Di Balik Kematian Cliff Muntu.* 23 April 2007. [http://www.indosiar.com/ragam/di-balik-kematian-cliff-muntu\\_60772.html](http://www.indosiar.com/ragam/di-balik-kematian-cliff-muntu_60772.html), diakses pada tanggal 20 April 2012.

Espelage, D. L. (2002). Bullying in early adolescence: The role of the peer group. [http://www.counseling.org/Resources/Library/Selected%20Topics/Bullying/Bullying\\_%20Early\\_Adolescence.html](http://www.counseling.org/Resources/Library/Selected%20Topics/Bullying/Bullying_%20Early_Adolescence.html), diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

Tisna Rudi. (2010). *Informasi Perihal Bullying Edisi Maret 2010*

[http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi\\_perihal\\_bullying.pdf](http://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf), diakses pada tanggal 26 Juni 2012.

**Surat Kabar:**

"Kasus Don Bosco Berlanjut, terduga Pelaku Perundungan Bisa Bertambah," *Kompas*, 31 Juli 2012.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



**BAGIAN V**

**PEMBENTUKAN RESILIENSI**  
**PADA ANAK KORBAN BENCANA**

*Lukman Nul Hakim\**

---

\* Peneliti Bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat *e-mail*: luckey\_knap@yahoo.com.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Bencana alam datang silih berganti di Negara Indonesia. Kondisi ini terjadi karena Indonesia mempunyai wilayah geografis yang rawan bencana. Indonesia berada di antara tiga lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik, sehingga setiap pergeseran dan benturan antar-lempeng tersebut dapat mengakibatkan bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, bahkan tsunami.<sup>1</sup> Saat tulisan ini dibuat, pada 11 April 2012 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8.9 skala richter di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Indonesia juga berada dalam jalur lingkaran api wilayah pasifik (*Pacific Ring of Fire*), dan di Indonesia terdapat sekitar 240 gunung berapi yang 70 diantaranya berstatus aktif<sup>2</sup>. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan terdapat 28 wilayah di Indonesia yang rawan gempa dan tsunami, di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua, serta Balikpapan Kalimantan Timur.<sup>3</sup>

Bencana memberikan dampak yang luar biasa. Berbagai bencana yang melanda Indonesia telah merenggut begitu banyak nyawa dan menimbulkan kerugian materil yang sangat besar. Melihat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana maka pengelolaan bencana menjadi sebuah keharusan, sehingga diperlukan sebuah *grand design* penanganan bencana. Aspek penanggulangan bencana terdiri atas dua jenis, yaitu penanganan jangka pendek (*short term*) dan jangka panjang (*long term*). Penanganan jangka pendek seperti upaya pemberian penampungan sementara (*shelter*) bagi para korban, memberikan pertolongan pertama secara medis, perbaikan infrastruktur untuk memudahkan proses bantuan, dan lain-lain. Penanganan jangka panjang meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang lebih permanen bagi para korban, rawat jalan bagi para korban, dan yang juga penting adalah upaya mempersiapkan kondisi psikologis orang-orang yang tinggal di wilayah bencana dan mempersiapkan langkah-langkah penanganan korban bencana.

Kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kenyamanan membuat kondisi psikologis para korban bencana umumnya sangat lemah. Selain itu mereka terpaksa tinggal di tempat pengungsian yang ramai, penuh dan tidak memberikan ruang pribadi (*personal space*) bagi mereka, adanya

<sup>1</sup> Ujianto Singgih Prayitno. *Gempa Bumi dan Tsunami: Kasus Aceh dan Nias*, dalam Ujianto Singgih Prayitno (Ed), *Membangun Kembali Wilayah Bencana Menjadi Lebih Baik : Analisis Tim Asistensi Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Provinsi Sumatra Utara DPR RI*. (Jakarta : DPR RI, 2009). h.1.

<sup>2</sup> *Ibid.* h.1.

<sup>3</sup> Sekilas Kiprah Bina Swadaya dalam Penanganan Bencana, [www.binaswadaya.org](http://www.binaswadaya.org), diakses pada 3 April 2012.



perasaan tergantung kepada orang lain, ditambah dengan kondisi traumatis setelah mengalami langsung kejadian bencana. Semua hal tersebut menjadi beban psikologis yang berat dan nyata bagi para korban, yang jika tidak segera ditangani kondisi traumatis itu bisa berkepanjangan dan bahkan dapat berkembang menjadi permasalahan jiwa maupun fisik yang lebih serius. Mereka yang mengalami peristiwa traumatis tersebut berpotensi menderita berbagai tingkatan *distress* psikologis hingga mengalami gangguan jiwa seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan (*anxiety*).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menyatakan bahwa ada 4 jenis korban yang rentan dan harus mendapatkan prioritas untuk diselamatkan, dievakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yaitu (1) bayi, balita, dan anak-anak; (2) ibu yang sedang mengandung atau menyusui; (3) penyandang cacat; dan (4) orang lanjut usia. Di antara keempat kategori di atas tulisan ini memfokuskan diri pada kelompok rentan pertama yang penulis sebut sebagai kelompok anak-anak (bayi, balita dan anak-anak). Fokus pada anak-anak karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Anak-anak secara umum masih lemah baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik permasalahan utama anak-anak adalah mereka belum bisa mandiri, mereka masih menggantungkan sebagian besar hidupnya dari orang dewasa. Pada anak-anak balita maka ketergantungan itu bersifat mutlak, dan semakin tinggi usia anak maka semakin besar juga kemandiriannya.

Pihak-pihak yang menangani pra, saat, dan pascabencana mempunyai tantangan untuk mempersiapkan dan memulihkan psikologis anak-anak korban bencana dengan mempersiapkan *protective factors*, yaitu faktor-faktor atau karakteristik yang dapat melindungi mereka secara psikologis. Karakter yang membuat mereka kuat menghadapi trauma psikologis dan karakter yang membuat mereka dapat bangkit kembali setelah mengalami kesedihan. Dalam ilmu psikologi karakteristik itu disebut karakteristik resilien. Adapun resiliensi adalah suatu karakter yang ada pada diri seseorang, yang ketika mereka ditimpa berbagai kesulitan yang luar biasa, yang berat, akan tetapi mereka dapat menerima kondisi mereka, dan tidak sekedar menerima, mereka bahkan bangkit dari kesedihan dan mengalahkan kesulitan hidup itu untuk dapat maju dan sukses.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Mengetahui bahwa kondisi geografis Indonesia rawan bencana, dan setelah mengetahui titik-titik rawan bencana seperti tertulis di atas, maka informasi tersebut harus digunakan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Pihak-pihak terkait dapat menggunakan pendekatan ilmu psikologi untuk mempersiapkan mental masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan membangun kembali mental masyarakat yang selamat dari bencana (penyintas), yaitu dengan menanamkan karakteristik resilien pada mereka. Berdasarkan uraian di atas penulis berusaha

mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian berikut: "Bagaimanakah upaya pembentukan resiliensi pada anak-anak korban bencana?"

### C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis tulisan ini berusaha menggali potensi penerapan konsep resiliensi pada korban bencana, khususnya anak-anak. Secara praktis tulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi strategi penanganan anak-anak korban bencana.

### D. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat non-eksperimental yaitu didalam mendapatkan data penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Menurut Kerlinger dalam penelitian non-eksperimental kita tidak dapat memanipulasikan variabel atau memasukkan perlakuan secara acak, karena ada sifat-sifat tertentu dari variabel yang tidak memungkinkan untuk manipulasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data akan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder dari buku, koran, dan internet, untuk kemudian data tersebut diolah dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dianalisa berdasarkan data yang tersedia secara detail, sehingga didapatkan deskripsi atau gambaran secara sistematis, mendalam, faktual, dan akurat.

## II. Kajian Literatur

### A. Resiliensi

Resiliensi merupakan konsep yang relatif baru dalam bidang psikologi, sehingga sebagian besar orang belum memahami terminologi resiliensi. Berikut adalah sebuah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman tentang konsep resiliensi. Irma Suryati merupakan salah seorang dengan resiliensi yang tinggi. Ia menderita kaki layu sejak berusia 5 tahun yang disebabkan virus folio. Sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) ia masih bisa berjalan normal, akan tetapi kakinya mudah lemas dan ia mudah jatuh jika tersenggol sehingga akhirnya ia mulai menggunakan tongkat. Selepas SMA Irma mulai melamar pekerjaan, tetapi selalu ditolak karena kondisinya yang difabel. Menyadari kondisi itu ia mulai berwiraswasta bermodalkan ilmu membuat keset yang didapat dari *Rehabilitation Centre Solo* (RCS). Di RCS juga ia bertemu sesama pasien yang akhirnya menjadi suaminya. Keset buatan Irma maju pesat, ia bahkan mempekerjakan 50 orang difabel dan telah berhasil mempunyai rumah dan mobil. Tetapi takdir berkata lain, pada tahun 2005 kompleksnya yang berdekatan dengan Pasar Karangjati Semarang ludes terbakar, sehingga kerugian diperkirakan mencapai Rp800 juta. Ia kemudian pindah ke kampung halaman suami di Kebumen dan

<sup>4</sup> A.K. Singh. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences*. (Patna: Bharati Bhawan, 2004). h.314.



memulai kembali semuanya dari nol. Kini usahanya kembali bangkit. Dalam rentang waktu 7 tahun ia telah berhasil mempekerjakan 2500 pengrajin dan menghasilkan 20 ribu keset perbulan, dan pangsa pasarnya merambah Australia.

Kerja kerasnya memberdayakan orang-orang dengan disabilitas berbuah manis. Hingga kini ia telah mengoleksi banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya: pada tahun 2007 Irma terpilih menjadi Wirausaha Muda Teladan Tingkat Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tahun 2009 Irma terpilih menjadi Pemuda Andalan Nusantara. Tahun 2010 ia menjadi juara I Tokoh Sampoerna Pejuang 9 Bintang untuk kategori ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2010 juga ia mendapatkan Umami Award 2010 Dedikasi Ibu Indonesia. Ia juga mendapatkan penghargaan khusus untuk orang dengan disabilitas dari Jaiki Jepang. Total ia telah mengoleksi 100 penghargaan.

Kemampuan seorang Irma Suryati, untuk selalu bangkit dari berbagai cobaan yang menimpanya, yaitu cobaan berupa kondisi fisik yang tidak sempurna, cobaan berupa sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi fisiknya, sampai dengan cobaan berupa kehilangan harta benda hasil kerja kerasnya, sehingga ia harus memulai dari nol lagi, itulah karakteristik yang disebut resiliensi.

Dalam bidang ilmu psikologi saat ini telah terjadi pergeseran fokus perhatian dalam usaha memahami kondisi psikologis manusia. Jika sebelumnya difokuskan pada upaya memahami kekurangan yang ada pada seseorang, sehingga lebih memperhatikan patologi pada seseorang (prasangka, rasa marah, tidak percaya diri, dan lain-lain), maka sekarang difokuskan pada kekuatan yang dimiliki orang, sehingga sekarang lebih memperhatikan kelebihan pada seseorang (resiliensi, motivasi berprestasi, dan lain-lain).

Kemunculan teori resiliensi terkait dengan menurunnya penekanan pada patologi, dan meningkatnya penekanan pada kekuatan.<sup>5</sup> Kata resiliensi mengandung makna sebuah kemampuan untuk tidak sekedar 'mengatasi' kesulitan-kesulitan traumatis, tetapi juga untuk merespon dengan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Orang yang resilien mempunyai kemampuan untuk tidak sekedar selamat dari kesulitan, lebih dari itu ia menjadi pemenang.<sup>6</sup> VanBreda menuliskan bahwa teori resiliensi membahas tentang kekuatan yang dimiliki oleh seseorang ataupun oleh sebuah sistem yang membuat orang tersebut bangkit dan melewati kesulitan. Grotberg mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat dirinya, dan mentransformasikan pengalamannya ketika menghadapi kesulitan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Adrian DuPlessis Van Breda. *Resilience theory: A literature review*. (Pretoria: South African Military Health Service, Military Psychological Institute, 2001), h.1.

<sup>6</sup> Bonnie Isaacson. *A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People*. (University of Wisconsin - Stout, 2002). h.4.

<sup>7</sup> Edith Henderson Grotberg. *Countering Depression With The Five Building Blocks Of Resilience*. (1999b). Diakses pada tanggal 13 April 2012 dari <http://www.nesonline.com>.

Joseph menggambarkan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam perjalanan hidup.<sup>8</sup> Sedangkan Werner & Smith mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas untuk menyesuaikan diri secara efektif dengan stress internal (kekurangan mereka) dan stress eksternal mereka (seperti penyakit, kerugian yang besar dan perceraian keluarga).<sup>9</sup>

Menurut Jew, Green, & Kroger sebagaimana dikutip Isaacson, terdapat persamaan karakter individu pada anak-anak yang masuk dalam kategori resilien, yaitu tingkat kemandirian yang tinggi, kebebasan, empati, berorientasi terhadap tugas, rasa keingintahuan, mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang baik, dan hubungan pertemanan yang baik.<sup>10</sup>

Rhodes & Brown menyimpulkan bahwa resiliensi terbentuk karena adanya tiga hal, yaitu karakteristik pribadi, pengalaman keluarga, dan kondisi lingkungan.<sup>11</sup> Pendapat Rhodes & Brown didukung oleh Joseph dan Dugan & Coles.<sup>12</sup>

Anak-anak yang resilien mempunyai karakteristik individual sebagai berikut: kompeten secara sosial, gigih, sabar, dapat bangkit dari kesulitan, baik hati, optimistis, pintar, serta mampu mendapatkan perhatian positif dan dukungan. Mereka juga mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang baik, mempunyai tujuan dan kontrol diri, harga diri (*self esteem*) yang tinggi, mempunyai target di masa mendatang, dan lebih fokus pada bakatnya daripada kelemahan-kelemahannya.<sup>13</sup> Orang-orang yang resilien memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, bertahan dari penderitaan, dan mampu memperbaiki hati mereka yang terluka.<sup>14</sup>

Faktor yang berkontribusi dalam peningkatan resiliensi pada anak-anak muda adalah kemampuan kognitif, karakteristik temperamen yang menyenangkan, baik hati, penuh kasih sayang, mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain, mampu mengenali sumber daya yang dimilikinya dan mampu mengakses sumber daya tersebut, berorientasi mengalahkan dan bukan menyerah pada situasi yang sulit, mempunyai rasa mampu dan percaya diri, dan kemampuan untuk pulih dari kemunduran sementara.<sup>15</sup>

Terdapat 7 aspek dalam diri seorang yang resilien, yaitu, berwawasan luas, mandiri, mampu membina hubungan, inisiatif, kreatif, humoris, dan bermoral.<sup>16</sup>

<sup>8</sup> Bonnie Isaacson. *A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People*. h.4.

<sup>9</sup> *Ibid.* h.5.

<sup>10</sup> *Ibid.* h.10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* h.13.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wolin & Wolin dalam Bonnie Isaacson, 2002. h.13.

<sup>15</sup> Levy & Wall dalam Bonnie Isaacson, 2002. h.13.

<sup>16</sup> Wolin & Wolin dalam Bonnie Isaacson. *A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People*. h.14.



Faktor yang terkait dengan resiliensi adalah usia, dukungan sosial, *locus of control*, kompetensi, *self esteem*, temperamen, kedewasaan sosial, kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), dan kemampuan *coping* di masa yang lalu.<sup>17</sup>

Keluarga dengan anak-anak yang resilien menunjukkan karakteristik adanya kehangatan, kasih sayang, dukungan emosional, serta adanya hubungan saling melengkapi antara anak dan pengasuhnya.<sup>18</sup> Seorang anak yang resilien, ketika mereka mempunyai keluarga yang bermasalah maka akan membuat garis batas antara dirinya dan orang tua yang bermasalah.<sup>19</sup>

Karakteristik lingkungan yang mendukung terciptanya resiliensi yaitu lingkungan yang baik komunitas maupun keluarganya memberikan perawatan, memonitor, menjaga, dan menanamkan nilai-nilai sosial.<sup>20</sup> Para penyintas belajar untuk mendapatkan sekutu-sekutu di luar keluarga, membangun harga diri mereka melalui aktivitas sekolah, dan merasakan kenikmatan dari permainan-permainan fantasi. Orang yang resilien membangun hubungan dengan orang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan ia juga akan memberi kepada orang tersebut.<sup>21</sup>

Resiliensi dapat ditingkatkan pada berbagai tingkatan umur dan akan lebih mudah untuk ditingkatkan jika dilihat sebagai fondasi dari pertumbuhan dan perkembangan.<sup>22</sup> Fondasi resiliensi ini membentuk suatu paradigma yang mencakup tiga sumber resiliensi ketika individu menghadapi situasi sulit.<sup>23</sup> Fondasi tersebut dikembangkan berdasarkan tahapan perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson yaitu rasa percaya (*trust*), kemandirian (*autonomy*), identitas, inisiatif, dan *industry*.<sup>24</sup> Fondasi rasa percaya berkaitan dengan sumber resiliensi AKU PUNYA (*I have*), kemandirian dan identitas berkaitan dengan AKU ADALAH (*I am*), fondasi inisiatif dan *industry* berkaitan dengan AKU MAMPU (*I can*).

<sup>17</sup> Bonnie Isaacson. A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People. h.14.

<sup>18</sup> *Ibid.* h.15.

<sup>19</sup> Wolin & Wolin dalam Bonnie Isaacson. A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People. h.15.

<sup>20</sup> Bonnie Isaacson, 2002. A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People. h.27.

<sup>21</sup> Wolin & Wolin dalam Isaacson, 2002. A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People. h.27.

<sup>22</sup> Edith Henderson Grotberg. *Promoting Resilience*. OMH Quarterly. Vol. 8, No. 4. March 2003. The New York State Office of Mental Health.

<sup>23</sup> Edith Henderson Grotberg. *Countering Depression With The Five Building Blocks Of Resilience*. (1999b). Diakses pada tanggal 13 April 2012 dari <http://www.nesonline.com>,

<sup>24</sup> John W Santrock. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup (edisi kelima)*. Alih bahasa oleh Achmad Chusairi dan Juda Damanik. (Jakarta: Erlangga, 1995), h.32.

Tabel 1  
Komponen Resiliensi

Komponen	Definisi	Fondasi
I Have= AKU PUNYA (Eksternal)	<p>dari lingkungan sekitar individu yang memperkuat resiliensi.</p> <p>Misalnya, anak yang resilien akan berkata AKU PUNYA...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hubungan interpersonal yang dapat diandalkan dan penuh kasih sayang seperti teman, orang tua, saudara kandung, sepupu, dan lain-lain.</li> <li>– Tokoh panutan, seperti teman sebaya, saudara kandung, orang tua, atau orang tua dewasa lainnya.</li> <li>– Strukturkeluargayangsalingmemahamidanmenghargai, menerapkan aturan yang jelas dan memberikan sanksi yang adil jika terjadi pelanggaran.</li> <li>– Kemudahan untuk mendapat pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lainnya.</li> <li>– Seseorang yang mendukungku untuk tumbuh besar mandiri.</li> </ul>	<i>Trust</i>
I am= AKU ADALAH (Internal)	<p>Kekuatan pribadi dalam diri individu yang berkembang sepanjang waktu dan mendorong individu untuk menghadapi kesulitan. Misalnya, anak yang resilien akan berkata AKU ADALAH anak yang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dapat mencintai orang lain dan patut dicintai.</li> <li>– Mampu mengekspresikan afeksi saya terhadap orang lain dan peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain.</li> <li>– Menghargai dan bangga terhadap diriku sendiri.</li> <li>– Dapat menerima dan menjalani tanggung jawab serta percaya bahwa tindakannya dapat membuat perubahan.</li> <li>– Yakin dan optimis dengan masa depan serta dapat mempercayainya.</li> </ul>	<i>Autonomy identity</i>



I can= AKU MAMPU (Internal)	<p>Keterampilan dalam melakukan hubungan interpersonal dan memecahkan masalah. Misalnya anak yang resilien akan berkata AKU MAMPU...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh orang lain.</li> <li>– Memecahkan masalah dan jika dibutuhkan akan meminta bantuan kepada orang lain.</li> <li>– Memahami karakter diriku dan orang lain.</li> <li>– Menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain dan mengembangkan saling percaya.</li> </ul>	Initiative industry
-----------------------------	---	---------------------

Sumber: Nurfadilah, Pelatihan Mengidentifikasi Sumber-Sumber Resilensi. Tesis. (Depok: Fakultas Psikologi UI), 2006, h.23.

## B. Psikologi Perkembangan Anak

Masa kanak-kanak merupakan saat yang penting untuk menanamkan pondasi diri anak untuk menghadapi masa depannya yang panjang. Menurut Sigmund Freud kegagalan pada masa kanak-kanak dapat menciptakan anak-anak yang mengalami gangguan psikologis. Erikson menyusun tahapan perkembangan yang jika tiap tahap tersebut berhasil dilewati seorang anak dengan baik maka ia akan tumbuh sehat secara psikologis, dan begitupun sebaliknya. Erikson membagi perkembangan psikososial tersebut dalam 8 tahapan<sup>25</sup>. 5 tahapan yang masuk kategori anak-anak dan 3 kategori dewasa, yang secara lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2**  
Tahapan Perkembangan Erikson

Tahap	Usia	Krisis Psikologis
Anak-anak	1	Lahir-1 tahun
	2	2-3 tahun
	3	4-5 tahun
	4	6-12 tahun
	5	13-18 tahun
Dewasa	6	19-25 tahun
	7	26-40 tahun
	8	41 +

sumber: Patricia Miller, *Theories of Developmental Psychology*. 3<sup>rd</sup> ed. (New York: W.H.Freeman and Company), 1983. h. 161.

<sup>25</sup> Patricia Miller. *Theories of Developmental Psychology*. 3<sup>rd</sup> ed. (New York: W.H.Freeman and Company), 1983. h. 161.

Menurut Erikson dalam setiap tahapan perkembangan, seorang manusia akan dihadapkan pada suatu tugas yang harus diselesaikan. Jika tugas terselesaikan maka seseorang akan sehat secara psikologis, dan sebaliknya jika tidak dilewati dengan baik akan ada gangguan psikologis. Sebagai contoh pada Tabel 2, pada tahap perkembangan ke-1 seorang anak yang baru lahir akan dihadapkan pada tugas untuk mempunyai kepercayaan kepada ibunya. Jika ibu berhasil memberikan rasa aman kepada anak, menunjukkan rasa kasih sayang sehingga terbangun rasa percaya (*trust*) dalam diri anak, maka tugas tahap pertama telah berhasil dilewati dengan baik.

Akan tetapi jika sebaliknya, tidak tertanam kepercayaan dari anak kepada ibunya maka tertanam rasa tidak percaya (*mistrust*) terhadap ibunya. Bayi yang mempunyai *trust* dapat memprediksi bahwa ibunya akan memberikan ia makan ketika ia lapar dan melindunginya jika ia ketakutan. Bayi ini dapat mentoleransi ketika ibunya tidak terlihat dari pandangan matanya. Anak yang memiliki *trust* akan tumbuh sebagai anak yang percaya diri dan bahagia. Jika sebaliknya maka akan tumbuh anak yang menarik diri dari lingkungan sosial, tidak percaya diri, serta selalu curiga dan frustrasi.

Sedangkan pada tahap kedua, pertentangan adalah antara otonom atau mandiri vs rasa malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini (usia 2-3 tahun) anak sudah tumbuh besar, sudah mempunyai kemandirian secara fisik dan psikologis. Anak mempunyai banyak keinginan yang kadang bertentangan dengan keinginan orang tua, sehingga anak seringkali menjadi ragu-ragu untuk berperilaku. Pada fase ini orang tua diharapkan memahami keinginan anak dan mencari titik kompromi sehingga keinginan anak terpenuhi dan anak tetap dapat menjaga harga dirinya (*selfesteem*). Pada fase ini anak juga belajar untuk tidak mengompol, jika anak gagal menahan untuk buang air kecil di celana anak akan merasa malu (*shame*).

Pada tahap ketiga yaitu ketika anak memasuki usia 4-5 tahun, maka yang menjadi isu utama adalah keinginan anak untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya. Dalam pandangan anak-anak orang tua adalah cerminan kekuasaan, besar, dan intrusif. Anak pada fase ini penuh dengan inisiatif, sementara ada ketakutan inisiatifnya salah dan membuatnya merasa bersalah (*guilt*).

Pada tahap keempat yaitu usia 6-12 tahun anak memasuki dunia sekolah. Pada tahapan ini anak akan belajar kompetensi-kompetensi –berhitung, membaca, dan lain-lain yang jika dimilikinya akan mempengaruhi rasa percaya dirinya, dan jika tidak berhasil dikuasainya akan mengakibatkan rasa inferior.

Pada tahap kelima, usia 13-18 tahun merupakan masa genting. Pada masa ini anak akan mencoba menganalisa dirinya, identitas dirinya, dan peran yang harus dipenuhinya. Jika anak gagal maka akan mengalami kebingungan (*confusion*).



### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kejiwaan Anak

Sjarkawi menuliskan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>26</sup> Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya.

Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut, dan biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti televisi dan video, atau media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya. Di antara berbagai faktor eksternal di atas, pengalaman traumatis merupakan salah satu penyebab yang dapat berdampak sangat buruk. Kartono menuliskan bahwa faktor psikologis merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Anak-anak yang mengalami gangguan psikologis akan mengalami *inanitie psikis*, suatu kondisi kehampaan psikis, kering, dan perasaan, sehingga dapat mengakibatkan retardasi/kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Anak-anak ini juga dapat mengalami hambatan fungsi rohaniah, terutama perkembangan intelegensi dan emosi.<sup>27</sup>

### D. Stres dan Trauma

Stres adalah suatu keadaan tidak nyaman pada seseorang karena adanya perubahan dalam diri atau lingkungan yang menuntut adanya penyesuaian pada seseorang yang mengalaminya.<sup>28</sup> Definisi stres di atas menunjukkan bahwa stres sesungguhnya adalah suatu keadaan yang lumrah terjadi, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak pernah mengalami stres. Bahkan stres dalam proporsi yang cukup justru dibutuhkan, karena stres bisa menjadi pendorong untuk seseorang menampilkan kinerja yang lebih baik. Yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana orang yang mengalami stres dapat mengatasi dan mengelola stres tersebut.

## III. Pembahasan

Rhodes & Brown menyimpulkan bahwa resiliensi terbentuk karena adanya tiga hal, yaitu karakteristik pribadi, pengalaman keluarga, dan kondisi lingkungan.<sup>29</sup> Peneliti telah berusaha mengelompokkan karakteristik pribadi

<sup>26</sup> Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 13.

<sup>27</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1979). H.32.

<sup>28</sup> Tirza T Laluyan, dkk. *Pemulihan Trauma : Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. (Depok : Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007). h. 15.

<sup>29</sup> Rhodes & Brown dalam Isaacson, 2002. h. 10.

yang resilien berdasarkan uraian para pakar tersebut dan mengerucut pada enam karakter utama, yaitu:

1. Kecerdasan emosional;
2. Daya tahan;
3. Motivasi berprestasi;
4. Kecerdasan intelektual;
5. Berfikir positif; dan
6. Religiositas.

Hal yang positif adalah bahwa keenam karakteristik utama pembentuk pribadi yang resilien bukanlah sesuatu hal yang supranatural, dan bukan pula sesuatu hal yang sifatnya terberi (*given*), melainkan sesuatu hal yang dapat dipelajari, yang dapat dibentuk oleh lingkungan, dan sesuatu yang dapat dikondisikan. Hal ini berarti pemerintah melalui instansi-instansi di bawahnya dapat melakukan langkah-langkah yang mendukung terciptanya orang-orang dengan karakteristik resilien.

Dari keenam karakteristik utama tersebut unsur-unsur dari kecerdasan emosional disebut oleh semua pakar. Yang dimaksud dengan poin pertama, yaitu kecerdasan emosional adalah orang tersebut mempunyai temperamen yang menyenangkan, mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain, mampu mendapatkan perhatian positif dan dukungan, mempunyai empati, baik hati, penuh kasih sayang, dan secara umum dia mempunyai kompetensi secara sosial. Sedangkan yang dimaksud poin kedua yaitu daya tahan adalah kegigihan, kemampuan bertahan dari penderitaan, kemampuan bangkit dari kesulitan, dan mampu memperbaiki hati yang terluka (*self healing*).

Poin ketiga, motivasi berprestasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, ketika dihadapkan pada situasi yang sulit ia lebih berorientasi mengalahkan dan bukan menyerah, dan mempunyai inisiatif yang tinggi. Kebutuhan untuk berprestasi atau motivasi berprestasi menurut McClelland dan Atkinson adalah kecenderungan bekerja keras untuk sukses dan memilih orientasi tujuan<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Slavin motivasi berprestasi adalah hasrat untuk sukses dan berpartisipasi dalam aktivitas dimana kesuksesan tersebut tergantung pada usaha dan kemampuan dari masing-masing individu.<sup>31</sup> Woolfolk mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai hasrat untuk berhasil, dorongan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan.<sup>32</sup>

Poin keempat, adalah kecerdasan intelektual (*intelligence*) yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan baik, mempunyai kemampuan kognitif, berwawasan luas, dan kreatif. Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah,

<sup>30</sup> Lukman Nul Hakim. *Achievement Motivation, Creativity and Academic Achievement: A Comparative Study of Different Nationals*. Thesis. (New Delhi: JMI, 2007). h.9.

<sup>31</sup> Sri Ismayati. *Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Konsep Diri terhadap Sikap Kreatif Guru Taman Kanak-kanak*. Tesis. (Depok: Fakultas Psikologi UI, 2006).h.8.

<sup>32</sup> Woolfolk dalam Ismayati, 2006. *Ibid*. h.8.



berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, karenanya tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional.<sup>33</sup>

Yang dimaksud dengan berfikir positif (*positive thinking*) pada poin kelima yaitu optimistis, percaya diri, mampu mengenali kelebihan-kelebihannya daripada kelemahannya, mempunyai rasa mampu (*self efficacy*) dan penghargaan yang tinggi atas diri sendiri (*self esteem*). *Self esteem* adalah suatu pengalaman menjadi kompeten untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mendasar dalam kehidupan dan merasa cukup berharga untuk merasakan kebahagiaan. *Self esteem* adalah kepercayaan diri akan kemampuan kita untuk belajar, membuat pilihan dan keputusan yang layak serta mengelola perubahan. *Self esteem* juga pengalaman dimana kita merasa kesuksesan, pencapaian, dan kebahagiaan sudah selayaknya kita dapatkan. Branden menemukan bahwa seseorang dengan *self esteem* tinggi yang memiliki kepercayaan diri dan pemikiran yang positif akan cenderung merasa puas dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan poin terakhir yaitu religiusitas adalah kemampuan untuk bersabar.

Kualifikasi pribadi yang resilien tidak cukup hanya memenuhi keenam karakter utama tersebut di atas, tetapi juga membutuhkan keluarga dan lingkungan yang kondusif. Seorang anak membutuhkan dukungan emosional, kehangatan, kasih sayang, serta adanya hubungan saling melengkapi antara anak dan pengasuhnya. Selain itu juga diperlukan karakteristik lingkungan yang mendukung, turut memberikan perawatan, memonitor, menjaga, menanamkan nilai-nilai sosial, lingkungan menyediakan orang-orang yang bisa menjadi kawan, dan memenuhi kebutuhannya.

### Pembentukan Resiliensi pada Anak Korban Bencana

Resiliensi akan terbentuk ketika ketiga *protective factors* tersedia, yaitu pribadi, keluarga, dan lingkungan. Menurut Grotberg dalam menghadapi situasi sulit dibutuhkan interaksi yang seimbang dan dinamis antara ketiganya.<sup>34</sup> Selain itu resiliensi tidak akan terbentuk jika anak tidak menyadari bahwa mereka memiliki *protective factors* tersebut, atau bahkan memang salah satu faktor dari *protective factor* itu tidak tersedia. Kadang ditemui anak-anak korban bencana sudah kehilangan anggota keluarganya. Laluyan dkk menyatakan terdapat tiga faktor yang mengakibatkan keseimbangan psikologis seseorang terganggu ketika terjadi bencana yaitu, peristiwa bencana itu sendiri yang menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa, wafatnya orang-orang yang disayangi, dan hilangnya harta benda yang dimiliki dalam bencana tersebut.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> A.K. Singh. *Tests, measurements and research methods in behavioral sciences*. (Patna: Bharati Bhawan, 2004). h. 114.

<sup>34</sup> E.H. Grotberg, 1997. *The International Resilience Project*. h.8

<sup>35</sup> Laluyan dkk, 2007. *Pemulihan Trauma*. h. 4.

Menurut Dawes fokus strategi Grotberg dalam meningkatkan resiliensi pada anak adalah kesadaran anak mengenali sumber resiliensi yang dimilikinya.<sup>36</sup> Resiliensi dapat ditingkatkan melalui faktor yang tersedia di sekitar anak (AKU PUNYA), faktor yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam diri anak (AKU ADALAH), dan faktor-faktor yang diperoleh atau dipelajari oleh anak (AKU MAMPU).<sup>37</sup>

Untuk meningkatkan resiliensi pada anak-anak korban bencana maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menanamkan kepercayaan (*trust*) pada anak korban bencana, baik itu percaya pada orang lain (relawan, psikolog, tim penanggulangan bencana, dan lain-lain) maupun pada diri mereka sendiri (*self confidence*). Kepercayaan dapat terwujud ketika individu merasa dicintai, mempercayai hubungan interpersonal yang akan dijadikan panutan atau 'AKU PUNYA'; cenderung berempati, optimis dan penuh harapan, dan penyayang 'AKU ADALAH' dan dengan mudah dapat terlibat dalam hubungan interpersonal, memecahkan masalah dan mencari pertolongan ketika membutuhkan bantuan 'AKU BISA'.<sup>38</sup>

Setelah terbangun rasa percaya terhadap konselor, maka langkah selanjutnya adalah membantu anak korban bencana memperluas rasa percaya tersebut terhadap orang-orang disekitarnya dengan cara mengenali sumber-sumber resiliensinya. Sesuai teori resiliensi Grotberg maka anak-anak dibantu untuk mengetahui apa yang dimilikinya, mengetahui dirinya dengan lebih baik, dan apa yang dapat dilakukannya. Berikut adalah contoh upaya menggali sumber resiliensi anak.

Tabel 3.  
Contoh Sumber Resiliensi

I have = AKU PUNYA (eksternal)	I am = AKU ADALAH (internal)	I can = AKU MAMPU (internal)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Kakak</li> <li>— Nenek</li> <li>— Kakak-kakak dari tim relawan</li> <li>— Mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Anak yang mandiri</li> <li>— Mempunyai hobi menggambar</li> <li>— Bisa membaca, menulis dan berhitung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Berteman dengan banyak orang</li> <li>— Berkomunikasi dengan baik</li> </ul>

<sup>36</sup> Andy Dawes. "I Have, I Am, I Can". (ulasan buku *Promoting Resilience in Children*, by Grotberg, E. H, 2006). Diakses pada tanggal 10 Mei 2012 dari [http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/archive/two/7\\_3/p28.html](http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/archive/two/7_3/p28.html).

<sup>37</sup> Grotberg, 1997. *op. cit.*

<sup>38</sup> E.H. Grotberg, 2003. *Promoting Resilience*. h.5



Anak korban bencana kemudian diajarkan untuk menggunakan sumber-sumber resiliensi yang dimilikinya. Anak dapat 'menggunakan' kakaknya untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapinya. Anak juga diingatkan atas kekuatan (*strength*) dirinya dan kemampuan dirinya, sehingga pada akhirnya rasa percaya dirinya anak dapat terbangun.

Pendidikan pembentukan karakter resilien sebaiknya dijadikan program yang mendesak untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana khususnya anak-anak. Jika karakter resilien telah terbentuk maka intervensi psikologis akan lebih mudah jika di kemudian hari betul-betul terjadi bencana.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Simpulan**

Indonesia mempunyai kondisi alam yang rawan akan terjadinya bencana alam. Pemerintah harus semaksimal mungkin berusaha melindungi masyarakatnya dari kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan. Agar mendapatkan hasil yang optimal maka utamanya pemerintah daerah yang berada di wilayah rawan bencana harus menyiapkan segala sesuatunya agar dampak negatif bencana dapat di minimalisir. Persiapan dari sisi sarana prasarana penting untuk mempercepat upaya penyelamatan para korban. Selain itu upaya mempersiapkan mental masyarakat juga tidak kalah pentingnya, agar tercipta masyarakat yang resilien, yang dapat kembali bangkit setelah terjadinya bencana.

Pada tulisan ini peneliti mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya pembentukan resiliensi pada anak-anak korban bencana. Menjawab pertanyaan itu, maka harus ada koordinasi yang baik di antara instansi pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan SAR Nasional (Basarnas), Pemadam Kebakaran, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Sebuah desain strategi preventif sebelum dan setelah terjadinya bencana harus disusun bersama di antara instansi terkait.

Pada tahap prabencana maka pemerintah daerah sejak awal harus sudah melakukan upaya pembentukan resiliensi terutama pada anak-anak. Upaya mempersiapkan karakter resilien pada anak dapat dilakukan pemerintah daerah dengan menyisipkan pendidikan resiliensi sebagai bagian dari materi ajar muatan local (mulok). Kurikulum mulok tentang resiliensi mengajarkan tentang kepercayaan (*trust*), apa yang dimiliki oleh anak-anak (*I have*), usaha menggali pengetahuan tentang diri mereka sendiri (*I am*), dan mengajarkan anak agar mereka mengetahui apa yang dapat mereka lakukan (*I can*).

Apabila prinsip-prinsip itu telah tertanam pada kognisi anak-anak maka upaya penanganan ketika terjadi bencana menjadi relatif lebih mudah. Keluarga, tim relawan dari pemerintah daerah ataupun lainnya dapat memicu kembali pengetahuan mereka tentang apa yang mereka miliki dan apa yang dapat mereka

lakukan. Upaya tersebut diharapkan membuat anak-anak menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana sehingga dapat negatif dapat dikurangi.

## **B. Saran**

Implikasi dari strategi pembentukan resiliensi pada anak adalah harus disusunnya sebuah kurikulum yang khas dan khusus. Kekhususan kurikulum tersebut ada pada dua hal pertama karena target ajarnya adalah anak-anak, maka harus disusun kurikulum ajar yang bersifat konkrit dan tidak teoritis sehingga mudah dipahami anak. Kedua karena diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Untuk itu kurikulum ini sebaiknya disusun oleh para pakar, seperti pakar penanggulangan bencana, pakar pendidikan anak (paedagogi), dan psikolog anak.

Setelah disusun kurikulum pendidikan resiliensi tersebut sebaiknya di matangkan melalui serangkaian ujicoba. Hal ini penting untuk dapat menguji reliabilitas dan validitas-nya. Sehingga diharapkan kurikulum tersebut benar-benar mencapai tujuannya.

Setelah desain kurikulum tercipta maka langkah selanjutnya adalah upaya mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada sebanyak mungkin calon instruktur. Dengan tersedianya instruktur-instruktur pelatih resiliensi yang terstandarisasi akan memperbanyak pilihan SDM dalam pelatihan ke anak-anak, baik itu pada masa pra, saat kejadian maupun pasca terjadinya bencana.

Dalam kondisi tidak ada bencana maka pelatihan perlu dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Upaya yang konsisten perlu dilakukan agar materi dapat terinternalisasi dengan baik. Pada saat terjadinya bencana maka perlu adanya pendampingan terhadap anak-anak setiap harinya. Pascabencana, pendampingan harus terus dilakukan sampai anak dapat beradaptasi terhadap kondisinya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R. A. & Byrne, D. (1997). *Social Psychology*, 8th edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Breda, Adrian DuPlessis Van. (2001). *Resilience theory: A literature review*. Pretoria: South African Military Health Service, Military Psychological Institute.
- Dawes, Andy. "I Have, I Am, I Can". (ulasan buku *Promoting Resilience in Children*, by Grotberg, E. H). Diakses pada tanggal 10 Mei 2012 dari [http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/archive/two/7\\_3/p28.html](http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/archive/two/7_3/p28.html)
- Grotberg, Edith Henderson. (1999b). *Countering Depression With The Five Building Blocks Of Resilience*. diakses pada tanggal 13 April 2012 dari <http://www.nesonline.com>
- Grotberg, Edith Henderson. (1997). *The International Resilience Project*. Makalah dipresentasikan pada the 55<sup>th</sup> Annual Convention, International Council of Psychologists, Graz Austria, July 14-18, 1997, in press. Diakses pada tanggal 10 April 2012 dari <http://resilnet.uiuc.edu/library/grotb98a.html>.
- Grotberg, Edith Henderson. (2003). *Promoting Resilience*. OMH Quarterly. Vol. 8, No. 4. March 2003. The New York State Office of Mental Health.
- Hakim, Lukman Nul. *Achievement Motivation, Creativity and Academic Achievement: A Comparative Study of Different Nationals*. Thesis. (New Delhi: JMI, 2007). h.9
- Isaacson, Bonnie. (2002). *A Research Paper: Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People*. University of Wisconsin – Stout. Diakses pada tanggal 3 april 2012 dari <http://www.uwstout.edu/lib/thesis/2002/2002isaacsonb.pdf>
- Ismayati, Sri. (2006). *Pengaruh motivasi berprestasi dan konsep diri terhadap sikap kreatif guru taman kanak kanak*. Tesis. Depok: Fakultas Psikologi UI.
- Kartono, Kartini. (1979). *Psikologi Anak*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Laluyan, Tirza T., Sumampouw, N., Reza, MZ., Estrely, Martina., & Cahyono, Wahyu. (2007). *Pemulihan Trauma : Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. Depok : Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Miller, Patricia. (1983). *Theories of Developmental Psychology*. 3<sup>rd</sup> ed. New York: W.H.Freeman and Company.

- Nurfadilah. (2006). *Pelatihan Mengidentifikasi Sumber-Sumber Resilensi*. Tesis. Depok: Fakultas Psikologi UI.
- Prayitno, Ujianto S. (2009). *Gempa Bumi dan Tsunami: Kasus Aceh dan Nias, dalam Ujianto Singgih Prayitno (Ed), Membangun Kembali Wilayah Bencana Menjadi Lebih Baik : Analisis Tim Asistensi Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Provinsi Sumatra Utara DPR RI*. Jakarta : DPR RI.
- Santrock, John W. (1995). *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (edisi kelima). Alih bahasa oleh Achmad Chusairi dan Juda Damanik. Jakarta: Erlangga.
- "Sekilas Kiprah Bina Swadaya dalam Penanganan Bencana", <http://www.binaswadaya.org/files/warta-drr-01-3-2009.pdf>, diakses pada tanggal 3 april 2012.
- Singh, A.K. (2004). *Tests, measurements and research methods in behavioral sciences*. Patna: Bharati Bhawan.
- Sjarkawi. (2006). *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wolin, Sybil dan Wolin, Steve (1999). *Core concepts*. Diakses pada tanggal 3 april 2012 dari <http://www.Projectresilience.com/vocab>.



**BAGIAN VI**  
**PENDIDIKAN KARAKTER**  
**UNTUK GENERASI SEHAT MENTAL**

*Elga Andina\**

---

\* Peneliti Muda Bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat *e-mail*: [elga.andina@gmail.com](mailto:elga.andina@gmail.com).

## A. Pendahuluan

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional merupakan pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Aspek tersebut diturunkan dalam 18 nilai-nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.<sup>1</sup> Psikolog Evita E. Singgih menyimpulkan bahwa nilai-nilai tersebut hanya dapat dibentuk melalui pendidikan karakter dengan adanya kolaborasi 3 komponen, yaitu mengetahui, merasakan dan melakukan. Pendidikan karakter membantu siswa untuk mengembangkan *Adversity Intelligence*, yaitu kecerdasan yang membuat seseorang mampu bertahan melewati situasi sulit atau kemampuan bertahan terhadap stres (tekanan).<sup>2</sup>

Implikasinya jelas, pendidikan moral tidak cukup dengan mendiktekan norma sosial di depan kelas, anak didik juga perlu diberikan keterampilan untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, mereka perlu didorong untuk mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan, sehingga tidak menjadi manusia rapuh yang tidak mampu mengontrol emosinya. Dengan kata lain, pendidikan karakter bertujuan untuk membantu mengembangkan kesehatan mental positif peserta didik.

*World Health Organization* (WHO) menetapkan indikator kesehatan mental positif di level individu disandarkan pada adanya koneksi sosial dan kesadaran diri serta penghargaan pribadi yang kuat.<sup>3</sup> Indikator ini dapat melibatkan ukuran rasa memiliki, *self-esteem* (harga diri), keterikatan, keinginan diri dan kontrol serta kualitas hidup.<sup>4</sup> Dari sudut pandang keluarga, individu yang sehat mental diukur dari kesehatan mental orang tua, bebas dari kekerasan, kedekatan keluarga, keterikatan orang tua dan anak, serta praktek orang tua yang responsif dan tepat seperti memonitor aktivitas anak dan memastikan lingkungan yang aman bagi mereka. Namun, pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia hanya berfokus pada sisi materi demi memperoleh nilai tertinggi, dengan melupakan pendidikan karakter. Dampaknya dapat membahayakan bagi anak didik yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap tekanan.

<sup>1</sup> Evita E. Singgih. Membangun Ketangguhan melalui Pendidikan Karakter disampaikan pada Psychology Expo 2011: Membentuk Masyarakat Indonesia yang Resilien melalui Pendidikan Karakter, 10 Desember 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> VicHealth, 1999; Stephen R Zubrick dll, 2000b, dalam *World Health Organization* (Geneva:WHO, 2005), hlm.160.

<sup>4</sup> *Ibid.*



Para psikolog setuju perlunya pengembangan pendidikan karakter yang mampu memberikan pedoman bagi generasi muda mengenai norma sosial yang patut. Sejalan dengan itu, dirasa penting pula untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjaga kesehatan mental generasi muda.

Terkait dengan pengaturan tersebut, maka perlu didorong pengaturan mengenai usaha promotif dan preventif kesehatan mental di dunia pendidikan. Dengan begitu, sekolah menjadi pos penting dalam menjaga dan mengajarkan kemampuan untuk mengontrol diri bagi generasi muda. Pentingnya melibatkan dunia pendidikan didasari oleh besarnya pengaruh sekolah terhadap kehidupan seseorang. Rata-rata seperempat kehidupan manusia dihabiskan di bangku sekolah dengan asumsi setiap orang dapat sekolah hingga perguruan tinggi. Sekolah juga merupakan institusi kedua setelah keluarga yang mengajarkan keterampilan-keterampilan awal pada manusia, termasuk pengetahuan moral.

Peran aktif sekolah menjadi signifikan agar remaja dapat bertahan di tengah permasalahan hidup yang dihadapi dan tidak mudah mencari pelampiasan yang merugikan.

## **B. Pendidikan Indonesia dan Perilaku Menyimpang**

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.<sup>5</sup> Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Terkait dengan itu, *The World Economic Forum Swedia* di tahun 2000 merilis data yang menunjukkan rendahnya daya saing Indonesia, yaitu urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.<sup>6</sup> Masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai pengikut bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia, padahal perkembangan pendidikan Indonesia selalu memberikan terapi kejut bagi peserta didik dengan inovasinya. Pada tahun 2011, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) meluncurkan laporan mengenai ketersebaran pendidikan dalam hitungan *Education for All Index* (Indeks Pendidikan untuk Semua), dimana Indonesia digolongkan pada negara dengan level medium dan mendapat peringkat 69 dari 127 negara.<sup>7</sup>

Pendidikan di Indonesia memang senantiasa diwarnai dengan perubahan kebijakan. Setiap kali masa jabatan berakhir, maka kebijakan pendidikan pun ikut berubah. Misalnya saja dalam hal arahan pendidikan yang diatur oleh kurikulum. Pendidikan di negeri ini sempat menggunakan kurikulum 1994, kurikulum

<sup>5</sup> Meda Denish. Makalah Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/13/makalah-kualitas-pendidikan-di-indonesia-saat-ini/>, diakses tanggal 4 Juli 2012)

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization. 2011. *The Education for All Development Index*.

2004, dan kurikulum berbasis kompetensi. Perkembangan kurikulum tersebut digambarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tabel 1  
Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Nama kurikulum	Penekanan
RENCANA PELAJARAN 1947	Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan Pancasila.
RENCANA PELAJARAN TERURAI 1952	Lebih merinci setiap mata pelajaran, satu guru mengajar satu mata pelajaran.
KURIKULUM 1968	Bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
KURIKULUM 1975	Menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
KURIKULUM 1984	<i>Process skill approach.</i>
KURIKULUM 1994 dan SUPLEMEN KURIKULUM 1999	Mengombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara pendekatan proses. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum sehingga Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum yang sangat padat.
KURIKULUM 2004	Setiap pelajaran diuraikan berdasar kompetensi yang harus dicapai siswa. Hasilnya tidak memuaskan. Guru-guru pun tidak paham apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.
KTSP 2006	Guru lebih diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah.

sumber: depdiknas.go.id.

Bentuk penjenjangan pun berganti sesuai ide yang ingin diadopsi penguasa. Dirumuskannya bentuk pendidikan inklusif, rancangan sekolah bertaraf internasional, maupun sekolah akselerasi adalah bentuk percobaan pemerintah yang lain. Salah satu ide baru yang tujuh tahun terakhir ini diaplikasikan adalah Ujian Nasional yang merupakan program pemerintah dalam mengelola standar kelulusan murid sekolah. Idenya luhur, ingin menyeragamkan perkembangan pendidikan di seluruh pelosok nusantara. Namun, pada prakteknya, Ujian Nasional

<sup>8</sup> disarikan dari Agus Mulyadi. Kurikulum pendidikan 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, dan 2006. (<http://mbahkarno.blogspot.com/2011/11/kurikulum-pendidikan-1947-1952-1968.html>, diakses tanggal 23 Mei 2012).



(selanjutnya disebut UN) lebih banyak memperlmasalahkan hal teknis daripada mengembangkan kualitas keilmuan anak didik. Akibatnya, setiap tahun UN diprotes sebagai bentuk pembelajaran buruk dalam mengevaluasi prestasi siswa.

Kasus pencontekkan hingga bunuh diri mewarnai media massa nasional yang mencerminkan salah satu dampak negatif pelaksanaan evaluasi pendidikan ini. Polda Metro Jaya mencatat peningkatan kasus bunuh diri, dari 165 kasus di tahun 2009 menjadi 176 kasus di 2010.<sup>9</sup> Bahkan *viva news* melaporkan bahwa posisi Indonesia sudah mendekati negara-negara dengan angka bunuh diri yang tinggi seperti Jepang yang tingkat bunuh dirinya mencapai lebih dari 30.000 orang pertahun, dan Cina yang mencapai 250.000 orang pertahun.<sup>10</sup> Contoh kasus bunuh diri antara lain yang dilakukan Tri Sulistiono (21 tahun), yang bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur karena gagal dalam UN SMA pada Juni 2009.<sup>11</sup> Ada pula Ida Safitri, siswi SMP di Banyuwangi yang nyaris meninggal karena tidak dapat menerima kegagalannya dalam UN.<sup>12</sup> Hal serupa dilakukan Hendrik Irawan (19 tahun) yang meminum racun serangga karena terancam tidak dapat mengikuti UN.<sup>13</sup> Kasus bunuh diri karena UN juga terjadi di tahun berikutnya, 2008. Edi Hartono (19 tahun), meninggal setelah gantung diri di rumah neneknya. Pemuda tersebut diduga mengambil jalan pintas setelah tidak lulus UN dan mengurung diri di kamarnya.<sup>14</sup>

Selain masalah mental dalam menghadapi ujian, ada juga angka peningkatan aktivitas agresivitas yang tidak dapat diabaikan. Polda Metro Jaya mencatat adanya peningkatan jumlah tawuran di Jakarta yang pada tahun 2010 hanya 28 kasus menjadi 41 kasus pada tahun 2011. Dari 28 kasus itu, Jakarta Pusat memegang rekor dengan 19 kasus, Jakarta Selatan 3 kasus, Jakarta Barat 2 kasus, Tangerang Kabupaten 2 kasus, Tangerang Kota 1 kasus dan Depok 1 kasus. Sejak Januari hingga September 2011, pihaknya tercatat terdapat 41 kasus tawuran, dan Jakarta Pusat mendominasi dengan 25 kasus, Jakarta Selatan 6 kasus, Jakarta Barat 3 kasus, Jakarta Timur 3 kasus, Jakarta Utara 2 kasus, Bekasi 1 kasus, dan Depok 1 kasus.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Waspada! Curhat 'Buat Apa Aku Hidup!', (<http://janganbunuhdiri.net/jbd-info/> , diakses tanggal 28 Maret 2012).

<sup>10</sup> Kasus Bunuh Diri di Indonesia ([http://nasional.vivanews.com/news/read/110420-kasus\\_bunuh\\_diri\\_di\\_indonesia](http://nasional.vivanews.com/news/read/110420-kasus_bunuh_diri_di_indonesia), diakses tanggal 28 Maret 2012).

<sup>11</sup> 25 Juni 2009 Bunuh Diri karena Tak Lulus UN (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/06/25/69530/Bunuh.Diri.karena.Tak.Lulus.UN>, diakses tanggal 3 April 2012).

<sup>12</sup> Gagal UN Siswa SMP Mencoba Bunuh Diri. 2006. (<http://buser.liputan6.com/read/124929/Gagal.UN.Siswi.SMP.Mencoba.Bunuh.Diri>, diakses tanggal 3 April 2012).

<sup>13</sup> Reno Nugraha. 18 April 2007. Siswa SMK Coba Bunuh Diri, Diduga Karena Tak Bisa Ikut UN (<http://news.detik.com/read/2007/04/18/165336/769309/10/siswa-smk-coba-bunuh-diri-diduga-karena-tak-bisa-ikut-un>, diakses tanggal 11 April 2012).

<sup>14</sup> M. Supriyadi. 1 Desember 2008. Mengurung Diri Setelah Gagal UN, Edy Akhirnya Bunuh Diri. 2008. (<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/01/18165596/mengurung.diri.setelah.gagal.un.edy.akhirnya.bunuh.diri>, diakses tanggal 11 April 2012).

<sup>15</sup> Kasus Tawuran di Jakpus Tinggi ([http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita\\_detail.asp?nNewsId=46435](http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=46435), diakses tanggal 18 Maret 2012)

Data lain dari Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menemukan sebanyak 1.318 siswa SD, SMP, dan SMA dari total 1.647.835 siswa di DKI Jakarta terlibat tawuran di tahun 2010, bahkan 26 siswa di antaranya meninggal dunia.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan UN juga diwarnai dengan beberapa kecurangan, baik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama. Salah satunya adalah kasus pencontekkan masal di Surabaya yang terjadi pada tahun 2011 dimana Ny. Siami mengadukan SD Gadel Surabaya karena memberikan keleluasan bagi peserta UN untuk mencontek.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa UN telah “memaksa” sekolah untuk melakukan segala cara untuk memperoleh nilai UN yang tinggi, termasuk kegiatan mencontek tersebut.

Bunuh diri, mencontek, dan kekerasan merupakan gejala perilaku menyimpang yang harus dicermati sejak dini. Pendidikan sebagai institusi yang mengenalkan nilai kepada peserta didik dituntut untuk mampu menciptakan generasi berkarakter. Dengan kekuatan karakter tersebut, seseorang memiliki bekal untuk menghadapi permasalahan hidup ketika keluar dari insititusi pendidikan nantinya.

Pemerintah kurang memberikan penguatan kepada pendidikan mental. A.S. Neil menuliskan bahwa pendidikan konvensional melakukan kesalahan dengan lebih mengutamakan intelek daripada emosi.<sup>18</sup> Akibatnya, anak mungkin mengetahui banyak fakta, namun kurang memiliki kepuasan dan pemenuhan diri (*fulfillment*). Seperti yang disebutkan Michael Oakeshott, pemerintah modern tidak tertarik pada pendidikan, mereka hanya tertarik mengadakan semacam sosialisasi pada fragmen-fragmen yang masih bertahan pada kegiatan pendidikan.<sup>19</sup>

Hal lain yang menjadikan sekolah tidak ramah terhadap perkembangan mental anak adalah *stereotype* di masyarakat yang mengagungkan nilai akademik dibandingkan aspek keterampilan halus lain. Orang tua seringkali terdorong untuk memaksa anak mereka mengikuti berbagai upaya peningkatan kemampuan belajar agar dapat mencapai prestasi akademik yang baik. Kegiatan anak menjadi berlipat ganda karena selain belajar di sekolah, anak banyak yang mengikuti kursus di luar jam sekolah. Dengan begitu, waktu anak tersita untuk membentuk karakter yang sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Banyak pula orang tua yang menekankan prestasi belajar sebagai indikasi keberhasilan anak. Oleh karena itu, anak merasa bahwa nilai sekolah lebih penting daripada sikapnya. Apalagi jika lingkungan membiarkan perilaku anak yang kurang baik karena prestasi akademiknya yang memuaskan, maka anak menjadi kehilangan pegangan moral.

<sup>16</sup> Tawuran antar Pelajar di DKI Jakarta (<http://tawuran-kelompokbsi.blogspot.com/>, diakses tanggal 25 Maret 2012)

<sup>17</sup> Siami Menyesal Jika Diamkan Contekan Massal (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/16/lmvh4m-siami-menyosal-jika-diamkan-contekan-massal>, diakses tanggal 4 Juli 2012).

<sup>18</sup> Jpy.A. Palmer (ed). 50 Pemikir Paling Berpengaruh Terhadap Dunia Pendidikan Modern, 2010:9.

<sup>19</sup> Michael Oakshott. The Voice of Liberal Learning. Timothy Fuller (ed),( Connecticut: Yale University Press, 1989) hal.86.



Perilaku menyimpang peserta didik merupakan salah satu aspek yang harus dicermati berbagai pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah menyumbang peranan besar dalam terbentuknya pola perilaku anak. Sebagian besar kehidupan seorang anak dihabiskan di sekolah. Sekolah bukan hanya tempat anak menerima informasi akademis, tetapi juga mempelajari tata cara kehidupan yang sesuai dengan norma masyarakat. Goleman menyatakan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, di antaranya adalah kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (*mood*), berempati serta kemampuan bekerja sama.<sup>20</sup> Penelitian Goleman yang sebelumnya telah disampaikan pada tahun 1960-an oleh psikolog David McClelland juga menemukan bahwa kemampuan kognitif tidak berkaitan dengan kinerja seseorang, namun sensitivitas dan ekspektasi positif terhadap orang lain serta kecepatan dalam mempelajari jaringan sosial.<sup>21</sup> Kemampuan seseorang mengelola emosinya merupakan kunci dalam menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Sama halnya dengan keahlian akademik, maka seseorang perlu mengembangkan keterampilan pengaturan emosinya.

Dengan begitu, sekolah berperan membentuk keterampilan, baik materiil maupun mental. Sekolah merupakan "pabrik" yang memberikan bekal kepada anak agar dapat bertahan hidup di dunia ketika ia lulus nanti. Oleh karena itu, anak yang ditempa dalam sekolah yang baik diharapkan tidak hanya mampu menghadapi permasalahan secara teoritis namun juga mampu memandang suatu problema secara objektif. Kesuksesan seseorang tidak hanya didukung oleh kemampuan intelektualnya, namun juga kemampuan beradaptasi dengan norma yang berlaku. Dengan kalimat lain, sekolah harus mampu meluluskan individu yang sehat mental, selain berpengetahuan.

Semakin meningkatnya jumlah kasus kegagalan mental anak merupakan indikasi rendahnya pengelolaan kesehatan mental di sekolah. Perilaku menyimpang sering menjadi pelengkap gejala peserta didik yang kurang berprestasi. Penelitian Reis & McCoah menemukan bahwa mereka dipengaruhi banyaknya ketidakhadiran di kelas, performa rendah, perilaku menyimpang, kepercayaan diri yang rendah, masalah keluarga dan kemiskinan.<sup>22</sup>

Penyimpangan perilaku dijelaskan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th Edition Text Revision)* atau disingkat DSM IV TR sebagai *Conduct Disorder*.<sup>23</sup> Berkelahi merupakan salah satu bentuk ringan yang dikategorikan

<sup>20</sup> Daniel Goleman. *Working with Emotional Intelligence*, (USA: Bantam Dell Pub Group, 2000), hal. 44.

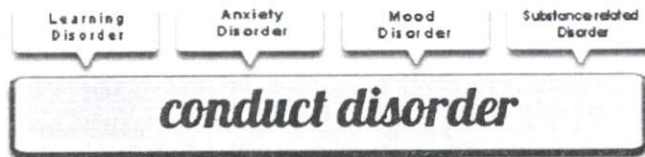
<sup>21</sup> David C. McClelland. *Competency assessment: Future prospects and developments*. Paper presented at the International Congress on the Assessment Center, Boston, MA, (1987, May).

<sup>22</sup> Dalam S. Reis, R.D Colbert & T.P. Hebert. *Understanding Resilience in Diverse, Talented Students in an Urban High School. Roeper Review*, Vol.27, 2, 2005: 111.

<sup>23</sup> American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Edition, Text Revision)* (Washington: American Psychiatric Association, 2000).

sekelompok dengan perilaku berbohong dan mencuri, di mana ketiganya dicurigai sebagai gejala awal dalam diagnosis *Conduct Disorder*. Gangguan ini seringkali diasosiasikan dengan gangguan pembelajaran (*Learning Disorder*), gangguan kecemasan (*Anxiety Disorder*), gangguan mood (*Mood Disorder*) dan gangguan keterkaitan (*Substance-related Disorder*). Kaitan gangguan tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

**Bagan 1. Kaitan Gangguan Perilaku dengan Gangguan Lain**



sumber: diadaptasi dari DSM IV

*Conduct Disorder* semakin banyak ditemui dalam beberapa dekade terakhir, terutama di daerah urban (perkotaan). Ini adalah diagnosis yang paling banyak diberikan kepada pasien anak-anak. Artinya, mereka yang berusia muda memiliki kecenderungan untuk terjangkit gangguan perilaku.

DSM IV TR mencatat bahwa gangguan ini dimulai sebelum sekolah, namun gejala yang signifikan seringkali baru dapat terdeteksi setelah anak masuk sekolah menengah hingga usia remaja menengah.<sup>24</sup> Perilaku agresif yang berkembang dalam gangguan perilaku ini biasanya mengarah pada kebiasaan meminum minuman keras, merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, dan tindakan nekad serta penuh resiko.

Gangguan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengabaian dan penolakan oleh orang tua; temperamen semasa balita yang sulit, pendidikan disiplin yang tidak konsisten, kekerasan fisik atau seksual, rendahnya pengawasan, tinggal di institusi pada usia yang terlalu muda, perubahan pengasuhan yang terlalu sering, keluarga terlalu besar, ibu merokok ketika hamil, penolakan teman sebaya, berasosiasi dengan kelompok nakal, adanya kekerasan di lingkungan dan beberapa bentuk psiko-patologis dalam keluarga (misalnya gangguan antisosial, ketergantungan, atau kekerasan).<sup>25</sup>

Ketiga perilaku tersebut belum cukup untuk memasukkan seorang anak sebagai pasien mental, namun ini merupakan *alarm* bagi orang tua dan guru untuk tidak mengabaikan perkembangan anak. Perkelahian bukanlah gejala kenakalan remaja yang dapat dianggap wajar. Namun begitu merupakan pengingat untuk segera melakukan tindakan kuratif. Fenomena perilaku menyimpang ini tidak

<sup>24</sup> *Ibid*: 97.

<sup>25</sup> *Ibid*: 96.



dapat dilepaskan dari kondisi pendidikan saat ini. Pelaku menunjukkan rendahnya ketahanan mental (resiliensi) terhadap tekanan hidup. Ketahanan mental ini seringkali disebut dengan istilah resiliensi dalam ilmu psikologi.

### C. Resiliensi

Wolin and Wolin menggambarkan individu yang resilien sebagai orang yang kokoh, tegar, dan luar biasa.<sup>26</sup> Resilien dianggap sebagai mekanisme perlindungan yang mengubah cara seseorang dalam merespon resiko<sup>27</sup> atau sebagai penyesuaian atas kejadian negatif. Rutter<sup>28</sup> mengartikan resiliensi sebagai peranan positif dari perbedaan individu dalam merespon tekanan dan kesulitan.<sup>29</sup>

Perlu ditekankan bahwa faktor resiko selalu terjadi di mana saja dan kapan saja. Faktor resiko ini adalah variabel yang menciptakan efek negatif. Untuk melindungi diri, maka seseorang membutuhkan faktor pelindung, seperti kemampuan intelektual yang baik, kemampuan memecahkan masalah, dan keterlibatan dalam aktivitas yang produktif.<sup>30</sup> Hal serupa ditemukan oleh Davila dkk, bahwa karakteristik dan gaya interpersonal dicurigai sebagai prediktor stres, termasuk rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi interpersonal yang buruk.<sup>31</sup> Ditambahkan pula oleh Hankin dkk tentang keterlekatan yang tidak aman sebagai penyebab stres.<sup>32</sup>

Dr. Paul Stoltz merumuskan potensi manusia dalam membentengi dirinya dan bangkit melawan kepahitan. Ia menamakannya "*Adversity Quotient*".<sup>33</sup> Ada 4 dimensi *Adversity Quotient* (AQ) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Control*. Individu dengan AQ tinggi mempersepsikan dirinya memiliki kendali dan memiliki pengaruh turut membantu mengubah keadaan menjadi lebih baik, sedangkan individu dengan AQ rendah akan segera menyerah karena merasa tidak memiliki kendali akan keadaan tersebut.
2. *Ownership*. Individu dengan AQ tinggi akan turut bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu agar keadaan menjadi lebih baik, walaupun bukan mereka yang menyebabkan keadaan yang tidak diinginkan tersebut.

<sup>26</sup> S.J.Wolin & S.Wolin. *The Resilient Self*, 1993.

<sup>27</sup> M.Rutter, Stress, coping and development: Some issues and some questions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 22(4), 1981.

<sup>28</sup> M.Rutter. Psychosocial resilience and protective mechanism. *American Journal of Orthopsychiatry*, 57,316-331, 1987.

<sup>29</sup> Dalam S.Reis, R.D. Colbert & T.P. Hebert. Understanding Resilience in Diverse, Talented Students in an Urban High School. *Roeper Review*, (27)2, 2005 hal. 111.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 111.

<sup>31</sup> J Davilla dkk. *Poor Interpersonal Problem Solving As A Mechanism Of Stress Generation In Depression Among Adolescent Women*. *Journal of Abnormal Psychology*. 104, 1995.

<sup>32</sup> B.L.Hankin dkk. Adult attachment dimensions and specificity of emotional distress symptoms: Prospective investigations of cognitive risk and interpersonal stress generation as mediating mechanism. *Personality and Social Psychology Bulletin*. 31,2005.

<sup>33</sup> Paul G. Stoltz. *Adversity Quotient at work: Make Everyday Challenges- the key to your success*, (New York: HarperCollins,2000).

Sebaliknya, mereka dengan AQ rendah akan merasa menjadi korban dan merasa tak berdaya, sehingga tidak akan melakukan apa pun.

3. *Reach*. *Reach* adalah kemampuan untuk membatasi masalah pada persoalannya saja, tidak melebar ke bagian lain dari hidupnya. Misalnya bila saat mendapat nilai buruk dalam ulangan, siswa dengan AQ tinggi akan menyadari kesalahannya dalam belajar, sedangkan siswa dengan AQ rendah akan menganggap hidupnya gagal total dan ia adalah seorang anak yang tidak berarti dan bodoh.
4. *Endurance*. *Endurance* adalah kemampuan untuk memandang melampaui keadaan sulit dan mempertahankan harapan. Individu dengan AQ tinggi memiliki kemampuan untuk merasakan bahwa kesulitan ini pasti akan berlalu, AQ rendah akan merasa 'kiamat telah tiba', keadaan tidak akan bisa lebih baik.

Penelitian menemukan bahwa kekuatan personal, lingkungan yang sehat, dan pembelajaran yang berhasil berasosiasi terhadap kemampuan resiliensi, di antaranya:

1. Kompetensi sosial: empati, keterampilan komunikasi, kompetensi antar budaya, humor.
2. Kemampuan pemecahan masalah dan metakognisi: perencanaan, penetapan tujuan, pemikiran kritis dan penuh sumber daya.
3. Otonomi dan identitas diri: *Self Efficacy*, lokus kontrol internal, penguasaan, kesadaran diri, pelepasan diri dari pengaruh negatif.
4. Perasaan bertujuan dan keyakinan akan masa depan yang cerah: minat khusus, imajinasi, bertujuan, motivasi berprestasi, aspirasi belajar, persisten.

McMillan & Reed menemukan beberapa ciri murid yang resilien, antara lain:<sup>34</sup>

1. Memiliki *self efficacy* yang kuat dan yakin kesuksesan dipilih sendiri olehnya. *Self efficacy* diartikan Bandura sebagai keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil positif.<sup>35</sup> Bandura juga menyatakan bahwa *self efficacy* berpengaruh terhadap perilaku. *Self efficacy* memiliki kesamaan dengan motivasi untuk menguasai dan motivasi intrinsik.<sup>36</sup>
2. Memiliki sistem pendukung psikologis, baik di dalam maupun di luar sekolah yang memberikan penguatan kepadanya. Ford menemukan pada remaja kulit hitam yang resilien adanya *locus control* internal, pemaknaan diri yang positif dan perasaan mampu berdaya.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> J.H McMillan & D.F Reed. At risk students and resiliency: Factors contributing to academic success. *Clearing House*, 67(3), 1994.

<sup>35</sup> dalam J.W. Santrock. Psikologi Pendidikan (ed 2), (Jakarta: KENCANA, 2010) hal. 286.

<sup>36</sup> *Ibid*: 523.

<sup>37</sup> D.Ford. Nurturing resilience in gifted black youth. *Roeper Review*, 17, 80-85, 1994.



Resiliensi merupakan keterampilan yang perlu diajarkan kepada setiap murid. Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peranan besar dalam mengembangkan keterampilan tersebut. Dalam tatanan sistem pendidikan nasional, kapasitas tersebut termasuk dalam konsep kecerdasan moral. Menurut Zubaedi, pembangunan kecerdasan moral merupakan modal untuk menumbuhkan karakter yang baik.<sup>38</sup>

#### **D. Pendidikan Karakter sebagai Sarana Membentuk Ketahanan Mental**

##### **1. Pengertian Pendidikan Karakter**

David Elkind & Freddy Sweet menjelaskan pendidikan karakter sebagai usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli tentang dan melaksanakan nilai-nilai etika inti.<sup>39</sup> Hal senada diungkapkan Williams & Schnaps yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai *"Any deliberate approach by which school personnel, often in conjunction with parents and community members, help children and youth become caring, principled, and responsible"* (berbagai usaha yang dilakukan oleh para personel sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi peduli, berprinsip dan bertanggung jawab). Jelaslah bahwa pendidikan karakter merupakan rangkaian pembelajaran yang didapatkan seorang individu dari berbagai kelompok sosial yang berinteraksi dengannya dalam rangka membentuk karakter positif.

##### **2. Fungsi Pendidikan Karakter**

Zubaedi merumuskan tiga fungsi utama pendidikan karakter, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila;
- b. Fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera;
- c. Fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

<sup>38</sup> Dr. Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>39</sup> 2004 dalam Dr. Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.15.

<sup>40</sup> Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011).

### 3. Urgensi Pendidikan Karakter

Pengamat pendidikan setuju bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak dapat mengakomodasi semua siswa. Lickona menerangkan bahwa minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di tengah masyarakat.<sup>41</sup>

Pendidikan kita bersifat materialistis yang hanya merujuk pada nilai angka sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan. Menurut Atok Miftahul Huda, keadaan yang tergambarkan ini bukan hal baru, tetapi sudah terpola melalui kebijakan politik pemerintahan sejak jaman Orde Lama, Orde Baru bahkan di Orde Reformasi ini.<sup>42</sup> Motivator Pendidikan Ken Robinson pun mengkritik pendidikan di dunia yang menempatkan mata pelajaran berhitung dan bahasa dalam hirarki yang paling tinggi dan diajarkan secara ketat, tidak seperti mata pelajaran lain. Padahal, tidak semua orang berminat kepada dua mata pelajaran itu. Di Indonesia pun, mata pelajaran formal seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pelajaran yang lebih menyenangkan seperti seni rupa, olahraga dan agama.

Selain sistem penilaian yang materialis tersebut, pola pengajaran di Indonesia juga cenderung kaku yang memaksa siswa untuk mengikuti pola pikir guru dan membunuh kreativitas siswa. Teresa Amabile menuliskan dalam laporannya tentang "*How To Kill Creativity*" bahwa ada 6 hal yang akan mendukung kreativitas.<sup>43</sup> *Pertama*, dorongan organisasi yang kreatif dapat menjadikan seseorang kreatif pula. *Kedua*, dukungan supervisi yang berfungsi sebagai pengarah sekaligus pemberdaya agar siswa dapat bekerja secara mandiri. *Ketiga*, dukungan kelompok. Seorang siswa menjadikan teman sebayanya sebagai sumber dukungan. Oleh karena itu kreativitas juga dipengaruhi kreativitas teman-teman dalam kelompoknya. *Keempat*, kebebasan yang melepaskan diri seseorang dari kekangan nilai orang lain. *Kelima*, sumber daya yang cukup untuk mengungkapkan kreativitas yang dimiliki seseorang. *Keenam*, tantangan yang akan memotivasinya untuk melampaui tantangan tersebut.

Kreativitas selalu terkait dengan 3 domain, yaitu domain keahlian, pemikiran kreatif, dan motivasi intrinsik. Orang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam suatu bidang cenderung mengetahui apa yang ingin dikembangkan. Pemikiran kreatif diperlukan untuk menentukan inovasi yang ingin dicapai. Seorang yang kreatif tidak didorong oleh orang lain, melainkan dirinya sendiri untuk menjadi kreatif, karena jika dipaksa, maka hal itu berubah jadi pendiktean, padahal kreativitas merupakan modal anak dalam menghadapi konflik hidup yang semakin beragam di masa sekarang.

<sup>41</sup> Dalam Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.14.

<sup>42</sup> Atok Miftahul Huda, *Mewujudkan Target Mdns Pendidikan Untuk Kemajuan Pendidikan Masa Depan*. ([ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/142/165](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/142/165). Diakses tanggal 29 Juli 2011).

<sup>43</sup> Dalam Laird D McLean, *Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development*. *Advances in Developing Human Resources* 7(2), 2005: 231).



## E. Mengembangkan Pendidikan Karakter

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pengembangan pendidikan karakter setidaknya harus memenuhi 3 aspek, yaitu:

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Semakin berkembangnya persaingan di dunia, membuat dunia pendidikan juga harus berpacu untuk menghasilkan lulusan terbaik. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia pendidik yang kompeten. Beberapa tahun belakangan ini dunia pendidikan Indonesia sibuk mencanangkan program-program berbasis kompetensi. Kompetensi sendiri menurut Spencer&Spencer adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu<sup>44</sup>. Kompetensi ini tidak terbatas dalam masalah keterampilan berat (*hard skill*) atau keilmuan, tetapi juga termasuk keterampilan halus (*soft skill*) berupa keterampilan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.<sup>45</sup>

Sayangnya, penelitian menemukan bahwa guru adalah salah satu pekerjaan yang paling menekan. Tennant menjelaskan bahwa depresi pada guru disebabkan oleh seting tempat dan pekerjaan.<sup>46</sup> Mengajar murid yang stres pada awal-awal bekerja juga merupakan penyebab depresi guru di tahun-tahun akhir masa baktinya. Guru yang depresif dapat menjadikan suasana semakin buruk. B. S. Dohrenwend and B. P. Dohrenwend yakin bahwa keahlian interpersonal yang buruk dapat menciptakan suasana kelas yang mendorong murid untuk melanggar aturan.<sup>47</sup> Guru tersebut menimbulkan kebosanan bagi murid sehingga menimbulkan perasaan memberontak ataupun agresif. Guru yang stres pun seringkali sulit memberikan informasi yang reliabel sesuai tuntutan tugas.

Lalu, seperti apa guru yang dibutuhkan dalam mendukung pendidikan karakter? Slade menemukan bahwa karakteristik guru yang baik terdiri atas:<sup>48</sup>

- a. membuat semua menjadi berbeda;
- b. membuat perubahan-perubahan dalam interaksi dengan siswa;
- c. berani mengambil resiko;
- d. orang yang baik; dan
- e. memberikan kesempatan siswa membuat pilihan.

Yuli Fajar Susetyo yakin bahwa setiap guru dapat berperan menjaga dan mengembangkan kesejahteraan siswanya.<sup>49</sup> Langkah pertamanya adalah memulai dari diri sendiri dengan mengembangkan pemahaman yang benar tentang anak,

<sup>44</sup> L.M. Spencer dan S.M. Spencer. *Competence at Work* (. Canada: John Wiley & Sons,1993).

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> C. Tennant. Work-related Stress and depressive disorders. *Journal of Psychosomatic Research* 51, 2001: 699.

<sup>47</sup> Barbara S. Dohrenwend and Bruce P. Dohrenwend. *Life Stress and Illness; Formulation of the Issues*, 1981.

<sup>48</sup> 2001, dalam Yuli Fajar Susetyo. *Guru Peduli Kesejahteraan Siswa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), hal.15-16.

<sup>49</sup> Yuli Fajar Susetyo. *Guru Peduli Kesejahteraan Siswa*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012) hal.27-28.

mengembangkan suasana dan lingkungan yang kondusif, menghargai setiap anak, memperlakukan siswa sebagai insan yang bermartabat, mengembangkan komunikasi apresiatif, mengembangkan metode pembelajaran afeksi-kepribadian, dan mengembangkan sikap saling menghargai antarsivitas akademik di sekolah.

Selain guru, pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab keluarga, terutama orang tua, serta orang lain di lingkungan sosial siswa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan karakter bukan sekedar transfer teks, namun pemaknaan budi pekerti sehingga pembelajarannya dilakukan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Seorang peserta didik dapat menemukan poin budi pekerti di sekolah, di rumah maupun di lingkungan luar, oleh karena itu ia harus bertemu dengan contoh/teladan yang baik di mana saja. Dengan kalimat lain, lingkungan yang berkarakter merupakan pengaruh terbesar dalam pembentukan moral anak.

Sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pendidikan yang sehat mental. Untuk itu sekolah harus bekerja sama dengan *stake holder* lain seperti keluarga yang saling menghormati, masyarakat, dan pemimpin. Keluarga dan masyarakat harus memahami pentingnya kesehatan mental bagi generasi muda sehingga tidak melakukan intervensi yang bertentangan dengan prinsip sehat mental.

## 2. Aspek Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sistem pendidikan yang tertuang dalam undang-undang tersebut masih perlu pengembangan dalam pengaturan di lapangan. Saat ini, fokus pendidikan nasional belum mencapai permasalahan kesehatan mental. Oleh karena itu, perlu perbaikan pengaturan teknis yang memiliki perspektif kesehatan mental yang sejalan dengan pembelajaran materiil.

## 3. Aspek Sarana

Sarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam terbentuknya lingkungan pembelajaran yang positif, bahkan pakar manajemen kelas Carol Weinstein dan Andrew Mignano menyarankan kelas yang memberikan kesan personal<sup>50</sup>. Lingkungan yang positif untuk pengajaran meliputi perlengkapan

<sup>50</sup> 1997, dalam J.W. Santrock, Psikologi Pendidikan (ed 2) (Jakarta: KENCANA, 2010), hal.564.



belajar dan penataan lingkungan belajar. Sarana yang minim, bahkan kurang, merupakan penghambat proses belajar. Meskipun begitu, pembelajaran yang baik tidak selalu berhubungan dengan sarana belajar yang mahal dan berteknologi modern. Peralatan tersebut harus dapat dikelola dengan optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam sebuah kelas, pengelolaan alat belajar juga dipengaruhi oleh penataan ruang kelas. Evertson, Emmer, & Worsham merumuskan empat prinsip dasar penataan ruang kelas, yaitu:<sup>51</sup>

- Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang;
- Pastikan guru dapat dengan mudah melihat semua murid;
- Materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses; dan
- Pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas.

#### F. Membentuk Komunitas Sehat

Terbentuknya pendidikan karakter tidak semata-mata menjadi tugas sekolah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan komunitas sehat mental yang melingkupi semua interaksi sosial siswa, baik dari keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintahan yang mempengaruhi sistem pendidikan terlaksana. Interkorelasi semua pihak tersebut memberikan masukan terhadap kualitas mental individu sebagaimana penulis rumuskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1  
Interkorelasi Sosial Individu



Komunitas sehat "ketika mempertemukan berbagai kebutuhan anggotanya dalam cara yang kongruen dengan nilai yang jelas: *self determination*, bebas, pertumbuhan pribadi, sehat, kepedulian, simpatik, akuntabilitas, transparansi, dan responsif terhadap kebaikan; kolaborasi, partisipasi yang demokratis, respek terhadap keberagaman manusia, dukungan terhadap struktur komunitas, serta aturan sosial, dan sebagainya."<sup>52</sup> Tatanan ideal komunitas sehat dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>51</sup> 2003, dalam J.W. Santrock, Psikologi Pendidikan (ed 2) (Jakarta: KENCANA, 2010), hal. 560.

<sup>52</sup> Perry, et. al, 2002; Farrel, 2009, dalam Amitya Kumara. Kesehatan Mental di Sekolah, 2012:37.

## 1. Lingkungan intrinsik

Individu dilahirkan sehat dan dilengkapi kebutuhannya baik dalam hal fisik maupun batin, yaitu yang memperoleh kasih sayang yang cukup, sehingga mampu membangun kepercayaan diri yang memadai untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

## 2. Lingkungan ekstrinsik

### a. Keluarga

Keluarga yang sehat tidak selalu keluarga yang kaya dan berlimpahan materi, namun keluarga yang cukup memberikan kasih sayang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang sehat dan menginternalisasi nilai-nilai positif cenderung memiliki kemampuan untuk menghargai dirinya sendiri, yang nantinya akan menjadi pondasi kokoh dalam beradaptasi di lingkungan asing. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi individu merupakan pionir dalam membangun mental positifnya.

### b. Sekolah

Pendidikan yang tepat guna sesuai dengan usia dan kemampuan anak lebih diutamakan untuk menyeimbangkan kemajuan kognisi, afeksi dan psikomotorik anak. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang mendukung adanya motivasi belajar, baik dalam hal akademis, fisik maupun moral, ditambah dengan sistem teladan yang terkontrol akan melatih perilaku positif dalam diri individu. Dengan begitu, sekolah merupakan institusi legal dalam menginternalisasikan nilai-nilai positif dalam diri individu.

### c. Masyarakat

Peranan masyarakat dalam memberikan contoh di dunia nyata bagi anak sangat besar. Oleh karena itu, anak yang hidup di lingkungan masyarakat terpelajar cenderung lebih mudah menerima pola perilaku pembelajar. Masyarakat dalam hal ini berfungsi sebagai pengontrol pola perilaku siswa di luar rumah dan sekolah.

### d. Pemangku kebijakan

Dalam perannya membentuk komunitas sehat mental bagi setiap warga negara Indonesia, maka peran pemimpin dan pemangku kebijakan sangat penting. Perhatian terhadap pentingnya kesehatan mental harus diwujudkan melalui program pendidikan yang memiliki perspektif tersebut.

## G. Penutup

Pendidikan yang sehat mental merupakan salah satu upaya mengembangkan kesejahteraan hidup bagi generasi yang akan datang. Pendidikan karakter ini tidak dapat dilakukan oleh sekolah secara mandiri, namun harus bekerja sama dengan elemen lingkungan sosial yang mempengaruhi karakter anak. Keluarga berperan



sebagai lingkungan pertama anak untuk memberikan idealisme moral kepada anak. Selanjutnya, sekolah menjadi institusi untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter positif sejalan dengan pengembangan kualitas keilmuan anak. Untuk menjaga agar nilai tersebut tetap dilaksanakan maka anak perlu mendapatkan teladan dari masyarakat.

Dalam tugasnya sebagai pengemban kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah perlu mengedepankan sistem pendidikan yang sehat mental dalam mendukung pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka DPR RI dapat mendorong setiap kebijakan berbasis kesehatan mental. Salah satu upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Kesehatan Jiwa melalui komisi terkait (Komisi IX) yang diharapkan dapat memberikan rambu-rambu pendidikan yang kondusif bagi perkembangan pendidikan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Edition, Text Revision). Washington: American Psychiatric Association.
- Atok Miftachul Hudha. 2010. Mewujudkan Target Mdns Pendidikan Untuk Kemajuan Pendidikan Masa Datang. ([ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/142/165](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/142/165). Diakses tanggal 29 Juli 2011.)
- Davila, J., Hammen, C., Burge, D., Paley, B., & Daley, S.E. 1995. Poor Interpersonal Problem Solving As A Mechanism Of Stress Generation In Depression Among Adolescent Women. *Journal of Abnormal Psychology*. 104, 592-600.
- Dohrenwend, B., & Dohrenwend, B. P. 1981, Life Stress and Illness; Formulation of the Issues: 1-27 dalam Barbara S, Dohrenwend and Bruce P, Dohrenwend, eds., Stressful Life Events and Their Contexts. New York; Prodist.
- Ford, D. (1994). Nurturing resilience in gifted black youth. *Roeper Review*, 17, 80-85.
- Goleman, D. 2000. Working with Emotional Intelligence. USA: Bantam Dell Pub Group.
- Hankin, B.L., Kassel, J.D., & Abela, J.R.Z. 2005. Adult attachment dimensions and specificity of emotional distress symptoms: Prospective investigations of cognitive risk and interpersonal stress generation as mediating mechanism. *Personality and Social Psychology Bulletin*. 31, 136-151.
- Kumara, Amitya. 2012. Kesehatan Mental di Sekolah, dalam *Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Faturochman, dkk, ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McLean, Laird D. 2005. *Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development*. Advances in Developing Human Resources Vol. 7, (2) May 2005 226-246
- McClelland, D. C. (1987, May). Competency assessment: Future prospects and developments. Paper presented at the International Congress on the Assessment Center, Boston, MA.
- McMillan, J.H., & Reed, D.F. 1994. At risk students and resiliency: Factors contributing to academic success. *Clearing House*, 67(3), 137-140.



- Oakshott, Michael. 1989. *The Voice of Liberal Learning*. Timothy Fuller (ed). Connecticut: Yale University Press.
- Palmer, Jpy.A. (ed). 2010. 50 Pemikir Paling berpengaruh terhadap dunia Pendidikan Modern. Jogjakarta: Laksana.
- Reis, S., Colbert, R.D., & Hebert, T.P. 2005. Understanding Resilience in Diverse, Talented Students in an Urban High School. *Roeper Review*, Vol.27, 2.
- Rutter, M. 1981. Stress, coping and development: Some issues and some questions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 22(4), 323-356.
- Rutter, M. 1987. Psychosocial resilience and protective mechanism. *American Journal of Orthopsychiatry*, 57, 316-331.
- Santrock, J.W. 2010. Psikologi Pendidikan (ed 2), terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: KENCANA.
- Spencer, L. M., & Spencer S. M. (1993). *Competence at Work*. Canada: John Wiley & Sons.
- Stoltz, P. G. (2000). *Adversity quotient at work: Make everyday challenges - The key to your success*. New York: HarperCollins.
- Susetyo, Yuli Fajar. 2012. Guru Peduli Kesejahteraan Siswa, dalam *Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Faturochman, dkk., ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tennant, C. Work-related Stress and depressive disorders. *Journal of Psychosomatic Research* 51 (2001) 697-704.
- Weinstein, C.S. & Mignano, A.J., Jr. 1997. *Elementary Classroom Management*. New York: McGrawHill.
- Wolin, S.J., & Wolin, S. 1993. *The resilient self*. New York: Villard Books.
- World Health Organization. 2005. *Promoting Mental Health: Concept, Emerging Evidence, Practice*. Switzerland: WHO Press.
- Zubaedi, Dr., M.Ag., M.Pd. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

### **Website**

- , Waspada! Curhat 'Buat Apa Aku Hidup!', (<http://janganbunuhdiri.net/jbd-info/>, diakses tanggal 28 Maret 2012).

- , Kasus Bunuh Diri di Indonesia ([http://nasional.vivanews.com/news/read/110420-kasus\\_bunuh\\_diri\\_di\\_indonesia](http://nasional.vivanews.com/news/read/110420-kasus_bunuh_diri_di_indonesia), diakses tanggal 28 Maret 2012).
- , 25 Juni 2009. Bunuh Diri karena Tak Lulus UN (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/06/25/69530/Bunuh.Diri.karena.Tak.Lulus.UN>, diakses tanggal 3 April 2012)
- , Gagal UN Siswa SMP Mencoba Bunuh Diri. 2006. (<http://buser.liputan6.com/read/124929/Gagal.UN.Siswi.SMP.Mencoba.Bunuh.Diri>, diakses tanggal 3 April 2012).
- Nugraha, ReNomor18 April 2007. Siswa SMK Coba Bunuh Diri, Diduga Karena Tak Bisa Ikut UN (<http://news.detik.com/read/2007/04/18/165336/769309/10/siswa-smk-coba-bunuh-diri-diduga-karena-tak-bisa-ikut-un>, diakses tanggal 11 April 2012)
- M. Supriyadi. 1 Desember 2008. Mengurung Diri Setelah Gagal UN, Edy Akhirnya Bunuh Diri. 2008. (<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/01/18165596/mengurung.diri.setelah.gagal.un.edy.akhirnya.bunuh.diri>, diakses tanggal 11 April 2012).
- United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization. 2011. Education For All Global Monitoring Report. <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/>, diakses tanggal 23 April 2012.